

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2013 - 2018

REVISI



KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2015



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 menyatakan perlu dilakukan perbaikan penetapan sasaran, penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja yang belum menunjang keberhasilan pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 4 ayat (10) diubah menjadi sebagai berikut:

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- B. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal 27 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

Nomor: 4 /Bag.Hukum/SETDA/VIII -2016
Tanggal 10 Agustus 2016
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

ROYKE LUMINGAS, SH
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP.19670918 200012 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 96

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA : (4/2016)

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dapat diselesaikan. Substansi RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara serta memenuhi harapan warga Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan kabupaten yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati Minahasa Tenggara adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Minahasa Tenggara secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas kita dapat wujudkan cita-cita dan mewujudkan visi - misi, menjadikan Minahasa Tenggara Jelas Sejahtera.

Ratahan, 27 Juni 2016

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional	I-6
1.3.2. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara	I-7
1.3.3. RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara	I-7
1.3.4. RPJMD dan Renstra SKPD	I-8
1.3.5. RPJMD dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-14
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.5.1 Maksud.....	I-15
1.5.2 Tujuan.....	I-15
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-18
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-24
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-24
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-29
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-32
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-32
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-32
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-83
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-92
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-93
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-96
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-100
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia	II-104
Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KAERANGKA PENDANAAN.....	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-3
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-6

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-7
3.2.1 Analisis Pembiayaan.....	III-7
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-11
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III-14
3.1.1 Proyeksi Data Masa lalu	III-14
3.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-14
	III-15
Bab IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS.....	
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Sosial Budaya.....	IV-1
4.1.2 Ekonomi.....	IV-1
4.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	IV-4
4.1.4 Infrastruktur.....	IV-7
4.1.5 Geomorfologis, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.....	IV-7
4.1.6 Politik.....	IV-9
4.1.7 Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	IV-10
4.1.8 Ketentraman dan Ketertiban.....	IV-10
4.1.9 Aparatur.....	IV-10
4.1.10 Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah.....	IV-10
4.1.11 Pencapaian Target Millenium Development Goal's (MDG'S).....	IV-10
4.2 Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	IV-11
4. 2. 1 Kekuatan (Strength).....	IV-11
4. 2. 2 Kelemahan (Weakness).....	IV-11
4. 2. 3 Peluang (Opportunity).....	IV-12
4. 2. 4 Ancaman (Threat).....	IV-13
4.3 Analisis Isu Strategis.....	IV-13
	IV-14
Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-1
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V-1
	V-2
Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
6.1 Perumusan Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-1
	VI-2
Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	
7.1 Program dan Kegiatan Rutin pada Setiap SKPD.....	VII-1
7.2 Program Pembangunan Daerah.....	VII-1
7.2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib	VII-2

Pendidikan.....	
7.2.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan.....	VII-2
7.2.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum.....	VII-3
7.2.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan.....	VII-3
7.2.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang.....	VII-4
7.2.6 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.....	VII-5
7.2.7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan.....	VII-5
7.2.8 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup.....	VII-6
7.2.9 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan.....	VII-6
7.2.10 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.....	VII-6
7.2.11 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	VII-7
7.2.12 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	VII-7
7.2.13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial.....	VII-7
7.2.14 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja.....	VII-8
7.2.15 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	VII-8
7.2.16 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah.....	VII-9
7.2.17 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan.....	VII-9
7.2.18 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.....	VII-9
7.2.19 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	VII-10
7.2.20 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	VII-10
7.2.21 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib	VII-11

Ketahanan Pangan.....	
7.2.22 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	Vii-12
7.2.23 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik.....	Vii-12
7.2.24 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan.....	Vii-12
7.2.25 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.....	Vii-13
7.2.26 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan.....	Vii-13
7.2.27 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian.....	Vii-13
7.2.28 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan.....	Vii-13
7.2.29 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	Vii-14
7.2.30 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata.....	Vii-14
7.2.31 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.....	Vii-15
7.2.32 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan.....	Vii-15
7.2.33 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian.....	Vii-15
7.2.34 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi.....	Vii-16

Bab VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN..

1. Mengembangkan tata kelola Pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum, demokratis, profesional, dan melayani. (Sukses Pemerintahan).....	Viii-1
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat).....	Viii-1
3. Mengembangkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (Keiapa), perkebunan dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian)..	Viii-3
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir	Viii-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara selang waktu 2009-2013 telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, selain munculnya hal-hal baru seiring dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya perbaikan dan peningkatan dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan sebuah perencanaan yang integral dan komprehensif yang menyangkut semua bidang pembangunan. Oleh karena itu, tersusunnya sebuah dokumen perencanaan yang baik mutlak diperlukan demi terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, perlu dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah, dokumen perencanaan yang perlu dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan

optimal. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 maka RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dipandang perlu untuk dilakukan revisi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LEV-608/PW18/3/2014 tanggal 24 Desember 2014;
2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan beberapa OPD;
3. Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
4. Penyesuaian dengan Kebijakan nasional NAWA CITA.

Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dokumen Revisi RPJMD 2013 - 2018 yang memuat visi, misi dan program pemerintah Minahasa Tenggara. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa rangkaian kegiatan:

1. Permohonan usulan Revisi RPJMD kepada Bupati Minahasa Tenggara
2. Persetujuan Bupati Minahasa Tenggara
3. Penyusunan Rancangan Awal Revisi RPJMD
4. Focused Group Discussion (FGD)
5. Forum SKPD
6. Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD
7. Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD
8. Pengajuan Ranperda Revisi RPJMD menjadi Peraturan Daerah
9. Konsultasi kepada Gubernur Sulawesi Utara up Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
10. Persetujuan bersama DPR

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sulawesi Utara, dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015.
3. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur..
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2010-2014, RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu :

- 1) Agenda I : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 2) Agenda II : Perbaikan tata kelola pemerintahan
- 3) Agenda III : Penegakkan pilar demokrasi
- 4) Agenda IV : Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
- 5) Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Nasional, maka ditetapkan RPJMN 2015-2019, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan Dasar-dasar strategi Pembangunan Nasional dan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu :

➤ Dasar – dasar Strategi Pembangunan Nasional

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah.
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Membangun dari pinggir dan dari desa
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat.
5. Pembangunan Nasional sebagian besar adalah agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

➤ Visi– Misi Pembangunan 2015-2019

✓ Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

✓ Misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

1.3.2 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan bagian dari Tahap Kedua dan Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 yakni Tahap Pematapan (2011-2015) dan Tahap Akselerasi (2016-2020). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Minahasa Tenggara masa bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada visi, misi daerah serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025.

Visi daerah 2005-2025 adalah **"Kabupaten Minahasa Tenggara yang mandiri, adil, sejahtera dan berkelanjutan"**, sedangkan Misinya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlak mulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkualitas
3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya
4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian
5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan untuk lebih mempercepat upaya-upaya peningkatan masyarakat maka Misi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara disesuaikan kembali menjadi 7 Misi yang tergambar pada Bab V.

1.3.3 RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara

Penyusunan Revisi RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang serta kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033 jo Perda Revisi RTRW Nomor Tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah **"Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perikanan Dan Pariwisata."**

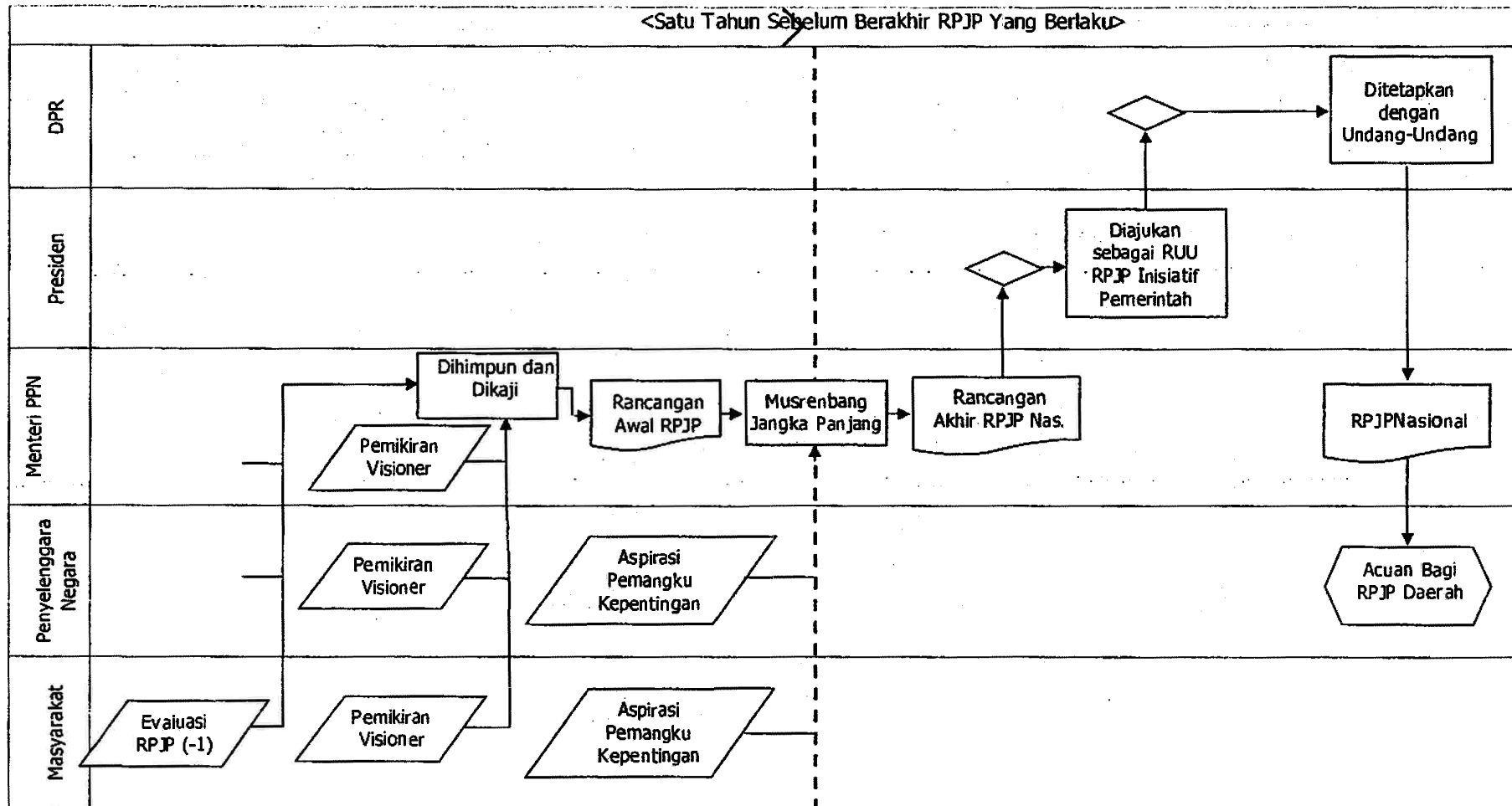
1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

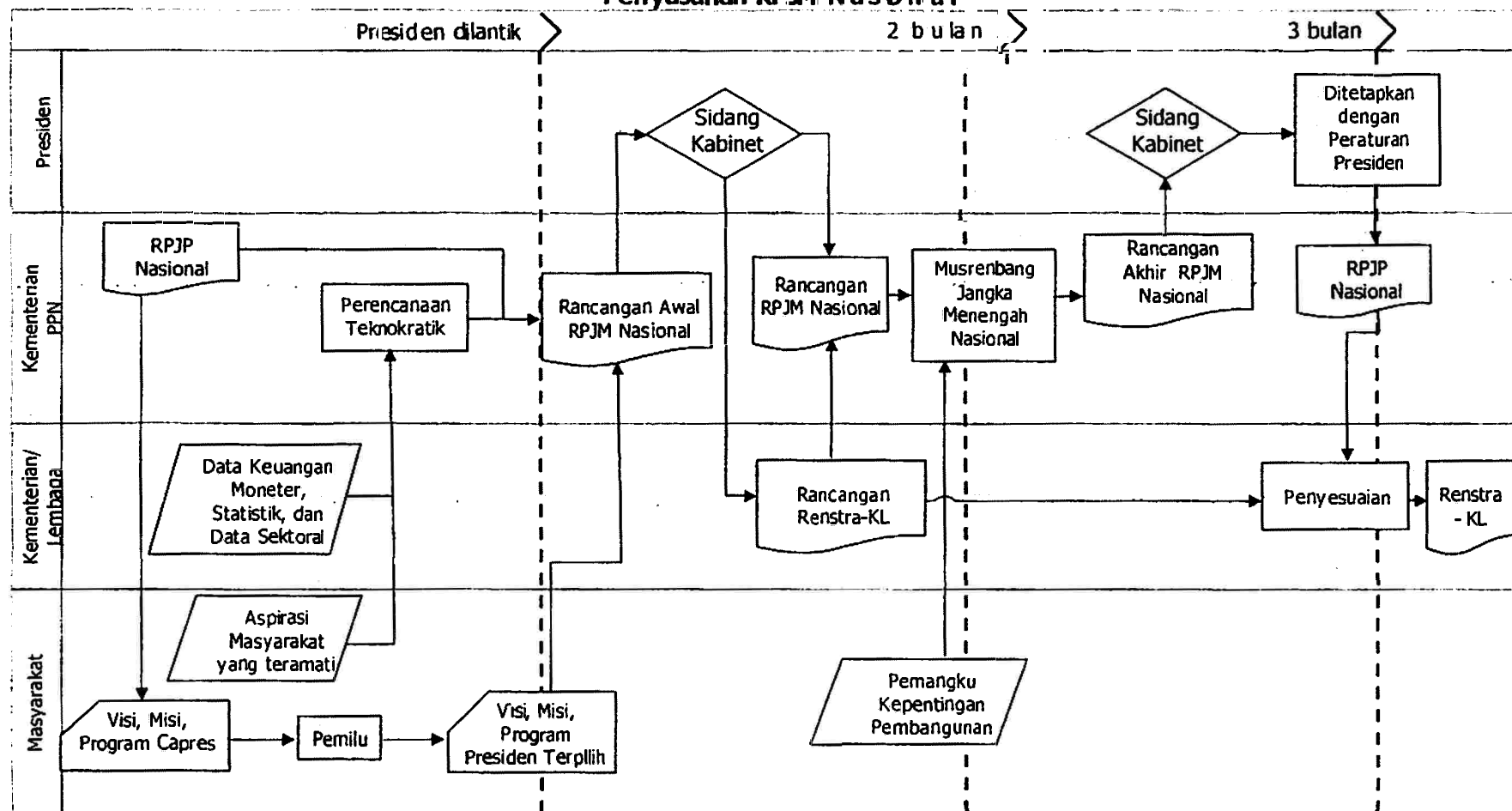
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD hingga musrenbang kabupaten.

Gambar 1.3. Penyusunan RPJP Nasional



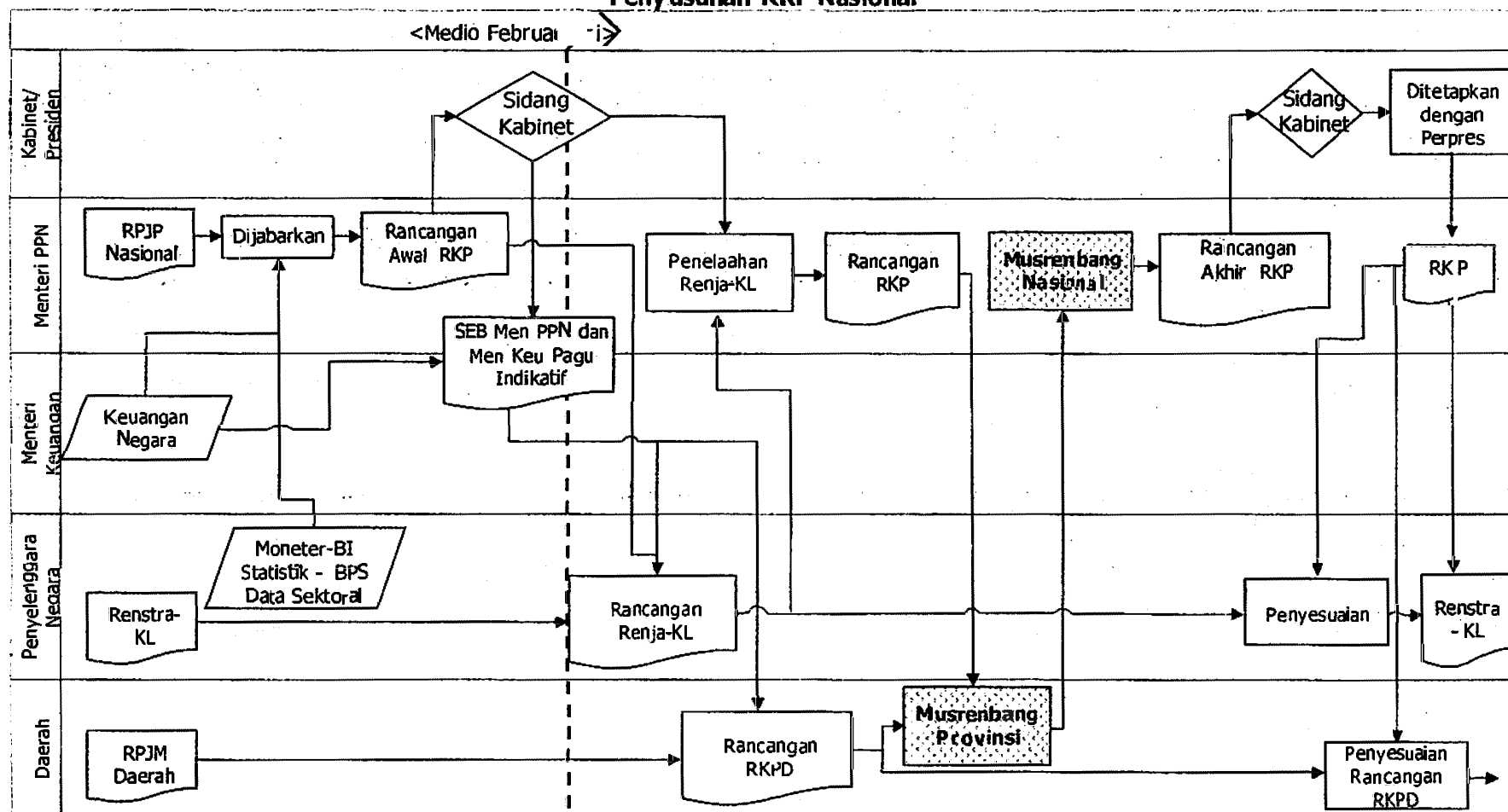
Sumber: Bappenas, 2004

Gambar 1.4
Penyusunan RPJM Nasional



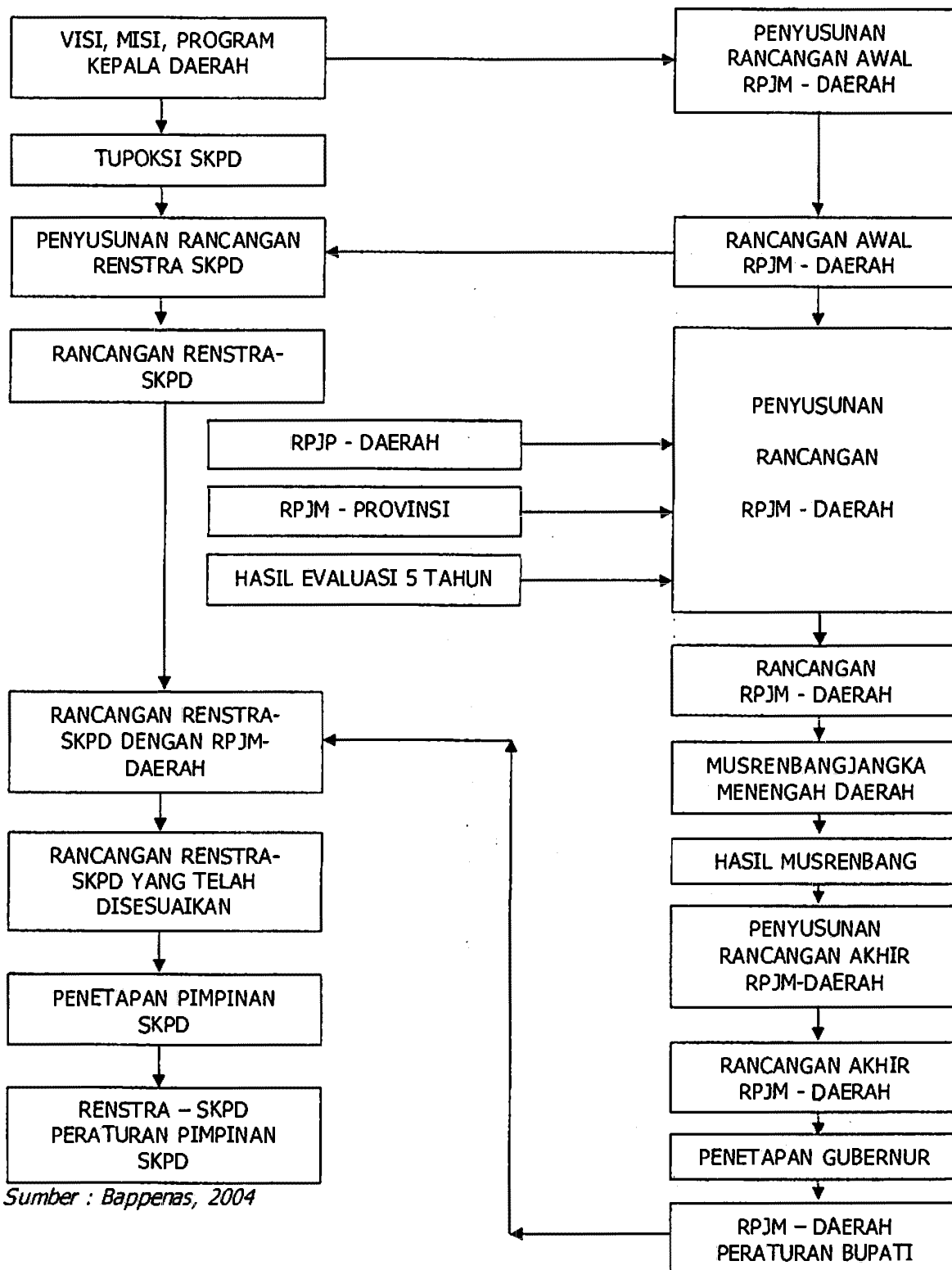
Sumber: Bappenas, 2004

Gambar 1.5
Penyusunan RKP Nasional



Sumber: Bappenas, 2004

Gambar 1.6
Penyusunan RPJM Daerah dan Renstra SKPD



Sumber : Bappenas, 2004

Tabel 1.1
Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen	Nasional	Daerah
RPJP (20 tahun)	Penjabaran tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945	RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional
RPJM (5 tahun)	Berpedoman pada RPJP Nasional	RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Renstra (5 tahun)	Renstra KL: Berpedoman pada RPJM Nasional	Renstra SKPD: Berpedoman pada RPJM Daerah
RKP (1 tahun)	RKP Nasional merupakan penjabaran dari RPJM Nasional	RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional
Renja (1 tahun)	Renja KL: Berpedoman pada Renstra –KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif	Renja-SKPD: Berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKP Daerah

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004

Tabel 1.2
Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen	Nasional	Daerah
RPJP (20 tahun)	Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: - Visi dan Penjabarannya; - Misi; - Arah Pembangunan Nasional: - Kewilayahan - Sarana-Prasarana - Bidang Kehidupan	Mengacu kepada RPJP Nasional, dan memuat: - Visi dan penjabarannya; - Misi; - Arah Pembangunan Daerah: - Kewilayaan - Sarana –Prasarana - Urusan Wajib - Urusan Pilihan
RPJM (5 tahun)	Penjabaran Visi, Misi, Program Presiden, berpedoman pada RPJM Nasional, dan memuat: - Strategi Pembangunan Nasional - Kebijakan Umum - Kerangka Ekonomi Makro - Program Kementrian, Lintas Kementrian, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran	Penjabaran Visi,Misi, Program Kepala Daerah, berpedoman pada RPJP Nasional dan memuat - Strategi Pembangunan Daerah - Kebijakan Umum - Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program-program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Renstra (5 tahun)	Renstra KL berpedoman pada RPJM Nasioanal dan memuat: Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga	Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengantugas dan fungsi SKPD
RKP	RKP Nasional merupakan	RKP Daerah merupakan

(1 tahun)	penjabaran RPJM Nasional, dan memuat: - Prioritas Pembangunan Nasional - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional - Arah Kebijakan Fiskal	penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP Nasional, dan memuat: - Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah
	- Program Kementrian/ Lembaga, Lintas Kementrian /Lembaga, Kewilayahan, dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran	- Arah Kebijakan Fiskal - Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, dan Lintas Kewilayahan yang Memuat kegiatan dalam Kerangka regulasi dan Kerangka anggaran
Renja (1 tahun)	Renja KL merupakan penjabaran dari Renstra KL, dan memuat: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra RKPD, dan memuat: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah PELAKSANAAN

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.2 Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Revisi RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.5.3 Tujuan

RPJMD disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan ke dalam program kegiatan yang terukur, terarah dan rinci serta dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan masajabatan kepala daerah;
2. Memberikan arahan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyusunan program kerja dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan 2013-2018;
3. Sebagai sarana tolak ukur kinerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kegiatan di setiap SKPD;
4. Sebagai landasan dalam mengevaluasi kinerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Mendorong terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi program kerja baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif demi menjaga kesinambungan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara;

7. Menjadi bahan optimalisasi kinerja pemerintah daerah serta sebagai dasar untuk menjaga sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Selain hal-hal tersebut diatas Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk menindak lanjuti hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LEV-608/PW18/3/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- b. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan beberapa OPD;
- c. Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
- d. Penyesuaian dengan Kebijakan nasional NAWA CITA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu Kabupaten di antara 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah ditetapkan dengan UU No. 9 tahun 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun batas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

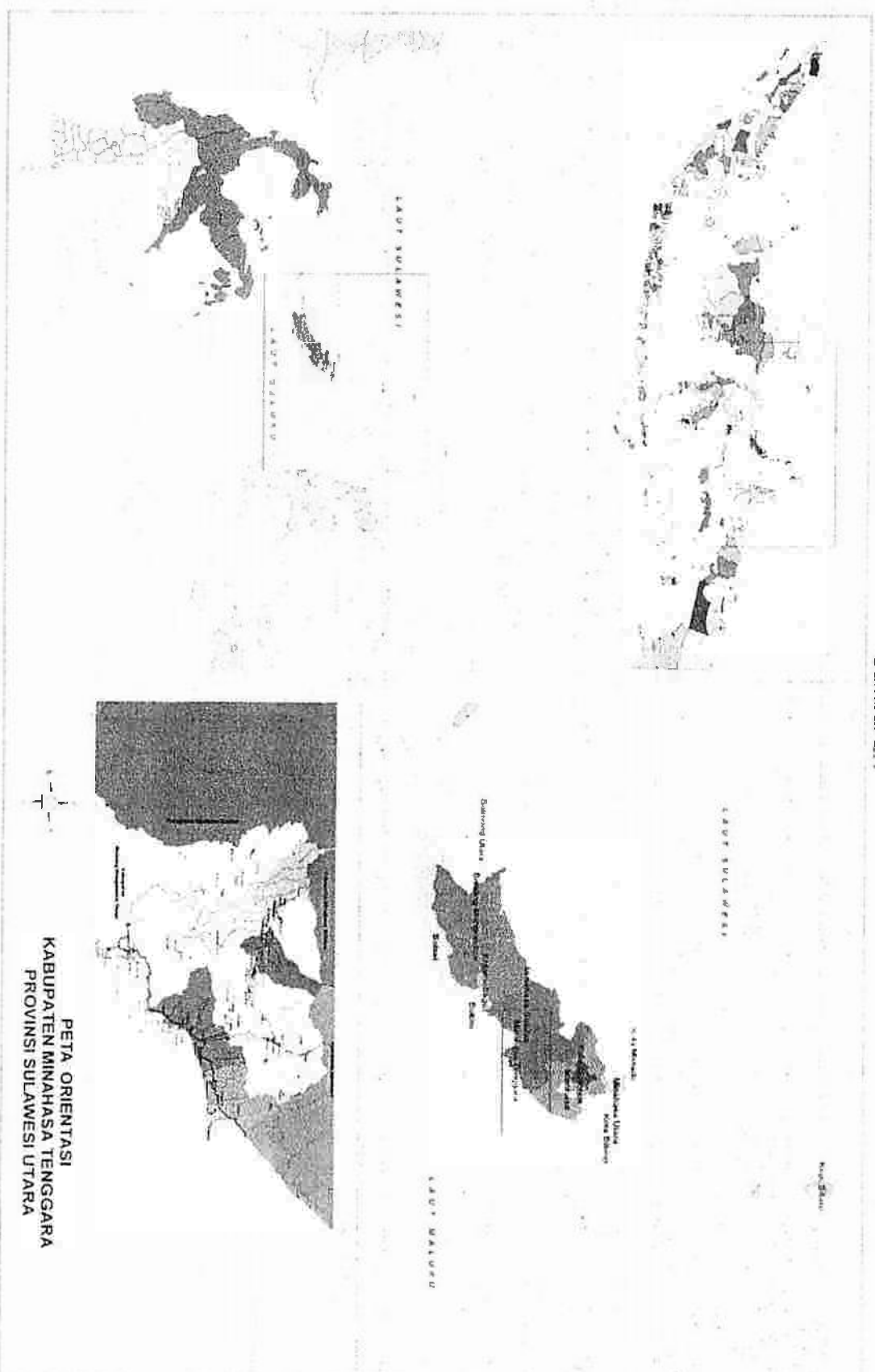
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

Secara Geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara:

124° 30'24" - 124° 56'24" BT

1°08'19"- 0°50'46" LU

Gambar 2.1



LUAS WILAYAH

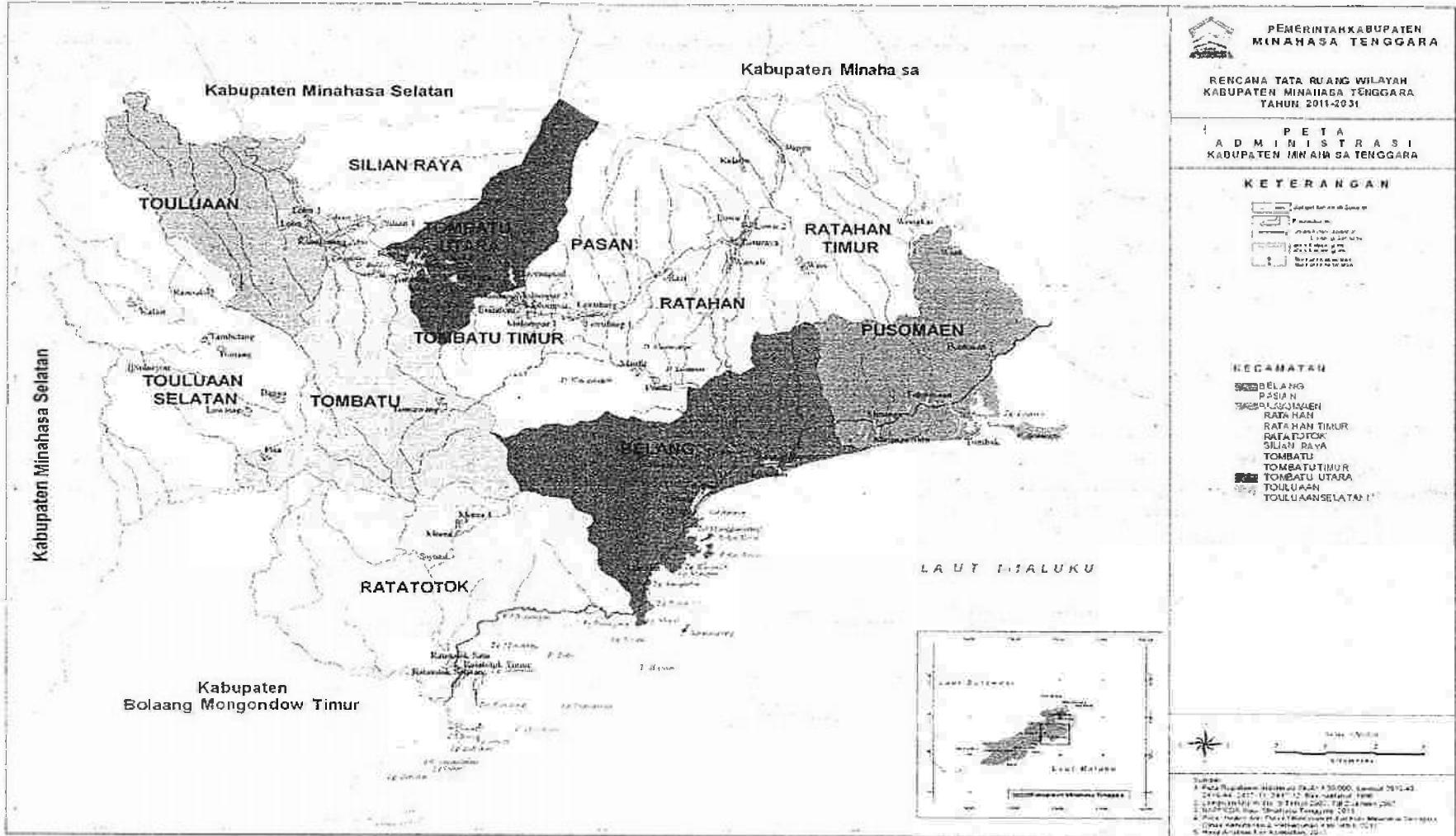
Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km2 atau 73.062 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha.

*Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif*

No	Kecamatan	Luas Wilayah Administratif (Ha)	Prosentase (%)
1.	Belang	7.517	10,28
2.	Pasan	4.979	6,81
3.	Pusomaen	5.362	7,34
4.	Ratahan	6.163	8,43
5.	Ratahan Timur	6.399	8,76
6.	Ratatotok	10.418	14,26
7.	Silian Raya	4.375	5,98
8.	Tombatu	6.795	9,30
9.	Tombatu Timur	1.881	2,55
10.	Tombatu Utara	3.717	5,08
11.	Touluaan	5.276	7,22
12.	Touluaan Selatan	10.180	13,93
Luas Total		73.062	100

Sumber: Mitra Dalam Angka 2015

Gambar 2.2



TOPOGRAFI

Topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1.780 m yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan serta Kabupaten Minahasa. Untuk ketinggian, wilayah Minahasa Tenggara memiliki ketinggian antara 0 m (Pantai Kec. Rataotok, Belang, Pusomaen) hingga ketinggian 1.750 m (lereng G. Soputan di Kec. Ratahan dan Kec.Silian Raya).

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Ketinggian

No	KELAS KETINGGIAN	Kec. Belang		Kec. Pusomaen		Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan		Kec. Rataotok		Kec. Tombatu, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu Timur, Kec. Silian Raya		Kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	0-25 mdpl	80438	0.96	-	-	-	-	49372	0.6	-	-	-	-
2	25-50 mdpl	890363	10.62	1440532	25.18	-	-	39537	4.8	-	-	-	-
3	50-100 mdpl	1586160	18.91	184116	32.19	13904	0.08	738464	9.1	-	-	-	-
4	100-200 mdpl	2361272	28.16	2256200	39.44	1854962	10.20	1051155	12.9	-	-	-	-
5	200-500 mdpl	2785448	33.21	182210	3.19	10565762	58.08	4245787	52.1	5538740	40.9	11379976	66.6
6	500-750 mdpl	682719	8.14	-	-	3134708	17.23	1525492	18.7	6140998	45.3	3551114	20.8
7	750-1000 mdpl	-	-	-	-	1790980	9.85	150260	1.8	1487561	11.0	1946983	11.4
8	1000-1500 mdpl	-	-	-	-	830490	4.57	-	-	327120	2.4	201327	1.2
9	> 1500 mdpl	-	-	-	-	-	-	-	-	52829	0.4	-	-
TOTAL LUAS WILAYAH		8,386.4	100	5,720.1	100	18,190.8	100	8,155.9	100	13,547.2	100	17,079.4	100
71.080 Ha													

Sumber: Analisis dari Peta RBI skala 1 : 50.000

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKAPENDANAAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

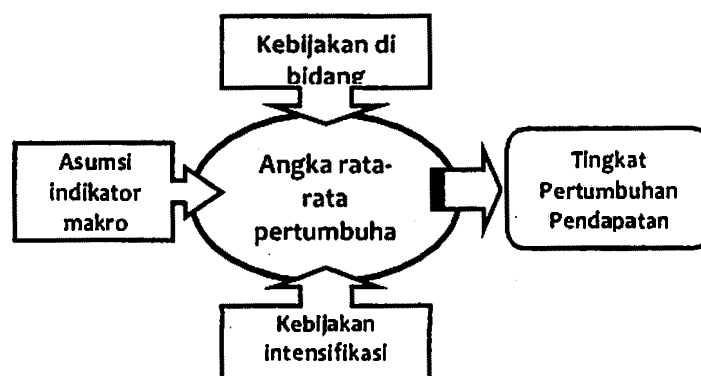
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).

Analisis pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Menganalisis pengelolaan Keuangan Daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari kerangka kebijakan daerah yang meliputi semua pengeluaran yang bersifat kewajiban dan akan menjadi pengeluaran kas daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka anggaran belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penetapan besarnya alokasi anggaran belanja didasarkan pada kemampuan anggaran pendapatan daerah serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan dalam bidang pendapatan daerah diarahkan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan Pendapatan Daerah sampai dengan 5% melalui upaya stabilisasi dan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Daerah, dan pendapatan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan belanja daerah dengan komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang proposional melalui upaya – upaya stabilisasi dan atau peningkatan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menggunakan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber – sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan Wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, terdiri dari pendapatan, belanja , dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan anggaran berbasis kinerja (performance budjeting atau activity base) yaitu berdasarkan pada prestasi kerja yang dicapai. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berdasarkan pendekatan kinerja, maka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan :

1. Aspirasi masyarakat
2. Pokok-pokok pemikiran, saran dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya
4. Perkembangan arah dan kebijakan ekonomi nasional, regional, dan kondisi perekonomian lokal
5. Potensi daerah yang dimiliki

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dengan peraturan daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2010-2014 digunakan sebagai dasar revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Guna mendapatkan gambaran lebih rinci tentang kondisi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Neraca Daerah

**Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2010 s/d Tahun 2014
Kabupaten Minahasa Tenggara**

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.430.161.779,00	4,939,432,502.11	4,810,733,088.00	5,360,000,000.00	10.643.177.821,96	1.30
1.1.1	Pajak daerah	860.341.888,00	1,342,371,293.00	1,477,499,938.00	1,935,000,000.00	2.087.754.094,00	1.26
1.1.2	Retribusi daerah	649.414.532,00	506.872.561.00	607.155.000.00	1,425,000,000.00	2.484.071.400,00	15.2
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	2.920.405.359,00	3,090,188,648.11	2,726,078,150.00	2,000,000,000.00	6.071.352.327,96	1.43
1.2	Dana Perimbangan	275.317.481.768,00	315.686,225,721.00	356.834,704,543.00	414,755,744,034.00	468.194.580.839,00	1.14
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	19.154.832.768,00	17,724,234,721.00	18,718,862,543.00	15,365,125,034.00	17.620.813.839,00	1
1.2.2	Dana alokasi umum	220.928.849.000,00	253,882,391,000.00	288,810,442,000.00	355,916,109,000.00	400.661.737.000,00	1.16
1.2.3	Dana alokasi khusus	35.233.800.000,00	44,079,600,000.00	49,305,400,000.00	43,474,510,000.00	49.912.030.000,00	1.10
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	68.629.373.689,27	89,391,898,929.00	21,226,014,520.00	42,766,366,112.00	71.304.330.651,00	1.31
1.3.1	Hibah	0	0	1,000,000,000.00	8,300,000,000.00	5.000.000.000,00	4.45
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan provinsi	6.134.426.592,00	8,700,589,902.00	8,061,685,468.00	6,600,000,000.00	12.818.893.493,00	1.28
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	12,111,938,000.00	26,366,366,112.00	51.872.457.000,00	2.07
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	80,691,309,027.00	52,391,052.00	1,500,000,000.00	0	14.32

Sumber: BPK BMD Kab. Mitra diolah

Dalam tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

- a) Pengkoordinasian dan pelibatan berbagai unit kerja yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdasarkan pada regulasi atau aturan perundangan yang berlaku, serta mengacu kepada rencana tindak yang jelas terukur;
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat terus menerus dan sungguh – sungguh serta kegiatan yang bersifat penggalian dan perluasan sumber – sumber pendapatan yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan berbagai pihak melalui pola kemitraan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan;
- c) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber – sumber dana perimbangan seperti pemungutan PBB, PPH pasal 21, dan BPHTB;
- d) Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan;
- e) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya peningkatan penerimaan Dana Perimbangan.

Anggaran daerah merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diwujudkan dalam bentuk uang (Rupiah) selama periode waktu tertentu (satu Tahun). Anggaran merupakan alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Memperhatikan dinamika pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu, yang menjadi latar belakang pertimbangan strategis adalah sebagai berikut :

- I. Menampung Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diperkirakan diantaranya mengalami penurunan dan yang lainnya melampaui target;
- II. Revisi kegiatan yang dianggarkan;
- III. Menampung adanya pergeseran dan pelampauan anggaran;
- IV. Memenuhi beberapa kewajiban yang belum tertampung untuk kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

*Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara*

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1	ASETLANCAR	
1.1.1.	Kas	(48,4)
1.1.2.	Piutang	(6,28)
1.1.3.	Persediaan	10,7
1.2	ASETTETAP	
1.2.1.	Tanah	61,54
1.2.2	Peralatan dan mesin	28,09
1.2.3.	Gedung dan bangunan	9,28
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	23,62
1.2.5.	Aset tetap lainnya	11,74
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	214,37
1.3	ASET LAINNYA	
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	100
	JUMLAH ASET DAERAH	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	23,89
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	(64,61)
3.1.2	Cadangan piutang	(17,32)
3.1.3	Cadangan persediaan	10,7
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	498,58
	Pendapatan yang ditangguhkan	81,79
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	29,39
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	389,9
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21,54

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Current ratio	5,40	1,20	2,65	4,13
2.	Quick ratio	5,29	1,16	2,59	4,02

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam disimpulkan hal– hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah Tahun 2014 yaitu sebesar 98,2 % dari target. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah sebesar 1,23%
- b. Belanja daerah direalisasikan sebesar 95,3% dari anggaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- c. Saldo Silpa di Tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penyerapan dana yang maksimal dan penyelesaian hutang pihak ketiga.
- d. Ditahun 2014 secara keseluruhan nilai aset mengalami peningkatan besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 599,052,528,332.28.
- e. Analisis tingkat likuiditas berdasarkan current ratio sebesar 4,13 yang artinya setiap 1 rupiah utang pemerintah daerah dapat dijamin dengan 4,13 rupiah aset daerah.
- f. Quick ratio sebesar 4,02 yang artinya apabila kewajiban jangka pendek akan segera dilunasi, maka tersedia kas sebesar Rp. 4,02 untuk setiap Rp. 1 utang pemerintah daerah.
- g. Kondisi tingkat likuiditas tersebut diatas menunjukan bahwa tingkat likuiditas tersebut sangat tinggi dan sangat cukup untuk melunasi utang jangka pendek dan tersedia cukup dana dari aset lancar.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan.

**Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Minahasa Tenggara**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2011	131.688.541.412,00	430.853.717.975,00	30,56%
2	Tahun anggaran 2012	143.709.221.844,00	406.754.612.272,00	33,35%
3	Tahun anggaran 2013	178.394.366.253,00	514.558.586.630,00	35,00%
4	Tahun anggaran 2014	205.622.448.128,00	550.506.761.554,00	37,00%

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan rentan berada di bawah garis kemiskinan masih sangat banyak;
2. Pemantapan Infrastuktur Dasar;
3. Ketersedian Energi listrik, BBM dan Jaringan Telekomunikasi;
4. Perluasan dan peningkatan ketahanan pangan;
5. Penciptaan Iklim dan Usaha investasi swasta;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga pendidik;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
8. Mengembangkan industri berbasis komoditas lokal;
9. Penanganan Tindak Pidana Kriminal (Konflik antar warga kampung narkoba,miras);
10. Pengembangan usaha produksi yang berbasis agropolitan dan minapolitan;
11. Peningkatan Industri berbasis lokal, UMKM dan Koperasi;
12. Pemantapan Destinasi Pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami;
13. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal untuk mengerjakan proyek-proyek fisik;
14. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
15. Rendahnya Kualitas Birokrasi
16. Strategi Penanganan Bencana dan Cuaca iklim ekstrim;
17. Tahun emas Provinsi Sulawesi Utara;

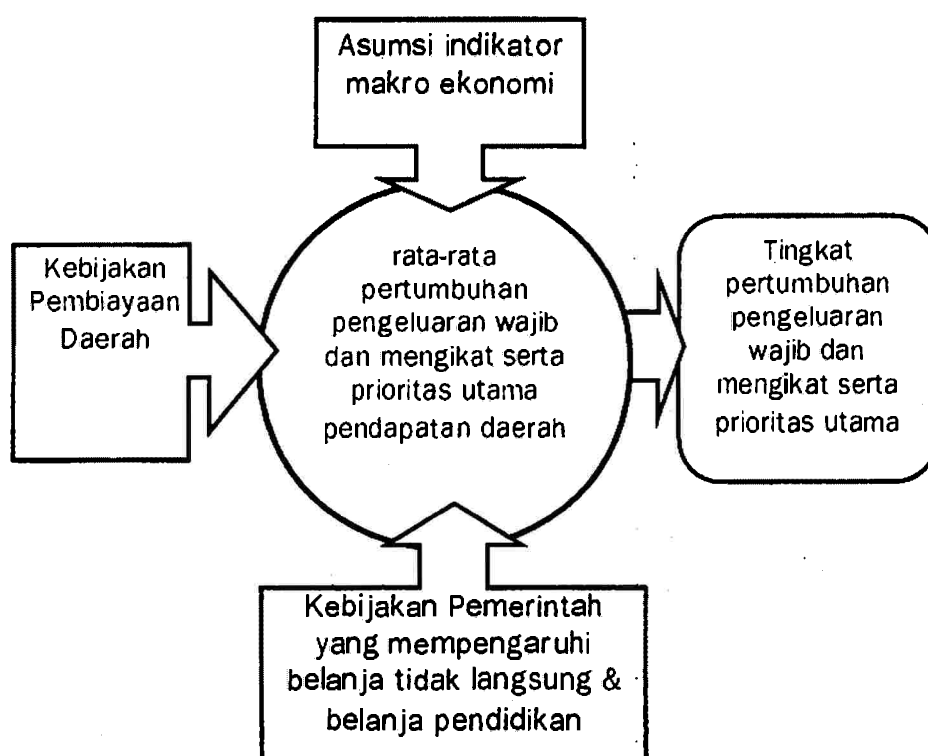
18. Sail Tomini;
19. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, maka prioritas belanja daerah diarahkan pada :

1. Pemantapan infrastruktur & fasilitas untuk peningkatan perekonomian rakyat yang inklusif;
2. Peningkatan dan Pemantapan akses pelayanan dasar (Pendidikan & Kesehatan);
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Perbaikan kinerja birokrasi & pemberantasan korupsi;
5. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya khususnya tenaga kerja lokal;
6. Penciptaan iklim investasi, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan ketahanan pangan;
8. Peningkatan dan pemantapan destinasi Pariwisata dan budaya lokal serta pelestarian lingkungan hidup;
9. Terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Analisis Proyeksi Belanja Daerah



Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana untuk Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dalam Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang direncanakan. Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2014.

Penerimaan Pembiayaan tersebut diperkirakan untuk menutupi Pengeluaran Pembiayaan berupa Hutang Kepada Pihak Ketiga seperti pembayaran uang jaminan pekerjaan proyek.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

1) Analisis pembiayaan daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui :

a. Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah.

Tabel 3.5 Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	465.993.124.023,00	550.142.089.311,96
	Dikurangi realisasi:		
2.	Belanja Daerah	442.697.400.843,00	514.588.586.630,00
3.	Defisit riil		
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:		
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	23.295.723.180,00	35.553.502.681,00

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

b. Analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Uraian	2013	2014	Rata-rata pertumbuhan
		Rp	Rp	
1.	Jumlah SILPA	23.295.723.180,00	35.553.502.681,00	1,53
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	6.192.844.595,00	25.723.502.681,96	3,22
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	17.102.878.585,00	9.830.000.000,00	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

c. Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.7 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Minahasa Tenggara

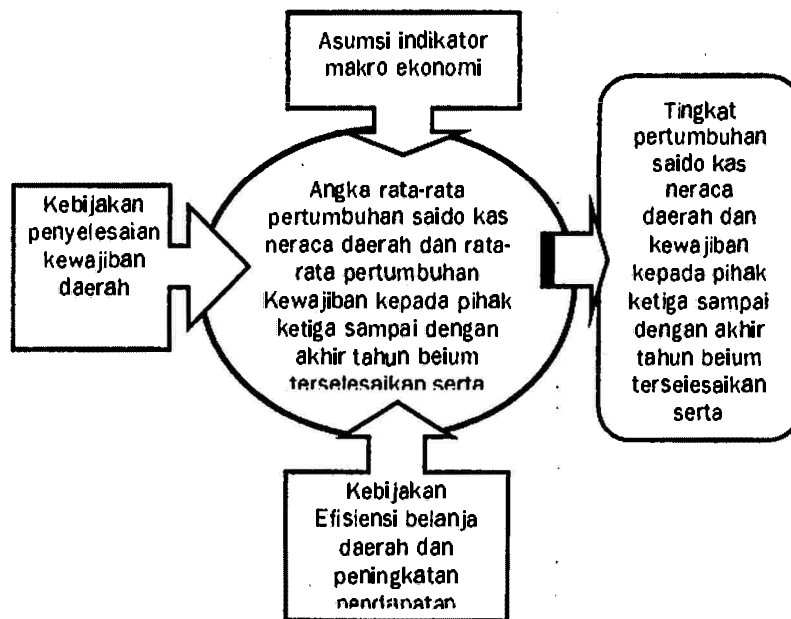
No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah Dikurangi :	23.295.723.180,00	35.553.502.681,00
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	17.102.878.585,00	9.830.000.000,00
3.	Kegiatan lanjutan	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	6.192.844.595,00	25.723.502.681,96

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

d. Analisis proyeksi pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (Lima) tahun kedepan.

Gambar 3.3 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



2) Analisis neraca daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- A. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- B. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain:

- a. Rasio total hutang terhadap total aset = $\text{total hutang} : \text{total aset}$
- b. Rasio hutang terhadap modal = $\text{total hutang} : \text{total ekuitas}$

- C. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	110.722.283.823,00	122.910.125.812,00	136.442.530.663,90	185.712.013.759,00	11,01
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	755.000.000,00	780.000.000,00	805.818.000,00	1.410.000.000,00	3,31
B	Belanja Langsung					
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	11.058.544.240,00	10.504.174.135,00	11.622.338.260,00	-	2,82
2	Belanja Beasiswa Pendidikan	400.000.000,00	7.448.000.000,00	8.448.000.000,00	-	887,71
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	7.205.003.349,00	7.891.037.197,00	8.642.263.938,15	1.305.617.742,00	9,52
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.846.260.000,00	1.415.884.700,00	1.085.841.976,43	8.000.000,00	(23,31)
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	101.450.000,00	208.000.000,00	-	-	105,3

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

3.1.2 Proyeksi Data Masa Lalu

a) Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	73,83%	85,82%	79,87%	88,76%
2	Belanja Bunga	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0,87%	0	0	0
4	Belanja Hibah	2,16%	3,44%	7,34%	1,63%
5	Belanja Bantuan Sosial	12,53%	0,86%	2,00%	0,85
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	9,61%	9,80%	8,42%	8,75%
8	Belanja Tidak Terduga	1,01%	0,08%	2,38%	0,01%

B	Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	7,05%	5,58%	5,37%	2,44%
2	Belanja Barang dan Jasa	30,68%	37,64%	40,66%	32,84%
3	Belanja Modal	62,27%	56,79%	53,96%	64,72%

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014

b) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur seperti tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Prosentase Kenaikan (%)
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	110.722.283.823,00	122.910.125.812,00	136.442.530.663,90	110.722.283.823,00	10
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	40.047.948.951,00	38.159.136.010,00	39.775.870.032,00	40.047.948.951,00	(5)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KOH/WKDH	755.000.000,00	780.000.000,00	805.818.000,00	755.000.000,00	3
8	Belanja Langsung					
1	Belanja Honorarium PNS**)	5.751.586.000,00	2.084.085.000,00	11.622.338.260,00	5.751.586.000,00	(176)
2	Belanja Uang Lembur**)	673.123.500,00	504.624.500,00		673.123.500,00	(33)
3	Belanja Beasiswa Pendidikan Tinggi	400.000.000,00	7.448.000.000,00	8.448.000.000,00	400.000.000,00	94
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1.240.000.000,00	2.746.347.832,00	5.289.784.792,00	1.240.000.000,00	54
6	Belanja makanan dan minuman	6.766.194.546,00	6.811.211.182,00	7.558.649.642,00	6.766.194.546,00	0,6
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	391.411.470,00	211.750.000,00	621.164.000,00	391.411.470,00	(84)
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	311.462.000,00	286.273.000,00	801.986.000,00	311.462.000,00	(87)
9	Belanja perjalanan dinas**)	21.834.441.400,00	18.745.564.930,00	20.742.744.930,00	21.834.441.400,00	(16)
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	140.498.657.642,00	124.643.234.789,00	112.001.895.595,00	140.498.657.642,00	(12)
	TOTAL					

Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

3.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- (1) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- (2) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- (3) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- (4) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan
- (5) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

BAB IV

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

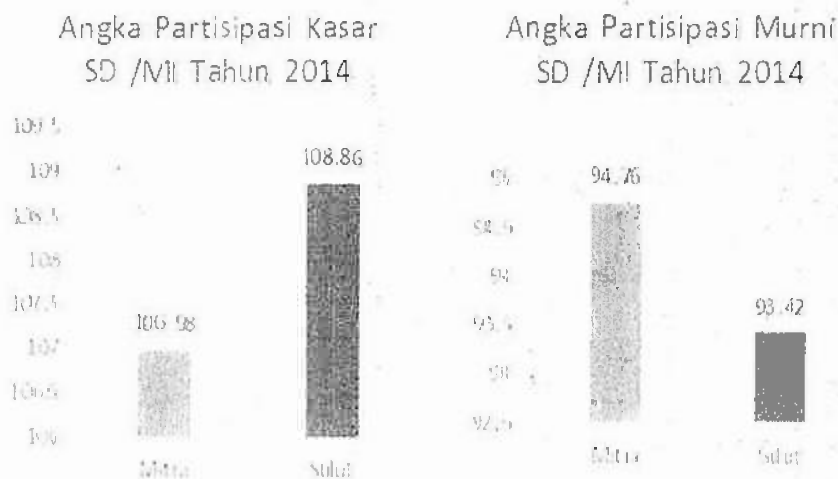
Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang tepat dan strategis berdasarkan prioritas pembangunan, yang dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara, isu strategis diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan berjangka panjang. Isu strategis di kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembangunan dan prioritas permasalahan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. SOSIAL BUDAYA

a. Pendidikan dan Keterampilan

Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong rendah. Menurut data Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulut tahun 2012, APK untuk SD/MI sebesar 97,12 dibandingkan dengan APK SD/MI Provinsi Sulut sebesar 116,7 dan APM untuk SD/MI sebesar 90,31 dibandingkan dengan APM SD/MI Provinsi Sulut sebesar 95,23.



Permasalahan lainnya di bidang pendidikan adalah masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011, Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 8,39, masih jauh dari Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,9 pada 2011 meskipun masih lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah nasional sebesar 7,9.

1. Belum adanya perguruan tinggi (kalaupun ada masih dalam bentuk kelas jauh).
2. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah masih terbatas.
3. Kompetensi pendidikan pegawai masih banyak yang belum sesuai.
4. Kurangnya sarana kursus keterampilan seperti Bahasa Inggris

b. Kesehatan dan Gizi

1. Tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar 34,2 % jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki nilai 34,1.

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2011	42	1648	25	975
2012	45	1813	25	975
2013	41	1875	22	978
2014	37	1778	21	979
2015*	21	661	32	968

2. Belum mulai beroperasinya RSUD
3. Belum semua Kecamatan memiliki Puskesmas rawat inap
4. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin masih belum optimal.
5. Kurangnya Tenaga Medis (khususnya bidan).
6. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat.
7. Belum berkembangnya program peningkatan gizi masyarakat.
8. Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal.
9. Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai berkurang, padahal kearifan lokal penting sebagai alternative pengobatan.

c. Kebudayaan

1. Terbatasnya pengetahuan generasi muda tentang kebudayaan lokal yang ada karena belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah.
2. Budaya mapalus yang mulai berkurang.
3. Meluasnya pengaruh perekonomian kota ke desa.

d. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

1. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan belum berkompeten.
2. Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.
3. Adanya peralihan mata pencaharian penduduk.

e. Pemuda dan Olahraga

1. Organisasi kepemudaan yang masih belum berkembang dengan baik.
2. Kurangnya pemuda-pemuda yang terampil.
3. Kurangnya sarana dan fasilitas olahraga.

f. Kemiskinan

Sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara, data statistik selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2008 sampai dengan 2010 angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara sangat tinggi mencapai 18,3 % ditahun 2008, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka 14,24 %, di tahun 2012 yakni 14,24% tahun 2013 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 16,10% dan tahun 2014 turun menjadi 15,84%. Walaupun mengalami penurunan ditahun 2014, namun dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada posisi tertinggi selama 2 (dua) tahun terakhir (2013-2014). Oleh karenanya masalah kemiskinan di kabupaten Minahasa Tenggara menjadi perhatian dan prioritas utama yang harus segera di tanggulangi dan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif, terarah, terpadu dan terintegrasi, tiga wilayah pesisir yakni kecamatan Ratatotok, Belang dan Posumaen sangat rentan terhadap kemiskinan diikuti oleh tiga kecamatan lainnya yakni Ratahan, Tombatu, Tombatu Timur dan Tombatu Utara



*Prosentase Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2007-2014
Sumber: Minahasa Tenggara Dalam Angka 2014*



Persentase jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Utara

g. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Terdapat masyarakat transmigrasi yang belum tertata dengan baik (lokasi dan fasilitas).
2. Masalah urbanisasi.

h. Pemberdayaan Perempuan

1. Kurangnya pemberdayaan pada kelompok wanita tani.
2. Kurang aktifnya organisasi perempuan.
3. Anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak belum memadai.
4. Pemilahan data belum dilakukan dalam rangka evaluasi.
5. Kualitas hidup perempuan masih perlu ditingkatkan.

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya perencanaan desa dalam mempersiapkan pengelolaan sumber daya pedesaan.
2. Permintaan kebutuhan desa dalam musrembang belum semua terpenuhi.
3. Pemberdayaan masyarakat belum optimal
4. Akses sumberdaya publik belum merata ke wilayah pedesaan seperti air bersih, listrik, sanitasi dan jalan usahatani masih terbatas.

j. Komunikasi dan Informatika

1. Belum semua daerah memiliki jaringan layanan telekomunikasi kabel, nirkabel, dan jaringan telekomunikasi satelit untuk daerah terpencil.
2. Infrastruktur dan aplikasi dasar belum mencapai semua wilayah, terutama di wilayah pelosok.
3. Aplikasi *e-government* yang *government to government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Customers* belum tersedia.
4. Jaringan dan fasilitas internet masih minim.
5. Asimetri informasi dalam pasar masih terjadi.

h. Pemerintahan Umum

1. Kualitas pelayanan publik oleh aparat pemerintah masih relatif rendah.
2. Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan yang masih belum memadai.
3. Masaiah batas wilayah dengan Bolaang Mongondow Timur
4. Masaiah batas wilayah antar kecamatan dan antar desa
5. Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat

4.1.2. EKONOMI

1. Pertanian

1. Masih ada petani yang berusaha tani dengan sistem monokultur.

2. Kurangnya pemahaman petani terhadap teknik pasca panen yang baik dan benar.
3. Usia Tanaman Perkebunan yang sudah tua.
4. Lahan pertanian yang semakin berkurang/mengecil karena warisan dan alih fungsi lahan.
5. Produksi dan Produktivitas pertanian teridentifikasi mengalami peningkatan yang semakin menurun.
6. Belum ditetapkan lahan pertanian yang tidak bisa dikonversi.
7. Belum ada peta kesesuaian lahan berdasarkan indikator usahatani per kecamatan.
8. Belum adanya asuransi produk pertanian.
9. Program Hilirisasi dalam konsep pembangunan MP3EI belum dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya untuk komoditi lokal.
10. Semakin berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian/perkebunan akibat alih profesi menjadi pekerja di kota dan daerah sekitarnya

2. Kehutanan

1. Terdapatnya pemukiman di sekitar kawasan hutan lindung.
2. Masih kurangnya pemahaman tentang hutan sosial dan hutan komunitas.
3. Masih terdapat kerusakan hutan.
4. Belum adanya identifikasi pemanfaatan pohon.
5. Masalah pemasaran hasil hutan.
6. Gerakan penanaman pohon perlu dioptimalkan..

3. Kelautan dan Perikanan

1. Pengolahan produk turunan perikanan yang terbatas.
2. Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan masih sulit.
3. Kurangnya sarana melaut bagi nelayan.
4. Belum berkembangnya pelabuhan perikanan.
5. Kewenangan Pemerintah Kabupaten diwilayah laut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

4. Perdagangan

1. Perdagangan komoditas pertanian , perkebunan dan perikanan yang belum optimal.
2. Belum optimalnya promosi produk kerajinan asli daerah
3. Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang

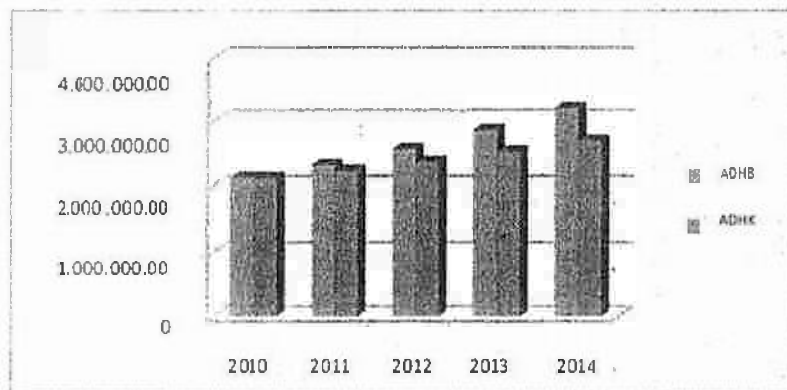
5. Perindustrian/Agroindustri

1. Belum berkembangnya agroindustri unggulan di Daerah.
2. Industri makanan belum optimal terutama dalam kemasan dan penampilan produk yang dihasilkan.

3. Pengusaha UMKM masih banyak yang belum memahami Cara Pengolahan Produk Yang Baik dan Benar.
 4. Industri pengolahan berbahan baku komoditi perkebunan masih kurang.
 5. Belum tersedianya industri perikanan untuk pengolahan hasil perikanan daerah.
- 6. Pariwisata**
1. Belum optimal pengembangan Objek wisata yang potensial.
 2. Belum terpetakan revitalisasi pengembangan pariwisata yang unik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
 3. Belum memadai sarana dan prasarana di kawasan wisata.
 4. Belum tersusun dokumen rencana induk pariwisata daerah.
 5. Minimnya promosi daerah wisata secara bersama dalam satu paket dengan kabupaten/kota lainnya.
 6. Belum tertata manajemen pengelolaan objek wisata.
- 7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
1. Masih belum berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 2. Masih kurangnya wirausaha muda.
 3. UMKM agroindustri belum berkembang.
 4. Belum ada koperasi khusus pertanian/agroindustri.
- 8. Penanaman Modal/Investasi**
1. Kurangnya investasi swasta di daerah.
 2. Kurangnya investasi asing di daerah.
 3. Belum optimalnya promosi investasi daerah.
 4. Masih kurangnya insentif pemerintah terhadap investor.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
1. Belum optimalnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi.
 2. Alokasi belanja dasar untuk memberi dukungan yang optimal terhadap pengembangan sektor unggulan daerah belum proposional
- 10. Produksi dan Indikator Makro dan Mikro Ekonomi Daerah**
1. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih relatif rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi maupun Kabupaten kota sekitar.
 2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.
 3. Tingkat pengangguran masih tinggi.
 4. Tingkat kemiskinan masih tinggi.

5. Produksi daerah cenderung meningkat dengan kuantitas yang semakin berkurang (PDRB atas dasar harga konstan cenderung menurun)
6. Jumlah Produksi dipengaruhi oleh harga produk, menurunnya harga akan berpengaruh terhadap nilai produk (PDRB atas dasar harga berlaku)

PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara
GRDP of Minahasa Tenggara Regency
 2010– 2014 (Tryliun Rupiah)



Sumber: Mitra Dalam Angka, 2015

11. Pertambangan dan Penggalian

1. Masih terdapat potensi pertambangan yang belum dimanfaatkan.
2. Terdapat Penambang tanpa izin yang bisa berpotensi terhadap degradasi lingkungan.
3. Belum terdapat pengusaha pertambangan lokal yang mampu melakukan dengan teknologi tinggi sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
4. Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian masih relatif rendah .

4.1.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Kurangnya SDM peneliti yang profesional dan kompeten untuk kegiatan penelitian dan pengembangan masih terbatas.
2. Aplikasi Iptek masih kurang dalam pembangunan daerah.
3. Kurang alokasi dana untuk kegiatan kelitbangan
4. Belum adanya OPD kelitbangan

4.1.4. INFRASTRUKTUR

1. Infrastruktur Ke-PU-an

- a. Meningkatnya kebutuhan perumahan khususnya di wilayah ibukota.
- b. Masih terdapat cukup banyak rumah tidak layak huni
- c. Belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sehingga menyulitkan pengelolaan persampahan.
- d. Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

- e. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
- f. Terdapat defisit imbalan air irigasi pada Daerah Irigasi (DI) di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- g. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di kabupaten, yaitu Wilayah Irigasi Lahendong dan Ranombolay yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- h. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
- i. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
- j. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.

KEADAAN	STATUS JALAN					
	JALAN NEGARA		JALAN PROPINSI		JALAN KAB/ KOTA*)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I KONDISI JALAN						
a. Baik	40.8	44.0	55.8	60.8	216.6	267.4
b. Sedang	2.2	1.1	7.5	6.1	43.0	43.0
c. Rusak	1.9	0.5	6.8	5.0	79.9	69.9
d. Rusak Berat	0.7	-	8.4	6.6	195.6	154.8
JUMLAH	45.6	45.6	78.5	78.5	535.1	535.1
II JENIS PERMUKAAN						
a. Diaspal	45.6	45.6	74.5	74.5	246.3	310.4
b. Kerikil			4.0	4.0	93.2	69.9
c. Tanah			-	-	195.6	154.8
d. Tidak dirinci						
JUMLAH	45.6	45.6	78.5	78.5	535.1	535.1
III KELAS JALAN						
a. Kelas I	45.6	45.6				
b. Kelas II			78.5	78.5		
c. Kelas III					160.8	160.8
d. Kelas III A					91.5	91.5
e. Kelas III B					102.3	102.3
f. Kelas III C					180.5	180.5
g. Kelas tidak dirinci						
JUMLAH	45.6	45.6	78.5	78.5	535.1	535.1

Panjang Jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kondisi jalan, jenis permukaan dan kelas jalan. Sumber: Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015

NO	URAIAN	PERSENTASE (%)
	Persentase Akses Air Bersih	72,41
	Persentase Akses Pelayanan Persampahan	7,8
	Persentase Akses Sanitasi/Jamban	90,89

*Persentase Akses Air Bersih, Persampahan dan Sanitasi
Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2014
Sumber: Bappeda Kab. Minahasa Tenggara (Diolah)*

2. Perhubungan

- Belum tersedianya perencanaan tatanan transportasi lokal (Masterplan Tatralok).
- Belum tersedianya terminal tipe A, tipe B dan tipe C.
- Perhubungan laut belum dimanfaatkan untuk menghubungkan antar daerah.
- Belum ada pelabuhan laut yang memadai untuk angkutan penumpang dan barang.
- Jalan dan jembatan masih ada yang belum diperbaiki.
- Minimnya jalan-jalan alternatif.
- Terdapat beberapa jalan yang rawan longsor.
- Perlunya peningkatan dan perbaikan ruas jalan baik jalan kolektor primer k1, k2, k3, jalan kolektor sekunder dan jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan, perkebunan dan ke lokasi wisata.
- Kurangnya sosialisasi rencana jaringan transportasi kereta api yang melalui Kabupaten Minahasa Tenggara dan pembangunan stasiun kereta api.

3. Energi

- Pasokan daya listrik masih kurang.
- Belum memanfaatkan energi alternatif, seperti tenaga hidro, tenaga surya dan energi terbarukan lainnya.

4. Air Bersih

- Belum optimalnya pelayanan PDAM.
- Masih ada masyarakat yang belum menikmati fasilitas PDAM.
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku.

4.1.5. GEOMORFOLOGIS, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Masih terdapat perbedaan kemajuan antar daerah di pegunungan dan dipesisir pantai.
- Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola ruang.
- Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan lingkungan yang nyaman.
- Belum terkelolanya limbah domestik dengan baik.

5. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.
6. Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
7. Sistem jaringan persampahan yang belum memadai.
8. Belum tersedianya jalur evakuasi bencana.
9. Belum tersosialisasi dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan hidup.
10. Belum terpetakan Daerah-daerah rawan bencana.

4.1.6. POLITIK

1. Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan yang ada.
2. Rendahnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat.
3. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal belum baik.

4.1.7. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, sehingga menjadi korban maupun pelanggar hukum.

4.1.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman berakohol secara berlebihan yang sering mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Masyarakat dalam penggunaan fasilitas umum belum tertib.

4.1.9. APARATUR

1. Kurangnya jumlah ASN di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Kualitas SDM aparatur daerah masih relatif rendah.
3. Distribusi ASN belum merata sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.
4. Etos kerja ASN masih sangat rendah

4.1.10. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

a. Penataan Ruang

1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian yang memadai.
2. Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang terkini belum optimal dilakukan.
3. Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.

b. Wilayah Rawan Bencana

1. Banyak terdapat wilayah yang rawan banjir dan longsor.
2. Terdapat daerah/wilayah yang dekat dengan gunung berapi, yang berbahaya bagi kesehatan dan lahan pertanian.

c. Pertanahan

1. Masih terdapat tanah yang belum disertifikasi.
2. Masih terdapat sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda

d. Wilayah Perbatasan

1. Belum terkoordinasi pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan.
2. Sinkronisasi kegiatan di wilayah perbatasan belum dilakukan.
3. Masih terdapat permasalahan penetapan batas wilayah dengan daerah sekitar, terutama dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Belum ditetapkannya batas wilayah antar kecamatan dan antar desa.

e. Perencanaan Pembangunan

1. Masih rendahnya kualitas kerja dan tanggungjawab kerja aparatur perencanaan
2. Kurangnya Sumberdaya Manusia aparatur perencanaan
3. Belum ada *roadmap* yang terintegrasi untuk pengembangan sektor-sektor unggulan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program SKPD belum terbangun dengan baik.

4.1.11. PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL'S (MDG's)

Dari 8 (delapan) tujuan *Millenium Development Goal's (MDG's)* di Kabupaten Minahasa Tenggara, realisasi capaian hingga triwulan ketiga tahun 2014 dapat dikatakan bahwa tujuan MDG's yang berkaitan langsung dengan permasalahan kesehatan secara umum telah tercapai walaupun masih ada beberapa target yang perlu kerja keras untuk mencapai tujuan MDG's. Di lain pihak, tujuan MDG's yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan masih perlu kerja keras, karena hingga triwulan ketiga tahun 2014 masih banyak target yang belum tercapai, bahkan belum memiliki data yang akurat dan up to date. Begitu pula dengan masalah penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan lingkungan hidup, Kabupaten Minahasa Tenggara perlu kerja keras untuk mencapai tujuan MDG's.

4.2. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.2.1. Kekuatan (Strength)

- a) Letak Kabupaten Minahasa Tenggara yang bersinggungan langsung dengan Kawasan Andalan Laut Batutoli
- b) Dilintasi oleh Kawasan Strategis Provinsi, yakni Kawasan Pantai Selatan (PANSELA)
- c) Rencananya akan dilintasi oleh Jalur Kereta Api Manado – Makassar
- d) Memiliki Potensi Perikanan Tangkap yang sangat besar
- e) Angka Melek Huruf yang cukup tinggi

- f) Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang cukup tinggi
- g) Fasilitas Pendidikan yang telah tersebar di seluruh Kecamatan
- h) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah tersedia di seluruh Kecamatan
- i) Jaringan Jalan dalam kondisi mantap sudah cukup memadai
- j) Keamanan wilayah yang cukup kondusif
- k) Potensi Pertanian (Padi dan Jagung) serta Perkebunan (Kelapa) yang cukup besar
- l) Telah tersedia Pasar yang representatif
- m) Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sedang dibangun
- n) Potensi pariwisata bahari yang cukup besar
- o) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

4.2.2. Kelemahan (Weakness)

- a) Tingkat Kemiskinan masih tinggi.
- b) Angka Kematian Bayi yang cukup tinggi
- c) Belum adanya Terminal dan pelabuhan yang representatif
- d) Masih kurangnya lembaga pembiayaan (baik Bank maupun non-Bank) yang beroperasi di Minahasa Tenggara
- e) Terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan.
- f) Fasilitas Air Bersih yang masih belum memadai
- g) Minat masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah
- h) Jumlah PNS/ASN, Guru dan dokter, bidan serta tenaga fungsional umum lainnya yang masih kurang
- i) Beberapa wilayah masih terkendala dengan sarana dan prasarana transportasi
- j) Kualitas ASN masih sangat rendah
- k) Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha
- l) Kurangnya minat untuk berinvestasi di Minahasa Tenggara
- m) Lemahnya prestasi bidang kepemudaan, olahraga, seni serta budaya
- n) Kurangnya fasilitas perpustakaan bagi masyarakat
- o) Lemahnya manajemen data, statistik serta kelitbangan
- p) Kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan
- q) Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah
- r) IPM yang masih relatif rendah
- s) Lemahnya mitigasi dan antisipasi terhadap bencana alam
- t) Masih lemahnya penataan lingkungan yang bersih dan sehat
- u) Kurangnya minat masyarakat dalam kewirausaha.
- v) Infrastruktur di daerah terpencil/pedalaman yang masih perlu ditingkatkan.

4.2.3. Peluang (Opportunity)

- a) Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam berinovasi
- b) Adanya kerjasama pengembangan Teluk Tomini antara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang antara lain mencakup wilayah Minahasa Tenggara
- c) Adanya KEK Bitung yang diharapkan mampu memicu pengembangan industri perikanan di wilayah pesisir
- d) Adanya rencana pembangunan jalur Kereta Api Manado-Makassar yang akan melewati Kabupaten Minahasa Tenggara.
- e) Potensi usaha, terutama di bidang Pertanian, perkebunan, perikanan serta pariwisata bahari yang cukup besar
- f) Masih terbukanya potensi penerimaan daerah dari sektor, pemanfaatan sumber daya alam, pertambangan batuan dll
- g) Potensi pengembangan UMKM yang sangat besar
- h) Semakin berkembangnya kegiatan usaha pelayanan jasa yang dapat menyerap tenaga kerja
- i) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana publik.

4.2.4. Ancaman (Threat)

- a) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- b) Perlambatan ekonomi global, yang berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat serta peningkatan harga barang
- c) Laju inflasi yang sulit diprediksi
- d) Peningkatan resiko bencana alam, baik berupa bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus maupun bencana gelombang pasang/tsunami.
- e) Degradasi kualitas lingkungan akibat aktifitas manusia
- f) Wabah penyakit, khususnya penyakit endemik, seperti DBD, Malaria, Rabies dll.
- g) Kurangnya sumber energi, terutama energi baru dan terbarukan
- h) Alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi non-pertanian
- i) Semakin berkurangnya minat bagi generasi muda dalam melestarikan budaya lokal
- j) Derasnya pengaruh luar yang masuk, terutama pengaruh negatif, yang mampu merubah perilaku masyarakat, khususnya generasi muda.
- k) Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi
- l) Ancaman konflik horisontal akibat dinamika dalam masyarakat
- m) Ancaman terorisme.

4.3. ANALISIS ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan pembangunan jangka menengah yang teridentifikasi, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang paling prioritas akan dijadikan dasar bagi proses penyusunan visi dan misi. Isu strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara, mengacu pada target-target dalam beberapa dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi Sulawesi Utara. Dokumen nasional yang menjadi acuan adalah Dokumen Perencanaan RPJPN 2005-2025, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 dan Dokumen Sistem Logistik Nasional, yang dalam perencanaan disesuaikan dengan dokumen perencanaan wilayah yakni RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara. Serta terbanggunya konektivitas dalam pelaku pembangunan kabupaten Minahasa Tenggara.

Isu strategis yang telah diprioritaskan akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun. Isu strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi,
2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin luas
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah khususnya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia,

Untuk mengetahui gambaran tentang isu-isu strategis di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama adalah Reformasi Birokrasi. Penataan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga ke jajaran top birokrasi. Penataan dilakukan untuk menitikberatkan pada penempatan personil dalam jabatan yang berpatokan pada kompetensi, integritas, jenjang karir serta telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sehingga tidak ada *like* dan *dislike* dalam penempatan pejabat.

Reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara jalannya pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan. Kualitas hasil kerja dan tanggung jawab kerja Aparatur Sipil Negara di Minahasa Tenggara masih sangat rendah. Perlu revolusi mental agar dapat melahirkan ASN yang profesional dan penuh tanggung jawab kerja. Dilain pihak, distribusi aparatur pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga tidak tercipta penumpukan jumlah PNS pada suatu unit organisasi sedangkan unit organisasi lainnya mengalami kekurangan tenaga PNS.

Disamping itu penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga ke jajaran top birokrasi. Penataan dilakukan dengan menitikberatkan pada penempatan personil dalam jabatan yang berpatokan pada kompetensi, integritas, jenjang karir serta telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sehingga tidak ada lagi *like* dan *dislike* dalam penempatan pejabat. Sistem Pengelolaan Keuangan yang saat ini masih terus dalam pembenahan untuk menciptakan sistem keuangan yang tertib dan akuntabel

Kabupaten Minahasa Tenggara telah 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2012 memperoleh opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut urusan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara kurang baik. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dimasa yang akan datang Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara, karena pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik akan sangat berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Minahasa Tenggara akan sulit bergerak maju jika fiskal daerah tidak terjaga dengan baik dan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Kedua adalah Percepatan penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah yang kaya akan sumberdaya alam. Potensi pertanian, perikanan dan perikanan dan pertambangan adalah anugrah Tuhan yang begitu besar bagi masyarakat Minahasa Tenggara. Namun kenyataan berkata lain bahwa masyarakat dan pemerintah daerah harus menerima dengan lapang dada predikat sebagai daerah termiskin dalam beberapa tahun terakhir. Data kantor statistik Minahasa Selatan mempublikasikan kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 berada pada angka 16,10 % di tahun 2014 menjadi 15,84 %. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Minahasa Tenggara berada pada angka tertinggi yaitu 17,70%. Berdasarkan data tersebut, dari 15 Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara kabupaten Minahasa Tenggara berada pada angka kemiskinan tertinggi. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang besar dari semua komponen masyarakat Minahasa Tenggara untuk bersama-sama bekerja keras merubah etos dan budaya kerja menjadi lebih berkualitas. Oleh karenanya sejak tiga tahun terakhir (2014 -2016) isu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2017. Isu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penanggulangan kemiskinan lebih dipertajam lagi dan dilaksanakan lebih terintegrasi dan holistik.

Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) akan dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran

Ketiga adalah Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin berkualitas

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Minahasa Tenggara sebesar 8,39 tahun pada tahun 2010 dan 2011, tahun 2012 menjadi 8,50, tahun 2013 menjadi 8,60, tahun 2014 menjadi 8,70. Angka Melek Huruf pada tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari 99,48% menjadi 99,68%. dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 99,72% dengan menggunakan metode terbaru, angka harapan hidup Penduduk Minahasa Tenggara tahun 2014 mencapai 69 tahun.

Sektor kesehatan juga perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Angka Harapan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2012 adalah 70,16 tahun, masih jauh di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebesar 74,9 tahun (2010) dan Angka Harapan Hidup Nasional sebesar 70,9 tahun (2010). Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi di Minahasa Tenggara dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2011 berjumlah 2 kasus, tahun 2012 menjadi 3 kasus dan tahun 2013 meningkat menjadi 6 kasus, dan pada tahun 2014 turun menjadi 3 kasus Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi tahun 2011 sebanyak 51 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 47 kasus, pada tahun 2013 meningkat menjadi 52 kasus, dan pada tahun 2014 turun menjadi 15 kasus. Pada Tahun 2014 ada sebanyak 17 kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis. Tahun 2014 masih terdapat 0.80 % bayi yang mengalami berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kondisi ibu hamil yang kurang asupan gizi. Memperhatikan kondisi tersebut maka pemerintah daerah terus berupaya membangun dan menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat.

Keempat adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara didominasi oleh sektor pertanian, yang mencakup 28,34 % dari seluruh sektor pendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Minahasa Tenggara masih bergantung dari sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam menopang kegiatan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini tidak hanya dengan kegiatan revitalisasi kegiatan pertanian, namun juga revitalisasi sektor penunjang kegiatan pertanian agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar lokal, regional maupun global.

Sektor lainnya seperti perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan serta industri pendukung juga perlu mendapat perhatian pemerintah dalam menunjang perekonomian daerah. Disamping itu, optimalisasi pengelolaan sumber-sumber potensial sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk sektor pariwisata, perlu dikembangkan mengingat Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki sumber daya potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara baik demi menunjang taraf hidup masyarakat disekitarnya.

Kelima adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Berdasarkan data, pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten yang rusak adalah 169,3 Km, sedang dan dalam kondisi baik 365 km. Jalan kondisi yang masih kurang mantap sebesar 10,6 km. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, mutlak diperlukan terutama dalam membuka dan memperluas akses ke daerah pedalaman, perbatasan serta sentra-sentra ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih serta sanitasi permukiman yang menjangkau hingga pelosok wilayah kabupaten mutlak diperlukan untuk mempermudah pelayanan dan akses terhadap wilayah-wilayah terisolir, pedalaman, perbatasan serta wilayah lainnya.

Keenam adalah Pelestarian Lingkungan Hidup. Isu ini lebih ditekankan pada perlunya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, rehabilitasi kawasan hutan bakau serta terumbu karang yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini penting mengingat Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah rawan bencana, khususnya bencana gunung api, banjir, tanah longsor serta gelombang pasang. Disamping itu, percepatan penetapan perda tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara beserta rencana rincinya harus dilakukan agar seluruh kegiatan pembangunan di Minahasa Tenggara ke depan harus mengacu pada dokumen rencana tata ruang yang ada, termasuk di dalamnya penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif dan layak. Olehkarenanya pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Ketujuh adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia. Secara faktual berdasarkan data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Minahasa Tenggara terus mengalami kenaikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 65,66 (2010), 66,07 (2011), 67,10 (2012), 67,64 (2013), 67,86 (2014). Akan tetapi, secara peringkat Kabupaten Minahasa

Tenggara masih relatif tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara, yakni peringkat 8 diantara 15 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara

BABV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Periode pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang termuat pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 masuk dalam tahapan kedua dan ketiga dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 yakni Tahap Pemantapan dan Tahap Percepatan (akselerasi). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018 berusaha mengakomodir tidak hanya penyelesaian isu-isu strategis yang bersifat lokal, namun juga isu-isu yang sifatnya regional, nasional bahkan global, yakni reformasi birokrasi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah searah dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018, yakni:

“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 yang disebut juga dengan 5 (lima) sukses adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani (**Sukses Pemerintahan**);
- b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (**Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**);
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (**Sukses Perekonomian**);
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (**Sukses Pembangunan**);
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (**Sukses Lingkungan Hidup**).

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama:** Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani (**Sukses Pemerintahan**)

Tujuan:

- a) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis
- c) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.
- d) Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima.

Sasaran:

- a. Tersedianya Standard Operasional dan Prosedur setiap SKPD dalam penyelenggaraan tupoksi
- b. Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting
- d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- e. meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal
- f. Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan
- g. terbangunnya pola kerja ASN yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- i. tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat
- j. Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat
- k. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.

2. **Misi Kedua:** Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (**Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**);

Tujuan:

- a) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
- b) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
- c) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d) Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan MDGs dan SDGs.
- e) Memberdayakan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat
- f) Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan.
- g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan
- h) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas
- i) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- j) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja
- k) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PMKS melalui aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PMKS
- l) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- m) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- n) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- o) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Sasaran:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai
- b. Angka melek huruf (AMH) mencapai **99,99%** pada tahun 2018;
- c. **Rata-rata lama sekolah** siswa mencapai **12 tahun** pada tahun 2018;
- d. Meningkatnya IPM Kabupaten Minahasa Tenggara;
- e. Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi;
- f. Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat.

- g. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
- h. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
- i. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- j. Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)
- k. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.
- l. Terwujudnya Pengembangan teknologi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
- m. Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan.
- n. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di Desa terpencil.
- o. Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
- p. Terbangunnya infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang representatif.
- q. Terwujudnya Kabupaten Sehat.
- r. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- s. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan meningkatnya penempatan tenaga kerja
- t. Memberikan dukungan, perlindungan dan layanan bagi PMKS baik kelompok rentan dan kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial
- u. Meningkatkan Kepercayaan diri dan Kemampuan serta kemauan dari PMKS untuk dapat berusaha.
- v. Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
- w. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- x. Terlaksananya Pembangunan secara Top Down dan Bottom Up
- y. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. (**Sukses Perekonomian**)

Tujuan:

- a) Menciptakan perekonomian Minahasa Tenggara yang handal.
- b) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi bahari.
- c) Meningkatkan perekonomian berbasis pertanian dan perkebunan utamanya kelapa.
- d) Meningkatkan perekonomian berbasis pariwisata.

- e) Menciptakan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

- a. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
- b. Terjaganya stabilitas harga.
- c. Terwujudnya kedaulatan pangan.
- d. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
- e. Meningkatnya produksi budidaya perikanan.
- f. Meningkatnya produksi Kelapa.
- g. Meningkatnya pendapatan petani.
- h. Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa.
- i. Ditetapkannya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- j. Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.
- k. Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- l. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru.

- 4. **Misi Keempat:** Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir. (**Sukses Pembangunan**)

Tujuan:

- a) Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan
- b) Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa
- c) Meningkatkan fungsi prasaranaa dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan
- d) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahsa Tenggara.
- e) Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air
- f) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat.
- g) Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan
- h) Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

- i) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah.
- j) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas.
- k) Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas guna mendukung perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat.
- l) Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
- m) Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat dan komunikasi pembangunan.
- n) Meningkatkan pengelolaan, pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat.
- o) Meningkatkan cakupan pelayanan energi listrik.
- p) Mewujudkan pengelolaan potensi geologi, sumber daya mineral dan air tanah yang terkendali dan berkelanjutan.
- q) Meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
- r) Membangun Sanitasi Permukiman yang baik dan layak.
- s) Menyediakan Areal Pemakaman bagi masyarakat.

Sasaran:

- a. Terbangunnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
- b. Tersedianya sistem jaringan irigasi dan rawa.
- c. Tersedianya ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air.
- d. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
- e. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
- g. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase.
- h. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan.
- i. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan.
- j. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa.
- k. Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya.
- l. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir.

- m. Terbangunnya pengembangan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang sehat.
 - n. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat.
 - o. Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan.
 - p. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif.
 - q. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah.
 - r. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas.
 - s. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal.
 - t. Terbentuknya regulasi bidang kelaikan moda transportasi.
 - u. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman.
 - v. Terbentuknya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi dan komunikasi.
 - w. Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien.
 - x. Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi yang efektif sampai ke daerah pelosok.
 - y. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
 - z. Terciptanya penataan kawasan pertambangan galian C.
 - aa. Meningkatnya cakupan pelayanan energi listrik.
 - bb. Semakin tersedianya energi listrik serta energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten.
 - cc. Tersedianya data dan informasi geologi, sumber daya Mineral dan air tanah yang *up-to-date*.
 - dd. Terlaksananya pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2018.
 - ee. Tersedianya areal pemakaman.
5. **Misi Kelima:** Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana. (*Sukses Lingkungan Hidup*)
- Tujuan:**
- a) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri
 - b) Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari
 - c) Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana

Sasaran:

- a. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan.
- c. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.
- d. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.
- e. Berkurangnya beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
- f. Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten.
- g. Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.
- h. Terehabilitasinya area hutan mangrove.
- i. Terlaksananya masa tanggap darurat bencana.
- j. Tersedianya data pengolahan logistic.
- k. Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.
- l. Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- m. Terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana.

Tabel 5.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013- 2018

VISI : Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian

Misi 1	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani.	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedianya Standard Operasional dan Prosedur setiap SKPD dalam penyelenggaraan tupoksi
		Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
		meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal
	Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis	Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan
	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	terbangunnya pola kerja ASN yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
		Meraih predikat sebagai salah satu daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018
		Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018.
	Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima.	tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat
		Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat.

Misi 1	Tujuan	Sasaran
		Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.

Misi2	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan
		Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi;
	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.	Angka melek huruf (AMH) mencapai 99,99% pada tahun 2018;
		Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018;
		meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat;
		Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.
		Terwujudnya Pengembangan teknologi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
		Menurunkan angka kematian Ibu melahirkan, Bayi dan BALITA
	Mewujudkan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Misi2	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan.
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di Desa terpencil.
		Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi individu, keluarga dan masyarakat	terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk peningkatan kesehatan keluarga
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan	meningkatnya kualitas sumber daya manusia karena kesehatan yang terjaga
	Meningkatkan infrastruktur Kesehatan yang lebih berkualitas	adanya infrastruktur kesehatan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat
	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesional

Misi3	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif	Mewujudkan perekonomian yang handal	Terjaganya pertumbuhan ekonomi
		Terjaganya stabilitas harga
		Naiknya volume perdagangan.
		Terwujudnya kedaulatan pangan
	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi bahari	Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
		Meningkatnya produksi industri pengolahan perikanan.
	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pertanian (kelapa)	Meningkatnya pendapatan petani
		Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa.
	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pariwisata	Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.
	Menciptakan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.
		Bertambahnya jumlah wirausahawan baru.

Misi4	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir	Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan	Terbangunnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa	Tersedianya sistem jaringan irigasi dan rawa
	Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air	Tersedianya ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air
	Meningkatkan fungsi prasaranaa dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
		Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi

Misi4	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara	Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya
	Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Terbangunnya sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang sehat
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat
	Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan
	Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif
	Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah
	Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas
	Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal
		Terbentuknya regulasi bidang kelaikan moda transportasi

Misi5	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana	Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang komprehensif.	<p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat</p> <p>Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan</p> <p>Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya</p>
Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang asri	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan.
		Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat
	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
		Berkurangnya beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya
		Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten
		Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir
		Terehabilitasinya area hutan mangrove.
	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana	Terlaksananya masatanggap darurat bencana
		Tersedianya data pengolahan logistik
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana
		Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana
		terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana

BABVI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu analisa yang terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 Perumusan Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

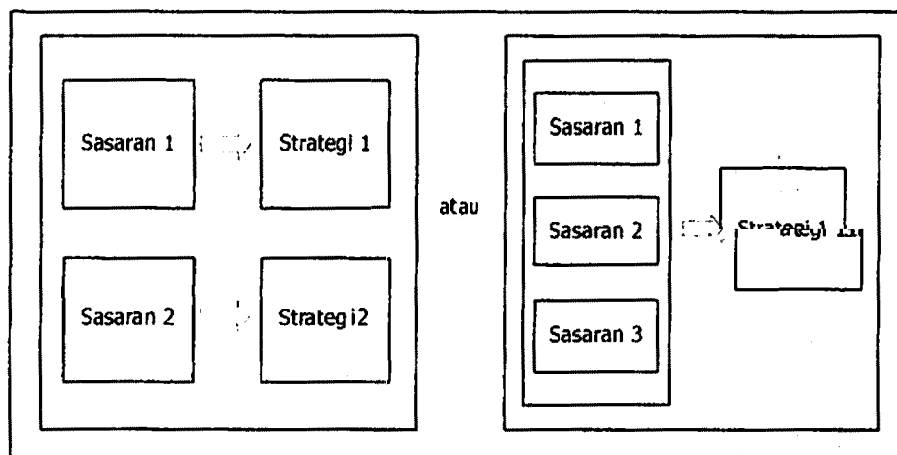
Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar 6.1.
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

6.2. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2018

VISI : Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian

MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional dan Melayani (Sukses Pemerintahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	penataan kelembagaan beserta SOP	setiap SKPD wajib membuat dan melaksanakan SOP sesuai tupoksi	Mewajibkan seluruh SKPD menyusun regulasi sesuai tupoksinya
		Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Membuat regulasi yang menjadi kewenangan daerah dan menerapkan peraturan perundangan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan Reward and Punishment
			Meningkatkan kualitas ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas ASN
		Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting	Meningkatkan kualitas Anggota DPRD	Melaksanakan Konsultasi dan Studi Banding
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas Aparatur Perencana	mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan Bimtek bidang perencanaan pembangunan
2	Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis	meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal	Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan	Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas Aparatur Pengawasan
		Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan	Mensosialisasikan program-program pembangunan pada masyarakat	melibatkan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang keuangan dan kepegawaian	Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas Aparatur bidang keuangan dan kepegawaian
		Meraih predikat sebagai salah satu daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	menerapkan peraturan-peraturan di bidang keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku
			Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	melaksanakan diklat aparatur pengawasan
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	penyusunan SOP pengawasan
		Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018.	Peningkatan disiplin kerja aparatur sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengolahan keuangan daerah	membangun sistem pengolahan keuangan yang akuntabel
			Peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan	melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang keuangan
4	Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima.	tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat	menyusun Standard Pelayanan Minimal dan Standard Pelayanan Publik	mewajibkan pelaksanaan 15 urusan SPM dan mewajibkan SPP untuk semuaSKPD
		Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat.	menerapkan pelayanan perizinan 1 pintu	menerapkan pelayanan efisien dengan biaya yang terjangkau
		Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.	melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat	meningkatkan peran perangkat kecamatan, desa dan kelurahan

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah.	pembangunan dan renovasi gedung sekolah serta penambahan ruang kelas baru
				penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai
		Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi;	melaksanakan pendidikan sertifikasi guru	mengikut sertakan para guru yang memenuhi syarat sertifikasi
2	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.	Angka melek huruf (AMH) mencapai 99,99% pada tahun 2018;	meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat	mendorong minat masyarakat meningkatkan pendidikan
		Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018;	meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat	
			memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin	memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi
		meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi	memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan	melakukan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat
			memberikan motivasi kepada para siswa untuk melanjutkan pendidikan	memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat;	melaksanakan penyuluhan kesehatan dan gizi	menjamin ketersediaan obat dan tenaga kesehatan di puskesmas
				memberikan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan tim penggerak PKK serta memberikan makanan tambahan di posyandu

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				tersedianya faksin dan obat-obatan yang dibutuhkan	
				memberikan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan tim penggerak PKK serta memberikan faksin dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat	
				membangun RSUD dan PUSKESMAS	
				menyediakan Rumah Sakit keliling yang dapat menjangkau seluruh desa	
				Mengembangkan teknologi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	
				membangun pusat informasi kesehatan yang mudah diakses masyarakat	
				mendatangkan tenaga dokter spesialis dari luar daerah (Manado) dengan perjanjian kontrak	
				pengembangan sistem informasi kesehatan, generik, elektronik di semua jenjang sarana pelayanan kesehatan	
				peningkatan sarana dan penguatan kualitas pengelolaan sistem informasi kesehatan berdasarkan efidense based	
			penambahan gizi bagi ibu hamil, bayi dan BALITA	Pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil, bayi dan BALITA	

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (*Sukses Perekonomian*)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	1. Mewujudkan perekonomian yang handal	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Merencanakan serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian.	Pengendalian pertumbuhan ekonomi
		Terjaganya stabilitas harga	Melaksanakan operasi pasar bila harga di pasaran tidak stabil.	Pengendalian ketersediaan barang masyarakat.
		Meningkatnya volume perdagangan	Meningkatkan volume perdagangan	Peningkatan arus perdagangan dalam darah dan antar daerah.
		Terwujudnya kedaulatan pangan	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pemantapan ketahanan pangan.
	2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi bahari	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Mengembangkan perikanan tangkap.	Peningkatan produksi perikanan tangkap.
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Mengembangkan perikanan budidaya.	Peningkatan produksi perikanan budidaya.
		Meningkatnya pendapatan nelayan.	Mengembangkan industri pengolahan perikanan.	Peningkatan taraf hidup nelayan.
	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pertanian.	Meningkatnya pendapatan petani.	Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan taraf hidup petani.
		Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa.	Meningkatkan produksi tanaman kelapa, sarana dan prasarana serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Pengembangan industri tanaman kelapa.
	4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pariwisata	Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.	Menambah destinasi pariwisata serta meningkatkan promosi pariwisata.	Pengembangan pariwisata
	5. Mewujudkan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.	Menjaga iklim investasi, melaksanakan promosi dan meningkatkan realisasi investasi.	Peningkatan nilai investasi.
		Bertambahnya jumlah wirausaha baru.	Mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah.	Peningkatan populasi UMKM.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Bertumbuhnya industri pengolahan dan perdagangan	Mengembangkan industri pengolahan dan perdagangan	Pengembangan industri dan perdagangan.

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (*Sukses Pembangunan*)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas standar geometrik dan kelas jalan	Terbangunnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Peningkatan Jalan Desa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda empat
2	Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa	Tersedianya sistem jaringan irigasi dan rawa	Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan kinerja operasional dan pemeliharaan
3	Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air	Tersedianya ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air	Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber Daya Air
4	Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
		Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Pengurangan titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perkotaan
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perdesaan
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	Percepatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5	Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara	Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya	Peningkatan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan
6	Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui pengendalian daya rusak air
7	Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan	Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan	Peningkatan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan
8	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang komprehensif.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya	1. Peningkatan kapasitas pegawai di bidang perencanaan 2. Pengadaan sistem E- Planning 3. Pelaksanaan penelitian untuk penyusunan dokumen perencanaan dan peningkatan kesejahteraan daerah. 1. Penyusunan rencana detail tata ruang. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang.	Pelaksanaan perencanaan yang komprehensif.
2	Mewujudkan lingkungan hidup yang asri	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau Pengadaan TPA dan sarana prasarana persampahan. Sosialisasi dan koordinasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penyusunan peraturan bupati tentang Baku Mutu Air Sungai	Penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan asri.
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam	Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam	Terpeliharanya lingkungan hidup

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Rehabilitasi Terumbu Karang, Bakau (Mangrove), estuaria, padang lamun dan teluk	
			Pengembangan Kawasan Konservasi menjadi kawasan ekowisata	
		Meningkatnya upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	Penyediaan berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terpeliharanya lingkungan hidup
		Menurunkan beban	Pelaksanaan pengujian emisi, pengujian kadar	Terpeliharanya lingkungan hidup
		Terehabilitasinya kawasan	Pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan	Terpeliharanya lingkungan hidup
		Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir	Rehabilitasi kawasan terumbu karang	Terpeliharanya terumbu karang
		Terehabilitasinya area hutan mangrove.	Rehabilitasi area hutan mangrove	Terpeliharanya hutan mangrove
		Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana	pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	Teratasinya resiko bencana
4	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana	Terlaksananya masa tanggap darurat bencana	Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Bencana	Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman dari resiko bencana
		Tersedianya data pengolahan logistik	Penyediaan Data Pengolahan Logistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	
		Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana	pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	
		terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana	pelaksanaan kegiatan pemulihan Kondisi Daerah Pascabencana	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kemampuan dan keterampilan teknis pemadam kebakaran		
			Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Teknis Pemadam Kebakaran	

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lima tahun kedepan tahun 2013-2018, beberapa agenda utama yang menjadi prioritas untuk kemudian dijabarkan dalam pelbagai kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
3. Revitalisasi Kesehatan dan Pendidikan; dan
4. Revitalisasi Permukiman.
5. Pemerataan Pembangunan lewat kebijakan SAMISADE (Satu Milyar satu Desa)

Selanjutnya kelima agenda tersebut di *breakdown* ke dalam program pembangunan daerah dengan memperhatikan target-target capaian yang mutlak dicapai seperti target capaian MDG's serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang untuk Kabupaten/Kota mencapai 15 (lima belas) SPM.

Penjabaran program pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara juga tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana memuat aspek, fokus dan indikator kinerja kunci pelaksanaan program pembangunan daerah.

Adapun Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

7.1. Program dan Kegiatan Rutin pada Setiap SKPD

Pengembangan kapasitas aparatur pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan atau transformasi yang bertujuan untuk mendorong aparatur untuk mengembangkan tanggungjawab baru, memperoleh keterampilan, mengubah perilaku dan mendapat nilai-nilai baru serta membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif. Proses transformasi tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para pelayan masyarakat.

Secara umum daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara baik dari segi kapasitas (terlatih dan terampil) maupun kapabilitas di dalam melayani masyarakat diharapkan dari tahun ke tahun semakin baik. Ketersediaan SDM yang berdaya saing, disiplin dan memiliki kapasitas memadai, mampu, menguasai bidang tugasnya dan penerapannya, serta mampu mengembangkan

inovasi-inovasi merupakan suatu prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin membuka angin segar kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, misalnya dengan penambahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru sehingga patologi birokrasi dapat sejauh mungkin dihindari. Di sisi lain ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja mutlak diperlukan di dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi perkantoran dan kinerja internal aparatur sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 5 (lima) tahun ke depan tetap memprioritaskan pada pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Penyediaan administrasi perkantoran
2. Penyediaan sarana kerja
3. Penyediaan prasarana pegawai
4. Pelatihan pegawai
5. Penegakan disiplin aparatur

7.2. Program Pembangunan Daerah

Secara umum, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 menekankan pada visi, misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti 2013-2018 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD tentang pemaparan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.

7.2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan

1. Kebijakan Umum

- a. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
- c. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan;
- e. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal;

- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
- g. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.

7.2.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
- d. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit dan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

2. Program Pembangunan

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- k. Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- l. Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- m. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- n. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- p. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan
- q. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

7.2.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat;

- c. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; dan
 - d. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 2. Program Pembangunan**
- a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - d. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
 - e. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
 - f. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - g. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
 - h. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - i. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
 - j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - l. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - m. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - n. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - o. Program Pengendalian Banjir
 - p. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - q. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - r. Program Pengelolaan Persampahan
 - s. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
 - t. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - u. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - v. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.
 - w. Program Penanganan Darurat
 - x. Program Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana
 - y. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
 - z. Program Pengurangan Resiko Bencana
 - aa. Program pemulihan daerah bencana
 - bb. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

7.2.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan

1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;

- b. Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; dan
- c. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
- f. Program pengelolaan areal pemakaman.

7.2.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan;

2. Program Pembangunan

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.2.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan data/informasi;
- b. Program Kerjasama Pembangunan;
- c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Program perencanaan pembangunan daerah;
- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. Program perencanaan sosial budaya;
- i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; dan

- j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

7.2.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan

1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
- b. Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

2. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- d. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
- e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
- f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

7.2.8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
- b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
- g. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

7.2.9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan
- c. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

2. Program Pembangunan

- a. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; dan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

7.2.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan.

2. Program Pembangunan

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7.2.11 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; dan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Program Pembangunan

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

7.2.12 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Kebijakan Umum

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; dan
- c. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

2. Program Pembangunan

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
- h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan
- i. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

7.2.13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama;
- c. Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan peran aktif masyarakat; dan
- d. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program pembinaan anak terlantar;
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Program Penanggulangan Kemiskinan.

7.2.14. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; dan

- b. Meningkatkan daya saing perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.

2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

7.2.15 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; dan
- b. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

2. Program Pembangunan

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

7.2.16 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
- b. Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
- c. Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.

7.2.17 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan

1. Kebijakan Umum

- a. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional;

- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

7.2.18 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

1. Kebijakan Umum

- a. Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; dan
- c. Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga;
- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
- g. Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga.

7.2.19 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Kebijakan Umum

- a. Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- b. Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
- c. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- g. Program pendidikan politik masyarakat; dan
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7.2.20 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- d. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- e. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Program Pendidikan Kedinasan;
- m. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- o. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

- p. Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik;
- q. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- r. Program Peningkatan Administrasi pemerintahan;
- s. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek;
- t. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
- u. Program Penegakan Hukum; dan
- v. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

7.2.21 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan

1. Kebijakan Umum

Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

2. Program Pembangunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

7.2.22. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
- f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

7.2.23 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik

1. Kebijakan Umum

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan.

2. Program Pembangunan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

7.2.24 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; dan
- b. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

2. Program Pembangunan

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kearsipan; dan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

7.2.25. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; dan
- b. Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
- c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
- d. Program kerjasama informasi dan media massa.

7.2.26. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan

1. Kebijakan Umum

Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat.

2. Program Pembangunan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

7.2.27 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak dan perkebunan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak dan perkebunan; dan

- c. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
- i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- j. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan.

7.2.28. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; dan
- b. Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area).

2. Program Pembangunan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
- d. Program perencanaan dan pengembangan hutan.
- e. Program pengukuhan kawasan hutan

7.2.29 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan energi; dan
- d. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

2. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program Pembinaan Bidang Pertambangan;

- c. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- d. Program Pengawasan;
- e. Program pengembangan kawasan pertambangan galian C;
- f. Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral;
- g. Program Geologi;
- h. Program Energi dan Kelistrikan;
- i. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- j. Program Pengembangan Energi Terbarukan.

7.2.30 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata;
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata; dan
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal

2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

7.2.31 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tanj ikan; dan
- b. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

2. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- c. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
- e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

7.2.32. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional;
- b. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; dan

- d. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

2. Program Pembangunan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- e. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
- f. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar.

7.2.33. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; dan
- b. Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran.

2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
- d. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

7.2.34. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi

1. Kebijakan Umum

Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi transmigran.

2. Program Pembangunan

Program Transmigrasi Regional.

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2018

MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional dan melayani								
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
1	penataan kelembagaan beserta SOP	setiap SKPD wajib membuat dan melaksanakan SOP sesuai tupoksi	penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	jumlah OPD dan SOP				bagian Ortal
	Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Membuat regulasi yang menjadi kewenangan daerah dan menerapkan peraturan perundangan sesuai ketentuan yang berlaku	program penataan administrasi pemerintahan	jumlah perda jumlah peraluran bupati jumlah SK Bupati				
	Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting	Meningkatkan kualitas Anggota DPRD	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	jumlah perda jumlah perda inisiatif				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas Aparatur Perencana melalui diklat perencanaan	program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	diklat perencanaan	2 orang	10 orang	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	bappeda
		meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	program perencanaan pembangunan daerah	dokumen RPJPD dokumen RPJMD dokumen RKPD dokumen RTRW dokumen kajian	0 1 1 0 5	1 2 10 2 12	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	bappeda
	meningkatkan efektifitas dan pengendalian internal	Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	jumlah aparat pengawas yang telah mengikuti pelatihan	20 orang	40 orang	urusan wajib pemerintahan umum	Inspektorat
	Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan	Mensosialisasikan program-program pembangunan pada masyarakat	program peningkatan kualitas pelayanan informasi	jumlah sosialisasi	12	36	urusan wajib pemerintahan umum	SKPD terkait
			program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah program	40%	80%	urusan wajib pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan dan sosial	SKPD terkait

MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional dan melayani

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
			program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	jumlah program	35%	85%	urusan wajib pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan dan sosial	SKPD terkait
3	Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang keuangan dan kepegawaian	program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	adanya sistem serta dokumen pengelolaan keuangan daerah	50%	90%	urusan wajib pemerintahan umum	BPKBMD
			program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparat pegawai yang telah mengikuti pelatihan/kursus	40%	75%	urusan wajib pemerintahan umum	BPKBMD
			program pengembangan dan pembinaan apatur	prosentase kehadiran aparat pegawai	60%	85%	urusan wajib pemerintahan umum	BKDD
			program pendidikan kedinasan	jumlah program pendidikan kedinasan	40%	75%	urusan wajib pemerintahan umum	SKPD terkait
	Meraih predikat sebagai salah satu daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	jumlah temuan	70 temuan	20 temuan	urusan wajib pemerintahan umum	Inspektorat
		Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	pengawas yang telah mengikuti pelatihan	20 orang	40 orang	urusan wajib pemerintahan umum	Inspektorat
		Penataan dan penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	jumlah temuan	70 temuan	20 temuan	urusan wajib pemerintahan umum	Inspektorat
			Program penataan dan penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	jumlah aparat pengawas yang telah mengikuti pelatihan	20 orang	40 orang	urusan wajib pemerintahan umum	Inspektorat

MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional dan melayani

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
	Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018.	Peningkatan disiplin kerja aparatur sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengolahan keuangan daerah	program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	prosentase aparat yang mengikuti bimtek pengolahan keuangan	40%	80%	urusan wajib pemerintahan umum	BPKBMD
		Peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan	program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	prosentase aparat yang mengikuti bimtek pengolahan keuangan	40%	80%	urusan wajib pemerintahan umum	BPKBMD
	tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat	menyusun Standard Pelayanan Minimal dan Standard Pelayanan Publik	program pengembangan kualitas kebijakan publik	SPP dan SPM	0	2	urusan wajib pemerintahan umum	BP2SP
	Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat.	menerapkan pelayanan perizinan 1 pintu	program peningkatan kualitas pelayanan publik	SPP dan SPM	0	2	urusan wajib pemerintahan umum	BP2SP
	Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.	melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat	program pengembangan data dan informasi	jumlah sosialisasi	12	36	urusan wajib pemerintahan umum	SKPD terkait

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
1	Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	40%	90%	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga
2	Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi;	meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun	APMSD & SMP sederajat	94.40%	97%	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga
3	Angka melek huruf (AMH) mencapai 99,99% pada tahun 2018;	meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat	program penigkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik	jumlah guru bersertifikat profesional pendidik	100 orang	600 orang	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga
5	Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018;	meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	meningkatnya budaya baca	60%	90%	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga
6	meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi	memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan	program manajemen pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	55%	80%	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga
7	Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat;	melaksanakan penyuluhan kesehatan dan gizi	program perbaikan gizi masyarakat	angka penderita gizi buruk	20%	5%	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	melaksanakan penyuluhan secara berkala oleh instansi teknis terkait bahaya penyakit menular	program penyuluhan kesehatan masyarakat	jumlah penyuluhan	40%	80%	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.	membangun sarana kesehatan masyarakat yang representatif	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan sarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.	Jumlah puskesmas (P), puskesmas plus (PP) yang terbangun.	12 unit P	16 unit P, 14 PP	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Menurunkan angka kematian Ibu melahirkan, Bayi dan BALITA	Penyediaan fasilitas rumah tunggu bagi ibu hamil	Program pengadaan, rumah tunggu	Jumlah rumah tunggu yang terbangun.	0	12 unit	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
10	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)	Sosialisasi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)	Program upaya kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69tahun	70,5tahun	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
11	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan	meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan	program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang berkompeten	17 orang	68 orang	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handa lberbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif									
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Pengendalian pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan yang komprehensif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	Prosentase pertumbuhan ekonomi	6,45%	6,7%	Perencanaan	Bappeda	
			Program pengembangan data dan informasi.				Perencanaan	Bappeda	
2	Terjaganya stabilitas harga	Pengendalian ketersediaan barang masyarakat melalui operasi pasar.	Program pengendalian Inflasi	Angka inflasi umum satu digit.	8,12%	5%	Urusan wajib pemerintahan umum	Bagian Ekonomi Setda	
			Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Angka inflasi umum satu digit.			Urusan Pilihan Perdagangan	Perindagkop	
			Program Operasi pasar	Angka inflasi umum satu digit.			Urusan Pilihan Perdagangan	Perindagkop	
3	Naiknya volume perdagangan	Peningkatan kegiatan perdagangan dalam daerah dan antar daerah.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Prosentase pertumbuhan ekonomi	6,45%	6,7%	Urusan Pilihan Perdagangan	Perindagkop	
			Program pembinaan kaki lima dan asongan						
			Program pengembangan sentra-industri potensial						
4	Terwujudnya kedaulatan pangan	Pemantapan ketahanan pangan dengan meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Skor pola Pangan Harapan (PPH) dan konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 ; konsumsi ikan sebesar 37 kg/kapita/tahun.	PPH 92,5 ; konsumsi ikan sebesar 42 kg/kapita/tahun.	Urusan Wajib Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah						

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	86.263 ton tanaman pangan, 1.783,63 ton hortikultura	102.940 ton tanaman pangan, 32544ton hortikultura	Urusan Pilihan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian/Perkebunan
5	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi dengan mengembangkan sektor perikanan tangkap.	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	31.715 ton	84.500 ton	Urusan Pilihan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan dan sosialisasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	15 Orang	175 Orang		
			Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam penyalahgunaan sumber daya laut.	Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi		78 Kelompok		
6	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi dengan mengembangkan perikanan budidaya.	Program pengembangan budidaya perikanan.	13.250 ton pada tahun 2016 dan 31.715 ton	11.000 ton	15.000 ton	Urusan Pilihan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan sarana dan Sarana Penyuluh Perikanan					
			Program pengolahan data dan informasi perencanaan					
			Program Pengembangan sarana statistik Kelautan dan Perikanan					
			Program Pengembangan sarana statistik Kelautan dan Perikanan					
			Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah produksi ikan	31,715Ton	184,500Ton		

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
7	Meningkatnya pendapatan nelayan	Peningkatan taraf hidup nelayan dengan mengembangkan industri pengolahan perikanan.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	jumlah produksi olahan dan pemasaran hasil perikanan	400ton	1750ton	Urusan Pilihan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah desa pesisir yang diberdayakan	7 Desa	14 Desa		
			Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	4 Pokmaswas	20 Pokmaswas		
8	Meningkatnya pendapatan petani.	Peningkatan taraf hidup petani melalui peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan..	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Nilai Tukar Petani 100,5-101,7 (tumbuh 0,3% per tahun)	96	102	Urusan Pilihan Pertanian /Perkebunan	Dinas Pertanian/ Perkebunan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani 100,5-101,7 (tumbuh 0,3% per tahun)	96	102	Urusan Pilihan Pertanian/ Perkebunan	
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Nilai Tukar Petani 100,5-101,7 (tumbuh 0,3% per tahun)	96	102	Urusan Pilihan Pertanian/ Perkebunan	
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian	86.263ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	431.315 ton tanaman pangan, 463.785 ton hortikultura	Urusan Pilihan Pertanian /Perkebunan	
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	5 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	31 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	Urusan Pilihan Pertanian/ Perkebunan	
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak					

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif									
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Program peningkatan produksi hasil peternakan						
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan						
			Program pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan						
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan						
			Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan						
			Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan						
			Program pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.						
			Program pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.						
			Program pemberdayaan pelaku utama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.						
			Peningkatan penyelegaraan dan pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan.						

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif									
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
			Program peningkatan penerapan teknologi peternakan						
			Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan						
			Program peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran dan ekspor hasil pertanian						
			Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan						
			Program pebangunan kawasan peternakan						
			Program pebangunan kawasan tanaman hortikultura						
			Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Adanya dokumen kawasan strategis cepat tumbuh.	Belum	Ada	Urusan Perencanaan	Bappeda	
			Program rehabilitasi hutan dan lahan						
			Program usaha Hutan tanaman						
9	Berkembangnya agribisnis dan agroindustri kelapa.	Pengembangan industri tanaman kelapa melalui peningkatan sarana dan prasarana perkebunan, peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan						
			Program Peningkatan Kelembagaan Petani Hutan						

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
			Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan					
			Program pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan					
			Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.					
			Program pengukuhan kawasan hutan.					
			Program rencana makro kawasan hutan					
			Program peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan					
			Program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan, peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Adanya sentra agrobisnis dan agroindustri kelapa di Tombatu Raya dan sekitarnya.	Belum	Ada	Urusan Pilihan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk, meningkatnya daya jual, daya saing komoditi perkebunan		115 000 bibit kelapa	Urusan Pilihan Pertanian/Perkebunan	

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
10	Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.	Pengembangan pariwisata melalui penambahan destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata.	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara	wisatawan domestik 10.000 orang, mancanegara sebanyak 100 orang	wisatawan domestik 39.500 orang, mancanegara sebanyak 500 orang	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah obyek wisata yang dikelola secara profesional	2 obyek wisata	20 obyek wisata		
			Program pengembangan nilai budaya	Jumlah jenis seni budaya yang digali dan dikembangkan	4 jenis	9 jenis		
			Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah jenis kegiatan budaya	3 kegiatan	16 kegiatan		
11	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.	Peningkatan nilai investasi dengan menjaga iklim investasi, melakukan promosi dan meningkatkan realisasi investasi.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi (MOU)		14MOU	Urusan wajib pemerintahan umum	Badan Perizinan
			Program peningkatan iklim investasi, promosi dan realisasi investasi.	Jumlah investasi PMDN 30 milyar rupiah dan PMA 5 milyar rupiah pada tahun 2018.	PMDN 10 milyar rupiah dan PMA 0 milyar rupiah.	PMDN 30 milyar rupiah dan PMA 5 milyar rupiah.	Urusan wajib pemerintahan umum	
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah dokumen kajian		7 dokumen	Urusan wajib pemerintahan umum	Badan Perizinan
12	Meningkatnya jumlah wirausaha baru.	Peningkatan populasi UMKM dengan mengembangkan industri usaha mikro, kecil dan menengah.	Program pengembangan industri mikro, kecil dan menengah.	Jumlah wirausaha	Usaha mikro 482,	Usaha mikro 600,	Urusan Pilihan	

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis patensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim Investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif									
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.	baru yang bertambah.	kecil 76, menengah 15	kecil 90, menengah 20	Industri	Perindagkop	
			Program pembangunan kawasan industri kecil dan menengah	Jumlah wirausaha baru yang bertambah.	Usaha mikro 482, kecil 76, menengah 16	Usaha mikro 600, kecil 90, menengah 20	Urusan Pilihan Industri	Perindagkop	

MSI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
1	Meningkatnya penyelenggaraan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	1. Perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang matang dan komprehensif.	Program peningkatan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	54.00%	80.00%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	54.00%	80.00%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	54.00%	80.00%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	55.00%	90.00%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
2	Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa	Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Persentase luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	42%	69%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
3	Meningkatnya ketersediaan air baku	Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Penambahan penyediaan air baku	700 L/dt	1200 L/dt	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk yang terlayani air minum	63,14%	79,00%	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan Pelayanan sambungan rumah jaringan air limbah terpusat di Kawasan kota Ratahan	... SR	... SR	Urusan wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum/BLHKP
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan TPST 3R	12%	45%	Urusan wajib Pekerjaan Umum / Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum/BLHKP
7	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Pengurangan titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Persentase Jumlah titik genangan air yang ditangani di kawasan perkotaan	42%	70%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase cakupan layanan kawasan perkotaan pada wilayah hinterland sekitarnya	39%	60%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jumlah kawasan perdesaan yang telah terbangun	39%	60%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
10	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Prosentase aksesibilitas kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	32%	62%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
11	Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya	Peningkatan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase peningkatan kawasan budaya	40%	75%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
12	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air	Program Pengendalian Banjir	Prosentase kawasan rawan banjir yang ditangani	45%	75%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					
			program Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong					
13	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat	Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas Perumahan	40%	86%	Urusan Wajib Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
14	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	12%	9,50%	Urusan Wajib Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
15	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah	Pembuatan RTR Pada kawasan Strategis Kabupaten	Program perencanaan Tata Ruang	Jumlah RTR Kawasan Strategis Kabupaten	5 Kawasan	9 Kawasan	Urusan Wajib Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum / Bappedda

MISI 4: mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang, melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah.	Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Peningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW Kabupaten	30%	60%	Urusan Wajib Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
17	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas	Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada Kawasan dalam kota ratahan dan Kawasan Lindung	20%	60%	Urusan Wajib Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
18	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal	Penyediaan fasilitas kelengkapan dan keselamatan jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Pengamanan Jalan / Rambu Lalu Lintas yang terpasang	100 Rambu LL, 100 Meter Marka Jalan, 1 Unit Apil, 50 Deliniator, 20 Unit Pagar Pengaman, 2 Unit Halte	500 Rambu LL, 500 Meter Marka Jalan, 5 Unit Apil, 250 Deliniator, 100 Unit Pagar Pengaman, 10 Unit Halte	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
19	Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi	Pembangunan fasilitas pengujian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan bermotor	Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor beserta perlengkapannya	tidak ada	ada	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
20	Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Peningkatan sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	Tersedianya Terminal Tipe C	tidak ada	1 buah	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
21	Meningkatnya keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas	Peningkatan keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan Umum	55	70	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo

MISI 4: mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
				Jumlah SDM bidang pengelolaan perparkiran	0	1	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
22	Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi dan komunikasi	1. Tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL, Andallalin 3. Tersedianya SDM berkualifikasi teknis di bidang komunikasi dan informatika	Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	1	14	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				JumlahSDM bidang MRLL dan Andalalin	2	10	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah SDM bidang Kominfo	1	5	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
23	Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan bermotor	Jumlah Uji Kiur	30	190	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
		2. Penurunan Lama waktu Uji Kiur		Lama waktu uji Kiur	90 Menit	60 Menit	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
24	Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi yang efektif sampai ke daerah pelosok	Tersedianya menara telekomunikasi yang dibangun di Kab. Minahasa Tenggara	Program Kerja sama Informasi dengan media massa	Jumlah Menara Komunikasi di Kab. Mitra	27	30	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo
			Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan media massa	Tersusunnya PPID dan KIM	tidak ada	ada	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
25	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Mineral.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.	persentase perusahaan yang menjalankan usaha bidang sumberdaya mineral sesuai dengan peraturan	20%	100%	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
			Program Pembinaan Bidang Pertambangan	persentase pelaku usaha pertambangan yang memahami sistem dan prosedur izin usaha pertambangan	100%	100%	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
26	Menurunkan luas areal pertambangan tanpa izin	Melaksanakan pengawasan dan penerbitan kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Berkurangnya Luasan area kegiatan usaha pertambangan tanpa izin	143 Ha	48 Ha	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
			Program Pengawasan	Persentase pengelolaan usahajasa pertambangan yang taat hukum	100%	100%	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
27	mengoptimalkan penataan kawasan pertambangan galian C	Melaksanakan penataan kawasan pertambangan galian C	Program pengembangan kawasan pertambangan galian C	Tersedianya dokumen potensi pertambangan galian C	tidak ada	ada	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
28	Meningkatkan kualitas data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah	Melaksanakan pengumpulan data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah	Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral	Tersedianya data informasi geologi Kabupaten Minahasa Tenggara	tidak ada	ada	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
			Program Geologi	Tersedianya data rawan bencana dan potensi tambang	tidak ada data	ada	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
29	Meningkatnya cakupan pelayanan energi listrik.	Peningkatan cakupan pelayanan energi listrik	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah pelanggan baru yang terpasang listrik.	1150	7600	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
30	Semakin tersedianya energi listrik serta energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten	Mendorong pembangunan sumber energi baru terbarukan di seluruh wilayah kabupaten	Program Pengembangan Energi Terbarukan	Tersedianya data Potensi energi terbarukan dan cara pemanfaatan energi terbarukan	belum tersedia	Tersedia	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
			Program Energi dan Kelistrikan	Meningkatnya akurasi data kebutuhan energi, BBM dan LPG	0%	100%	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
31	Meraih prestasi sebagai daerah percontohan percepatan pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2017	Penyusunan dokumen strategi sanitasi dan pembangunan infrastruktur sanitasi.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya Buku Putih Sanitasi	tidak ada	Ada	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda

MSI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir							
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	
			Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Prosentase meningkatnya Penduduk Berakses Air Minum	63.14%	79%	Dinas PU
			Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan Pelayanan sambungan rumah jaringan air limbah terpusat di Kawasan kota Ratahan	...SR	...SR	Dinas PU / BLHKP
			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan TPST 3R	12%	45%	Dinas PU / BLHKP
32	Tersedianya areal pemakaman	Pembangunan dan penataan areal pemakaman	Program pengelolaan areal pemakaman / Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah areal pemakaman yang tersedia.	tidak ada	1	Dinas Pekerjaan Umum / BLHKP
33	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	Pengumpulan data dan dokumen serta pengolahan data untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah	Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya tingkat penggunaan data/informasi untuk dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan	50%	90%	Bappeda

MISI 4: mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
34	Adanya integritas pembangunan antar sektor	Melakukan kerjasama pembangunan antar sektor	Program Kerjasama pembangunan	Meningkatkan Integritas Pembangunan antar sektor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Urusan Wajib Bappeda	Bappeda
35	Tersedianya Sistem inovasi Daerah	Pengadaan sistem e planing, e-monev, e-database	Program Inovasi Daerah	Tersedianya sistem inovasi daerah	0	3	Urusan Wajib Bappeda	Urusan Wajib Bappeda
36	Peningkatan Kapasitas SDM Perencana, Tersusunnya Kajian dan terlaksananya penelitian oleh Pemda	Adanya MOU antara Pemerintah daerah dengan dunia usaha/swasta dan akademisi/universitas	Program Pengembangan Kerjasama dengan dunia usaha/swasta dan akademisi/universitas	Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha/swasta dan akademisi/universitas	1	1	Urusan Wajib Bappeda	Bappeda

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
1	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terbangunnya Taman Kota	4 Unit	14 Unit	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP
2	Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan.	Pengadaan TPA dan sarana prasarana persampahan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya persentase sampah yang terangkut ke TPA	38%	40%	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP
				Adanyalahan untuk pembangunan TPA	tidak ada	1 TPA Control Sanitary Landfill dan 1 TPA 3R	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP
3	Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Sosialisasi dan koordinasi terkait pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta penyusunan peraturan bupati tentang Baku Mutu Air Sungai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meraih Piala Adipura untuk kategori Kota Kecil pada 2018	---	Piala Adipura	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP
4	Meningkat kan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam	Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kawasan konservasi SDA yang mendapat perlindungan	--	4 Kawasan	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP
		Rehabilitasi Terumbu Karang, Bakau (Mangrove), estuaria, padang lamun dan teluk	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase cakupan kegiatan rehabilitasi terhadap keseluruhan cadangan sumber daya alam yang ada	--	40%	Urusan Wajb Lingkungan Hidup	BLHKP

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
5	Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	Penyediaan berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0%	35%	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHKP
6	Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya	Pelaksanaan pengujian emisi, pengujian kadar limbah serta review baku mutu limbah	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kendaraan bermotor dan industri/pelaku usaha yang telah melakukan uji emisi/uji baku mutu limbah	0	400 kendaraan bermotor, 200 industri/pelaku usaha	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHKP
7	Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten	Pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan laut dan pesisir	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Jumlah Kawasan Laut dan Pesisir yang dikelola dan direhabilitasi	0 Kawasan	8 Kawasan	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHKP / Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir			Luas terumbu karang yang direhabilitasi 5 ha.	0	5Ha	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHKP / Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Bertambahnya hutan mangrove.			Luas hutan yang direhabilitasi 200 ha.	0	200Ha	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	BLHKP / Dinas Kelautan dan Perikanan / Dinas Kehutanan dan perkebunan

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)		
10	Terlaksananya masa tanggap darurat bencana	Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Bencana saat terjadi bencana	Program Penanganan Darurat	Persentase Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	BPBD
11	Tersedianya data pengolahan logistik	Penyediaan Data Pengolahan Logistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Program Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana	Persentase Tersedianya Data Pengolahan Logistik	0%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	BPBD
12	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	100%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	BPBD
13	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana	pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	Program Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	0%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	BPBD
14	terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana	pelaksanaan kegiatan pemulihan Kondisi Daerah Pascabencana	Program pemulihan daerah bencana	Persentase pelaksanaan kegiatan pemulihan Kondisi Daerah Pascabencana	90%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	BPBD

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana							
No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja		SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	
15	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan teknis pemadam kebakaran	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Teknis Pemadam Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Teknis Pemadam Kebakaran	0%	100%	Urusan Wajib Pekerjaan Umum BP8D

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berbagai kemungkinan dapat saja terjadi yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan indikasi Program prioritas didasarkan pada visi, misi dan program kerja Kepala Daerah serta amanat yang tercantum dalam rancangan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, ditetapkan program prioritas berdasarkan misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang mengedepankan Supremasi Hukum, Demokratis, profesional dan melayani. (Sukses Pemerintahan).

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani rukun dan damai, ditetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- 2) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 4) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
- 5) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- 6) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- 7) Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 8) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- 9) Program penataan peraturan perundang-undangan;

- 10) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 11) Program Pendidikan Kedinasan;
- 12) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 14) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- 15) Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi;
- 16) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 17) Program penataan daerah otonom;
- 18) Program pengembangan wilayah perbatasan;
- 19) Program kerjasama informasi dengan media massa;
- 20) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan;
- 21) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
- 22) Program Penegakan Hukum;
- 23) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 24) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 25) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 26) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- 27) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 28) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- 29) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- 30) Program pendidikan politik masyarakat;
- 31) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 32) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- 33) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 34) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- 35) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 36) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 37) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- 38) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- 39) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;

- 40) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 41) Program perencanaan sosial budaya;
- 42) Program peningkatan pelaporan Keuangan Daerah
- 43) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 44) Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
- 45) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 46) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 47) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- 48) Program pengelolaan pendapatan daerah
- 49) Program perencanaan pendapatan daerah
- 50) Program peningkatan PAD
- 51) Program Peningkatan PBB-P2 dan BPHTB.
- 52) Program pengembangan pendapatan daerah
- 53) Program Pengelolaan Aset
- 54) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 55) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 56) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 57) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya;
- 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 4) Program Pendidikan Menengah;
- 5) Program Pendidikan Non Formal;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 8) Program Pendidikan Luar Biasa;
- 9) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- 10) Program peningkatan peran serta kepemudaan;

- 11) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- 12) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga;
- 13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- 14) Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga;
- 15) Program Pelatihan PASKIBRA;
- 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 17) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 18) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 19) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 20) Program pengembangan obat asli Indonesia;
- 21) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- 22) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 23) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 24) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 25) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 26) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 27) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- 28) Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 29) Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 30) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- 31) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- 32) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- 33) Program Peningkatan Keselamatan Ibu, KB, dan Usia;
- 34) Program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga;
- 35) Program Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 36) Program Penanggulangan Masalah Kesehatan;
- 37) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- 38) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- 39) Program Keluarga Berencana;

- 40) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- 41) Program pelayanan kontrasepsi;
- 42) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- 43) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- 44) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- 45) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB;
- 46) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KKB;
- 47) Program Pengerakan Lini Lapangan;
- 48) Program Peningkatan Kualitas Pendataan Keluarga;
- 49) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
- 50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Untuk Mendukung Program Edukasi (KIE) Program KB serta Kelengkapan Sarana KIE dan Konseling Remaja untuk Mendukung Program Generasi Berencana dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan dan TRIAD KRR;
- 51) Program Pengembangan Ketahanan Keluarga;
- 52) Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 53) Program Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
- 54) Program Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
- 55) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
- 56) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
- 57) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
- 58) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
- 59) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 60) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
- 61) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 62) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 63) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

- 64) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- 65) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 66) Program pembinaan anak terlantar;
- 67) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 68) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- 69) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- 70) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- 71) Program Keserasian Sosial;
- 72) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 73) Program Penanggulangan Kemiskinan;
- 74) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 75) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 76) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- 77) Program Transmigrasi Regional;
- 78) Program Transmigrasi Lokal;
- 79) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 80) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 81) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 82) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- 83) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
- 84) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
- 85) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

3. Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. (Sukses Perekonomian)

Dalam mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif, program-program prioritas yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

- 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
- 5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- 6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 7) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- 8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 9) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 10) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- 11) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
- 12) Program pengembangan budidaya perikanan;
- 13) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- 14) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- 15) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- 16) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- 17) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
- 18) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
- 19) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat;
- 20) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 21) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 22) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 23) Program Pengembangan Kemitraan;
- 24) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 25) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 26) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 27) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 28) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 29) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah;
- 30) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan;
- 31) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;

- 32) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- 33) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 34) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 35) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 36) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 37) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah;
- 38) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
- 39) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- 40) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 41) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 42) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
- 43) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 44) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 45) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 46) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- 47) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi;
- 48) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;

4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan)

Dalam mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir, program-program prioritas yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong;
- 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- 6) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- 7) Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan;

- 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- 9) Program penyediaan dan pengolahan air baku;
- 10) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- 11) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- 12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 13) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
- 14) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- 15) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
- 16) Program Pengembangan Perumahan;
- 17) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 18) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- 19) Program pengelolaan areal pemakaman;
- 20) Program Pengembangan data/informasi;
- 21) Program Kerjasama Pembangunan;
- 22) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
- 23) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- 24) Program perencanaan pembangunan daerah;
- 25) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam;
- 26) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 27) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 28) Program peningkatan pelayanan angkutan;
- 29) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
- 30) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- 31) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
- 32) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 33) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
- 34) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
- 35) Program kerjasama informasi dan media massa;
- 36) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- 37) Program Pembinaan Bidang Pertambangan

38) Program Pengawasan

39) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;

40) Program pengembangan kawasan pertambangan galian C

41) Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral

42) Program Geologi

43) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

44) Program Pengembangan Energi Terbarukan;

45) Program Energi dan Kelistrikan

5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup)

Dalam Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana, Program prioritas yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang;
- 2) Program Pemanfaatan Ruang;
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- 4) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 8) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- 9) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 10) Program pengendalian kebakaran hutan;
- 11) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- 12) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
- 13) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- 14) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- 15) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
- 16) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 17) Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- 18) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;

- 19) Program perencanaan dan pengembangan hutan;
- 20) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
- 21) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri;
- 22) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut;
- 23) Program Pengendalian Banjir.

Tabel 8.1 Indikasi Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD(2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1000	11	12	13	14	15	16
1 01	Urusan Wajib Pendidikan														
		kenaikan 10%			152.254.802,369		167.480.282.606		184.228.310.866.49		202.651.141.953		222.916.256.148		
		Prosentase terhadap APBD													
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				152.219.757.369		167.195.568.560		184.172.005.866.01		201.066.850.539		220.707.257.286		925.561.439.620
	Belanja Tidak Langsung				131.368.172.649		142.534.467.324		156.787.914.056.58		172.466.705.462		189.713.376.008		
	Belanja Pegawai				131.368.172.649		142.534.467.324		156.787.914.056.58		172.466.705.462		189.713.376.008		
	Belanja Langsung				20.851.584.720		24.861.101.236		27.384.091.805.45		28.600.145.077		30.993.881.278		
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	0 aduan	1.087.004.500	0 aduan	1.173.964.860	0 aduan	1.267.882.048.80	0 aduan	1.369.312.613	0 aduan	1.478.857.622	0 aduan	6.377.021.643
	02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	106.000.000	0 aduan	886.600.000	0 aduan	1.128.260.000.00	0 aduan	120.000.000	0 aduan	132.000.000	0 aduan	2.372.860.000
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	0 aduan	32.600.000	0 aduan	35.860.000	0 aduan	39.446.000.00	0 aduan	43.190.600	0 aduan	47.729.660	0 aduan	199.026.260
	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	0 aduan	13.000.000	0 aduan	14.300.000	0 aduan	15.730.000.00	0 aduan	17.303.000	0 aduan	19.033.300	0 aduan	79.366.300
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	3.430.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000.00	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	49.840.005
1 01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	40%	50%	67.625.000	60%	310.000.000	70%	522.000.000.00	80%	525.500.000	90%	529.000.000	95%	1.954.125.000
1 01	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)	98.9%	92.5%	2.458.034.720	94.3%	2.654.677.498	96.2%	2.867.051.697.41	97.2%	3.096.415.833	99.9%	3.344.129.100	99.9%	14.420.308.848
1 01	17 Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, APT	45.0%	650%	1.639.500.000	78.0%	1.770.660.000	80.0%	1.912.312.800.00	870%	2.065.297.824	99.9%	2.210.521.650	99.9%	9.618.292.274
1 01	18 Program Pendidikan Non Formal	Angka partisipasi kasar (APK) Non formal	99.3%	99.50%	77.726.400	99.60%	122.400.000	100%	123.400.000.00	100%	127.400.000	100%	128.400.000	100%	579.326.400
1 01	19 Program Pendidikan luar Biasa	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan luar Biasa	40%	40%	50.000.000	70%	300.000.000	80%	324.000.000.00	90%	349.970.000	99%	377.913.600		1.401.833.600
1 01	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang bersertifikasi profesional pendidik	100 org	100 org	39.875.000	100 org	43.065.000	100 org	46.510.200.00	100 org	50.231.016	100 org	54.249.497	600 org	233.930.713
1 01	22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (LS), Angka melek huruf (MH)	LS=9; MH=99.5%	LS=9.5; MH=99.6%	464.593.600	LS=10; MH=99.7%	501.761.088	LS=10.5; MH=99.8%	541.901.975.04	LS=11; MH=99.85%	585.754.133	LS=12; MH=99.99%	632.074.464	LS=12; MH=99.99%	2.725.585.260
1 01	Program Pendidikan Tinggi	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi	78.97%	78.97%	25.045.000	80.02%	100.000.000	82.21%	110.000.000.00	83.64%	121.000.000	85.35%	133.100.000	85.35%	489.145.000
1 18	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Prosentase bangunan sekolah yang kondisinya baik	99.9%	99.9%	14.652.638.000	99.9%	15.824.849.040	99.9%	17.090.836.963.20	99.9%	18.458.103.920	99.9%	19.934.752.234	99.9%	85.961.180.162

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1 18	15	Program Pengembangan dan Keseserian Kebijakan Pemuda	Keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembinaan organisasi, sosialisasi program kepemudaan dan pelatihan keterampilan/ kewirausahaan	60%	70%	75%	315,000,000	80%	335,000,000.00	85%	355,000,000	90%	375,000,000	90%	1,380,000,000		
1 18	19	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Peningkatan mutu dan organisasi keolahragaan	3 peng cab	3 peng cab	4 peng cab	52,000,000	5 peng cab	62,920,000.00	6 peng cab	69,212,000	7 peng cab	76,133,200	7 peng cab	317,465,200		
1 18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya program pembinaan yang berjenjang pada semua cabang olahraga prestasi di Minahasa Tenggara			3 cabang	150,000,000	4 cabang	162,000,000.00	4 cabang	174,960,000	4 cabang	188,956,800	4 cabang	675,916,800		
1 01	21	Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai			80%	300,000,000	80%	324,000,000.00	80%	349,920,000	80%	377,913,600	80%	1,351,833,600		
1 01		Program Pelatihan Paskibra	Meningkatnya kemampuan Paskibra	30 org	30 org	30org	90,763,750	30org	99,840,125.00	30 org	109,824,138	30org	120,806,551	150org	503,747,064		
		Program pengembangan kawasan pendidikan					100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000				
		Program pebangunan kawasan olahraga					100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000				
1 02		Urusan Wajib Kesehatan															
			Kenaikan 10%				33,548,906,449		36,903,797,094		40,594,176,803.29		44,653,594,484		49,118,953,932		
			Prosentase terhadap APBD														
		Dinas Kesehatan					55,888,854,449		62,804,112,547		68,811,727,681.88		75,435,604,302		82,906,855,338		
		Belanja Tidak Langsung					20,564,556,449		22,312,543,747		24,543,798,121.88		26,998,177,934		29,697,995,727		
		Belanja Pegawai					20,564,556,449		22,312,543,747		24,543,798,121.88		26,998,177,934		29,697,995,727		
		Belanja Langsung					35,324,298,000		40,491,568,800		44,267,929,560.00		48,437,426,368		53,208,859,611		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		Daduan		582,498,000	0 aduan	640,747,800	0 aduan	704,827,580.00	0 aduan	1,000,000,000	0 aduan	1,500,000,000	0 aduan	4,428,068,380
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan		126,500,000	0 aduan	389,150,000	0 aduan	153,065,000.00	0 aduan	500,000,000	0 aduan	1,000,000,000	0 aduan	2,168,715,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan		8,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	49,769,000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan		123,175,000	0 aduan	135,492,500	0 aduan	149,041,750.00	0 aduan	163,945,925	0 aduan	180,340,518	0 aduan	751,995,693
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan				10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,005
1 02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn		825,000,000	70, 2 thn	3,000,000,000	70, 3 thn	4,000,000,000.00	70,4 thn	4,320,000,000	70, 5 thn	4,665,600,000	70, 5 thn	16,810,600,000
1 02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn		250,000,000	70, 2 thn	300,000,000	70, 3 thn	330,000,000.00	70,4 thn	363,000,000	70,5 thn	399,300,000	70, 5 thn	1,642,300,000
1 02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn		100,000,000	70, 2 thn	100,000,000	70, 3 thn	110,000,000.00	70,4 thn	121,000,000	70,5 thn	133,100,000	70, 5 thn	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	284,350,000	70,2 thn	307,098,000	70,3 thn	331,665,840.00	70,4 thn	358,199,107	70,5 thn	386,855,036	70,5 thn	1,668,167,983	
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, Prevalensi balita gizi buruk	70,02 thn	70,1 thn	2,051,302,000	70,2 thn	2,217,566,160	70,3 thn	2,394,971,452.80	70,4 thn	2,586,569,169	70,5 thn	2,793,494,703	70,5 thn	12,045,903,484	
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	45,700,000	70,2 thn	60,000,000	70,3 thn	66,000,000.00	70,4 thn	72,600,000	70,5 thn	79,860,000	70,5 thn	324,160,000	
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	70,14%	72,75%	3,800,000,000	74,31%	4,104,000,000	75,84%	4,432,320,000.00	81,45%	4,786,905,600	84,45%	5,169,858,048	84,45%	22,293,083,648	
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	100,000,000	70,2 thn	100,000,000	70,3 thn	110,000,000.00	70,4 thn	121,000,000	70,5 thn	133,100,000	70,5 thn	564,100,000	
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	1,000,000,000	70,2 thn	1,000,000,000	70,3 thn	1,080,000,000.00	70,4 thn	1,166,400,000	70,5 thn	1,259,712,000	70,5 thn	5,506,112,000	
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya (Pendamping DAK)	Jumlah puskesmas (P), puskesmas plus (PP)	12 unit	12 unit	18,000,000,000	1 unit P, 3 unit PP	19,440,000,000	1 unit P, 3 unit PP	20,995,200,000.00	1 unit P, 3 unit PP	22,674,816,000	1 unit P, 3 unit PP	24,488,801,280	16 unit P, 14 PP	105,598,817,280	
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Rumah Sakit (RS), RS tipe C	0	1 Unit	4,000,000,000	50% RS	4,320,000,000	50% RS	4,665,600,000.00	50% RS tipe C	5,038,848,000	50% RS tipe C	5,441,955,840	1 unit RS, 1 unit RS tipe C	10,480,803,840	
1	02	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	2,451,728,000	70,2 thn	2,647,865,240	70,3 thn	2,859,695,539.20	70,4 thn	3,088,471,182	70,5 thn	3,335,548,877	70,5 thn	14,383,309,838	
1	02	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	43 balita	38 balita	100,000,000	32 balita	100,000,000	28 balita	110,000,000.00	25 balita	121,000,000	23 balita	133,100,000	23 balita	564,100,000	
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	100,000,000	70,2 thn	100,000,000	70,3 thn	110,000,000.00	70,4 thn	121,000,000	70,5 thn	133,100,000	70,5 thn	564,100,000	
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	28 bayi	25 bayi	140,000,000	23 bayi	200,000,000	21 bayi	220,000,000.00	19 bayi	242,000,000	17 bayi	266,200,000	17 bayi	1,068,200,000	
1	02		Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	100,000,000	70,2 thn	100,000,000	70,3 thn	110,000,000.00	70,4 thn	121,000,000	70,5 thn	133,100,000	70,5 thn	564,100,000	
1	02		Program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	300,000,000	70,2 thn	324,000,000	70,3 thn	349,920,000.00	70,4 thn	377,913,600	70,5 thn	408,146,688	70,5 thn	1,759,980,288	
1	02		Program Bidang Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	233,975,000	70,2 thn	257,372,500	70,3 thn	283,109,750.00	70,4 thn	311,420,725	70,5 thn	342,562,798	70,5 thn	1,428,440,773	
1	02		Program Penanggulangan masalah kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	490,070,000	70,2 thn	529,275,600	70,3 thn	571,617,648.00	70,4 thn	617,347,060	70,5 thn	666,734,825	70,5 thn	2,875,045,132	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu, KB dan Usia	Angka Usia Harapan Hidup	70,02 thn	70,1 thn	825,000,000	70,2 thn	3,000,000,000	70,3 thn	4,000,000,000.00	70,4 thn	4,320,000,000	70,5 thn	4,665,600,000	70,5 thn	16,810,600,000	
1	03		Urusan Wajib Pekerjaan Umum															
1	03		Urusan Wajib Perumahan															
							134,700,740,365		148,170,814,402		162,987,895,841.65		179,286,585,426		197,215,353,968			
			Dinas Pekerjaan Umum				168,976,043,765		255,894,531,203		288,121,110,323.00		430,871,318,855		428,309,196,341		1,572,172,200,487	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggunjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Belanja Tidak Langsung			2,024,461,938		2,196,541,203		2,416,195,323.00		2,657,814,855		2,923,596,341			
		Belanja Pegawai			2,074,461,938		2,196,541,203		2,416,195,323.00		2,657,814,855		2,923,596,341			
		Belanja Langsung			166,951,581,827		253,697,990,000		285,704,915,000.00		428,213,504,000		425,385,600,000		1,331,954,518,077	
1	03	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	1,250,650,560	0 aduan	1,123,450,000	0 aduan	1,235,795,000.00	0 aduan	905,000,000	0 aduan	905,000,000	0 aduan	5,419,895,560
1	03	02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	132,000,000	0 aduan	416,000,000	0 aduan	159,720,000.00	0 aduan	545,000,000	0 aduan	545,000,000	0 aduan	1,797,720,000
1	03	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS		0 aduan	16,200,000	0 aduan	30,000,000	0 aduan	30,000,000.00	0 aduan	71,600,000	0 aduan	71,600,000	0 aduan	119,400,000
1	03	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	110,000,000	0 aduan	90,000,000	0 aduan	90,000,000.00	0 aduan	125,000,000	0 aduan	125,000,000	0 aduan	540,000,000
1	03	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		0 aduan	10,000,000	0 aduan	10,000,000	0 aduan	10,000,000.00	0 aduan	20,000,000	0 aduan	20,000,000	0 aduan	20,000,000
1	03	07 Program peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan	45%	54%	33,768,895,150	60%	135,751,200,000	66%	136,136,000,000.00	72%	135,450,000,000	80%	135,450,000,000	80%	576,056,095,150
1	03	08 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		15%	20%	8,000,000,000	25%	12,000,000,000	30%	8,000,000,000.00	35%	8,000,000,000	40%	8,000,000,000	40%	44,000,000,000
1	03	15 Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan kabupaten dim kondisi mantap	45%	54%	8,924,429,167	60%	22,734,000,000	66%	44,200,000,000.00	72%	142,500,000,000	80%	140,000,000,000	80%	358,358,429,167
1	03	16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pengurangan jumlah titik genangan	42%	46%	100,000,000	50%	15,528,000,000	56%	16,120,000,000.00	62%	12,700,000,000	75%	12,700,000,000	75%	62,198,000,000
1	03	17 Program pembangunan talud/brompong				310,997,250		2,788,000,000		2,600,000,000.00		4,200,000,000		4,200,000,000		2,600,000,000
1	03	18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan kabupaten dim kondisi mantap	40%	48%	1,899,796,150	56%	8,957,000,000	64%	11,232,000,000.00	72%	5,400,000,000	80%	5,400,000,000	80%	32,888,796,150
1	03	19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/brompong	Pengurangan jumlah titik genangan			0		200,000,000		220,000,000.00						420,000,000
1	03	20 Program inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang di inspeksi	80%		0	80%	225,000,000	80%	220,000,000.00	80%	100,000,000	80%	100,000,000	80%	695,000,000
1	03	22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang di inspeksi	60%		0	60%	300,000,000	75%	400,000,000.00	80%	100,000,000	85%	100,000,000	85%	900,000,000
1	03	23 Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan	Ketersediaan peralatan berat dan laboratorium kebinamargaan	12%	20%	458,000,000	28%	320,000,000	36%	3,100,000,000.00	45%	3,150,000,000	55%	3,150,000,000	55%	10,128,000,000
1	03	24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas yang terlayani air irigasi	48%	51%	4,504,618,050	56%	9,503,000,000	61%	14,820,000,000.00	67%	33,594,000,000	72%	33,594,000,000	72%	96,015,618,050
1	03	25 Program penyediaan dan pengolahan air baku	Penambahan penyediaan air baku	65%	65%	1,000,000,000	68%	1,250,000,000	71%	1,325,000,000.00	74%	550,000,000	79%	550,000,000	79%	4,675,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1 03	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	65%	65%	1,000,000,000	68%	1,080,000,000	71%	1,166,400,000.00	74%	300,000,000	79%	300,000,000	79%	3,846,400,000		
1 03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	65%	65%	4,500,000,000	68%	15,250,000,000	71%	22,650,000,000.00	74%	49,327,904,000	79%	49,000,000,000	79%	140,777,904,000		
1 03	28	Program Pengendalian Banjir	55%	55%	3,500,000,000	59%	3,500,000,000	64%	3,500,000,000.00	69%	10,300,000,000	75%	10,300,000,000	75%	31,100,000,000		
1 03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	44%	52%	3,200,000,000	56%	500,000,000	59%	700,000,000.00	64%	300,000,000	75%	300,000,000	75%	5,000,000,000		
1 03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Prosentasi peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	43%	50%	93,756,000,000	47%	70,872,340,000	51%	16,380,000,000.00	55%	5,400,000,000	60%	5,400,000,000	141,808,340,000		
1 04	31	Program Pengelolaan Persampahan		20%	20%	800,000,000	28%	800,000,000	32%	800,000,000.00	38%	450,000,000	45%	450,000,000	3300,000,000		
1 04	32	Program pengembangan perumahan	Terbangunnya perumahan			10,000,000		20,000,000		60,000,000.00		7,925,000,000		7,925,000,000	90,000,000		
1 04	33	Program lingkungan sehat perumahan	Prosentase keandalan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku			0		150,000,000		200,000,000.00		1,500,000,000		1,500,000,000	3,350,000,000		
1 04	34	Program perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	Jumlah rumah miskin yang direhabilitasi			200,000,000		250,000,000		300,000,000.00		750,000,000		250,000,000	600,000,000		
1 04	35	Program pengelolaan areal pemakaman	Adanya areal pemakaman umum			0		0				100,000,000		100,000,000	200,000,000		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2,823,195,324		2,150,723,448		2,311,595,792.29		3,965,846,622		4,770,336,084	16,021,697,269		
		Belanja Tidak Langsung				1,462,417,924		1,586,723,448		1,745,395,792.29		1,919,935,372		2,111,928,909			
		Belanja Pegawai				1,462,417,924		1,586,723,448		1,745,395,792.29		1,919,935,372		2,111,928,909			
		Belanja Langsung				1,360,777,400		564,000,000		566,200,000.00		2,045,911,250		2,658,407,175			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0aduan	0aduan	264,585,400	0aduan	134,930,500	0aduan	190,182,500.00	0aduan	1,083,232,000	0aduan	1,354,040,000	0aduan	3,026,970,400	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0aduan	0aduan	1,096,192,000	0aduan	117,064,500	0aduan	46,617,500.00	0aduan	51,279,250	0aduan	56,407,175	0aduan	1,367,560,425	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0aduan	0aduan	0	0aduan	10,000,000	0aduan	26,000,000.00	0aduan	28,600,000	0aduan	31,460,000	0aduan	96,060,000	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0aduan	0aduan	0	0aduan	10,000,000	0aduan	10,000,000.00	0aduan	15,000,000	0aduan	30,000,000	0aduan	65,000,000	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	5,000,000	100%	7,500,000	100%	6,000,000.00	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	58,500,000	
		Program Penanganan Darurat	Persentase kegiatan penanganan darurat bencana	100%	100%	15,000,000	100%	29,230,000	100	35,000,000.00	100	40,000,000	100	45,000,000	100	164,230,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Program Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana	Tersedianya dan Terselurnya Bantuan Darurat Bencana	0%	0	0%	0	0.00%		100%	30,000,000	100%	60,000,000	100%	90,000,000	
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	100%	89,500,000	100%	61,580,000	100%	40,000,000.00	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	301,080,000	
		Program Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penanggulangan Bencana	0						2 keg	80,000,000	2 Keg	88,000,000	4 keg	168,000,000	
		Program pemulihan daerah bencana	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemulihan Daerah Bencana	90%	70,825,000	100%	23,050,000	100%	30,000,000.00	100%	233,000,000	100%	366,300,000	100%	673,175,000	
1	04	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	0	100%	170,645,000	1	187,400,000.00	100%	414,800,000	100%	547,200,000	100%	1,315,045,000	
1	05		Urusan Wajib Penataan Ruang													
					3,436,217,728		3,779,839,501		4,157,823,450.88		4,573,605,796		5,030,966,376			
1	06		Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan													
			BAPPE DA		3,498,717,728		8,274,271,235		8,516,098,358.37		7,498,688,194		7,566,557,014		35,354,332,529	
			Belanja Tidak Langsung		1,423,217,728		1,542,021,235		1,696,223,358.37		1,865,845,694		2,052,430,264			
			Belanja Pegawai		1,421,217,728		1,542,021,235		1,696,223,358.37		1,865,845,694		2,052,430,264			
			Belanja Langsung		2,077,500,000		6,732,250,000		6,819,875,000.00		5,632,842,500		5,514,126,750			
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	368,331,500	0 aduan	405,164,650	0 aduan	445,681,115.00	0 aduan	490,249,227	0 aduan	539,274,149	0 aduan	2,248,700,641
		02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	70,000,000	0 aduan	827,000,000	0 aduan	384,700,000.00	0 aduan	423,170,000	0 aduan	465,487,000	0 aduan	2,170,357,000
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS	0 aduan	30,300,000	0 aduan	33,330,000	0 aduan	36,663,000.00	0 aduan	40,329,300	0 aduan	44,362,230	0 aduan	184,984,530
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas			0 aduan	100,000,000	0 aduan	110,000,000.00	0 aduan	121,000,000	0 aduan	133,100,000	0 aduan	464,100,000
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	34,500,000	100%	37,950,000	100%	41,745,000.00	100%	45,919,500	100%	50,511,450	100%	210,625,955
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang pada kawasan strategis kabupaten	1 kegiatan	100,000,000	2 dokumen	1,200,000,000	2 dokumen	1,200,000,000.00	2 dokumen	1,200,000,000	2 dokumen	1,200,000,000	10 dokumen	4,900,000,000
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang	Peta digital seluruh kabupaten			3 kecamatan	500,000,000			4 kecamatan	500,000,000				1,000,000,000

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase pengendalian tata ruang pada kawasan strategis				100,000,000		100,000,000.00		100,000,000		100,000,000		400,000,000		
1	06	15	Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya tingkat penggunaan data/informasi untuk dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan	50%	60%	90,000,000	70%	91,000,000	80	88,200,000.00	85	100,000,000	90	101,000,000	90%	470,200,000	
	06	16	Program Kerjasama pembangunan	Meningkatkan Integritas Pembangunan antar sektor	1 kegiatan	1 kegiatan		50,000,000	1 kegiatan	60,000,000.00	1 kegiatan	65,000,000	1 kegiatan	70,000,000	4 kegiatan	245,000,000		
1	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	jumlah dokumen master plan					1 dok	300,000,000.00						300,000,000		
1	06	18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah dokumen master plan				1 dokumen KSC	1,000,000,000	2 dokumen bisnis & action plan	1,750,000,000.00					2,750,000,000		
		19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Meningkatnya kenyamanan masyarakat perkotaan		Koordinasi Sanitasi	100,000,000	Koordinasi sanitasi, air minum	200,000,000	Koordinasi sanitasi, air minum, drainase	250,000,000.00	Koordinasi sanitasi, air minum, drainase	300,000,000	Koordinasi sanitasi, air minum, drainase	350,000,000	Koordinasi sanitasi, air minum, drainase	1,200,000,000	
		20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	jumlah orang yang mengikuti diklat, bimtek & sosialisasi				115 orang	150,000,000	115 orang	160,000,000.00	115 orang	165,000,000	115 orang	170,000,000	460 orang	645,000,000	
1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	7 dokumen	7 dokumen	1,072,918,468	6 dokumen	1,180,210,315	6 dokumen	1,298,231,346.28	6 dokumen	1,428,054,481	6 dokumen	1,570,859,929	25 dokumen	6,550,274,539	
1	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terkoordinasinya pembangunan ekonomi	30%	50%	98,250,032	70%	108,075,035	70%	118,882,538.72	70%	130,770,793	70%	143,847,872	70%	599,826,270	
1	06	23	Program perencanaan sosial budaya	Terkoordinasinya pembangunan sosial budaya	30%	50%	103,200,000	70%	113,570,000	70%	124,872,000.00	70%	137,359,200	70%	151,095,120	70%	630,046,320	
1	06	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Terkoordinasinya pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	30%	50%	10,000,000	70%	319,000,000	70%	350,900,000.00	70%	385,990,000	70%	424,589,000	70%	1,490,479,000	
1	06	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen masterplan pembangunan daerah rawan bencana				1 dokumen	317,000,000							317,000,000		
1	06	26	Program Pengembangan Kerjasama dengan dunia usaha/swasta dan akademisi/universitas serta lembaga pemerintah/swasta	Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha/swasta dan akademisi/universitas		1	75,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000.00	1	200,000,000	1	260,000,000	5	775,000,000	
1	06	27	Program Inovasi Daerah	Tersedianya sistem inovasi daerah		1	300,000,000					1	350,000,000	1	500,000,000	3	1,150,000,000	
1	07		Urusan Wajib Perhubungan															
1	25		Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika															
							3,036,519,035		3,340,170,939		3,674,188,032.35		4,041,606,836		4,445,767,519			
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2,711,968,535		3,652,773,153		3,315,750,468.27		33,652,475,515		16,015,323,067		59,348,290,738	
			Belanja Tidak Langsung				1,171,519,035		1,271,098,153		1,398,207,968.27		1,538,028,765		1,691,831,642			
			Belanja Pegawai				1,171,519,035		1,271,098,153		1,398,207,968.27		1,538,028,765		1,691,831,642			
			Belanja Langsung				1,540,449,500		2,381,675,000		1,917,542,500.00		32,114,446,750		14,323,491,425			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	630,750,000	0 aduan	693,825,000	0 aduan	763,207,500.00	0 aduan	839,528,250	0 aduan	923,481,075	0 aduan	3,850,791,825
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	363,500,000	0 aduan	399,850,000	0 aduan	439,835,000.00	0 aduan	483,818,500	0 aduan	532,200,350	0 aduan	2,219,203,850
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	50,000,000	0 aduan	50,000,000	0 aduan	50,000,000.00	0 aduan	50,000,000	0 aduan	50,000,000	0 aduan	250,000,000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	50,000,000	0 aduan	50,000,000	0 aduan	70,000,000.00	0 aduan	80,000,000	0 aduan	90,000,000	0 aduan	350,000,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	9,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	55,410,005
1 07	15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	prosentase terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi darat dan laut yang berkualitas				2 dokumen perencanaan	600,000,000								600,000,000
1 07	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase peningkatan tertib lalu lintas dan parkir	100%	100%	300,000,000	100%	310,000,000	100%	320,000,000.00	100%	330,000,000	100%	340,000,000	100%	1,600,000,000
1 07	18	Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan	Tersedianya Terminal Tipe C dan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000,000	1 Terminal dan 1 Pelabuhan	12,000,000,000	1 Terminal	32,000,000,000	
1 07	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase terwujudnya fasilitas lalu lintas sesuai aturan yang berlaku	0 3Paket	104,699,500	3Paket	150,000,000	3Paket	200,000,000.00	3Paket	250,000,000	3Paket	300,000,000	3Paket	3,004,699,500	
1 07	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	terwujudnya gedung pengujian yang efektif	0	0		1 Dok 0 perencanaan	50,000,000			1 Gedung Uji KIR	10,000,000,000	0	0	1 Gedung Uji KIR	10,050,000,000
1 25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	prosentase terwujudnya cell plan menara telekomunikasi yang efektif	100%	100%	25,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000.00	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	255,000,000
1 25	18	Program kerjasama informasi dan media massa	prosentase terwujudnya informasi pemerintah daerah secara menyeluruh	100%	100%	7,500,000	100%	8,000,000	100%	8,500,000.00	100%	9,000,000	100%	9,500,000		42,500,000
1 08		Urusan Wajib Lingkungan Hidup														
					7,943,684,439		8,738,052,883		9,611,858,171.19		10,573,043,988		11,630,348,387			
		Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan			7,883,765,639		8,800,146,880		9,687,261,567.96		10,661,277,725		11,733,065,497			48,765,417,309
		Belanja Tidak Langsung			1,399,688,196		1,518,661,693		1,670,527,861.93		1,837,580,648		2,021,338,713			8,447,797,112
		Belanja Pegawai			1,399,688,196		1,518,661,693		1,670,527,861.93		1,837,580,648		2,021,338,713			8,447,797,112
		Belanja Langsung			6,484,077,443		7,281,485,187		8,016,633,796.03		8,823,697,077		9,711,726,784			45,490,491,055
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	0 aduan	271,100,980	0 aduan	298,221,078	0 aduan	328,032,185.80	0 aduan	360,835,404	0 aduan	396,918,945	0 aduan	1,655,098,593

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	45.000,000	0 aduan	49.500,000	0 aduan	54.450,000.00	0 aduan	59.895,000	0 aduan	65.884,500	0 aduan	274.729,500	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS	0 aduan		0 aduan	20.000,000	0 aduan	22.000,000.00	0 aduan	24.200,000	0 aduan	26.620,000	0 aduan	92.820,000	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	0	0 aduan	60.000,000	0 aduan	66.000,000.00	0 aduan	72.000,000	0 aduan	79.860,000	0 aduan	277.860,000	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	10.000,000	100%	10.000,000	100%	11.000,000.00	100%	12.100,000	100%	13.310,000	100%	56.410,000	
1 08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	38%	1.324.311,500	42%	1.456.747,650		1.602.416,915.00		1.762.658,607		1.938.924,467		8.085.054,139	
1 08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup yang bebas dari pencemaran	10%	1.710.042,020	70%	1.881.046,222	1	2.069.150,844.20	1	2.276.065,929	1	2.503.672,521	100%	10.439.977,536	
1 08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	pengendalian kerusakan lahan	30%	150.420,000	70%	165.462,000	1	182.008,200.00	1	200.209,020	1	220.229,922	100%	6.091.200,000	
1 08	18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	rehabilitasi dan pemulihan cadanganSDA	30%	0	70%	40.000,000	80%	44.000,000.00	90%	48.400,000	100%	53.240,000	100%	185.640,000	
1 08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya prosentase masyarakat yang menerima informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	5%	30.151,000	15%	33.166,100	20%	36.482,710.00	25%	40.130,981	30%	44.144,079	30%	184.074,870	
1 08	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Kendaraan bermotor dan kegiatan usaha yang telah melakukan uji emisi	0	0	100 kendaraan bermotor, 50 industri/pelaku usaha	30.000,000	100 kendaraan bermotor, 50 industri/pelaku usaha	40.000,000.00	100 kendaraan bermotor, 50 industri/pelaku usaha	50.000,000	100 kendaraan bermotor, 50 industri/pelaku usaha	60.000,000	400 kendaraan , 200 pelaku industri.	180.000,000	
1 08	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase ketersediaan RTH Kecamatan	0	2.943.051,943	20%	3.237.357,137	30%	3.561.092,851.03	40%	3.917.202,136	50%	4.308.922,350	50%	17.967.626,417	
1 10		Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil														
					1.693.924,369		1.863.316,806		2.049.648,486.49		2.254.613,335		2.480.074,669			
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			1.693.924,369		2.159.214,940		2.100.136,434.40		2.310.150,078		2.541.165,086		10.804.590,907	
		Belanja Tidak Langsung			1.128.924,369		1.224.882,940		1.347.371,234.40		1.482.108,358		1.630.319,194			
		Belanja Pegawai			1.128.924,369		1.224.882,940		1.347.371,234.40		1.482.108,358		1.630.319,194			
		Belanja Langsung			565.000,000		934.332,000		752.765,200.00		828.041,720		910.845,892			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	191.820,000	0 aduan	211.002,000	0 aduan	232.107,700.00	0 aduan	255.312,420	0 aduan	280.843,662	0 aduan	1.171.080,282	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	75.300,000	0 aduan	332.830,000	0 aduan	91.113,000.00	0 aduan	100.224,300	0 aduan	110.246,730	0 aduan	709.714,030	

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	KBaktif 16.777, Unmetneed 6,67	KBaktif 16.800, Unmetneed 6,6	659,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang sterilnya dibawah 20 thn	446 org	400 org	70.028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi	Jmlh anak, ratio akseptor KB ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	Jmlh anak 2,6; ratio akseptor 0,86; ketersediaan alkon 65%	Jmlh anak 2,5; ratio akseptor 0,87; ketersediaan alkon 70%	100.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya kualitas hidup		Rakerda 300 org, Marganas 6 org	76,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup			20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan PUS	PIK-R Tumbuh=15, Tegak=7, Tegar=3		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	21	Program peningkatan penganggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah penanggulangan korban	operasional 150 penyuluh			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program penggerakan lini lapangan	Rasio PPKBD dan rasio penyuluh	Rasio PKLB=0,15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			program peningkatan sarana prasarana pelayanan kb (DAK)	Sarana dan prasarana yang terbangun	2 unit gedung penyuluh			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			program pengembangan ketahanan keluarga	Cakupan kelompok Tri Bina berKB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			program pengembangan UPPKS	Cakupan kelompok UPPKS peserta KB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program pemanfaatan data dan informasi berbasis teknologi informasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah														
			Urusan Wajib BKKBD		0	0	0										
			Program Pelayanan Adm Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan	0	0	0	12 bin	154,289,000	12 bin	1,555,200,000	12 bin	200,000,000	12 bin	222,000,000	48 bin	2,131,489,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan	0	0	0 5 paket	166,519,000	5 paket	191,000,000	5 paket	229,500,000	5 paket	264,000,000	20 paket	851,019,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS	0	0	0 1 keg	13,500,000	1 keg	16,000,000	1 keg	21,000,000	1 keg	26,000,000	4 keg	76,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0	0	0 1 keg	35,000,000	1 keg	35,000,000	3 keg	105,000,000	3 keg	120,000,000	8 keg	295,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	0	0	0 5 laporan	10,000,000	5 laporan	12,500,000	5 laporan	13,750,000	5 laporan	15,000,000	20 laporan	51,250,000	
	Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Cakupan peserta KB aktif	0	0	0 10 paket	1,122,630,000	15	2,000,000,000	15	2,250,000,000	15	2,500,000,000	55	7,872,630,000	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Tersediannya alat kontrasepsi dan obat side efek	0	0	0 3 paket	455,000,000	4 paket	110,000,000	4 paket	112,500,000	4 paket	115,000,000	15 paket	792,500,000	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	menurunkan jh pernikahan usia dini = 731	0	0	0 88 keg	309,500,000	23	47,000,000	23	66,500,000	22	88,000,000	23	511,000,000	
	Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui klpk kegiatan di masy	Jumlah cakupan peserta KB aktif	0	0	0 48 keg	120,000,000	12	12,000,000	12	24,000,000	12	36,000,000	12	192,000,000	
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Kesehatan Reproduksi remaja	Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Narkoba, PMS,HIV-AIDS	0	0	0 4 kali		1	39,500,000	1	42,000,000	1	45,000,000	1	126,500,000	
	Program Pengembangan Ketahanan Keluarga	Pembentukan Kelompok BKB,BKR,BKL	0	0	0 60 keg	191,250,000	15	25,250,000	15	33,000,000	15	60,000,000	15	309,500,000	
	Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Cakupan kip UPPKS yang ber-KB	0	0	0 160 klpk	277,500,000	160	50,000,000	160	62,500,000	160	75,000,000	160	465,000,000	
	Program Pembinaan PUS	Terlaksananya Pembinaan PUS anggota klpk UPPKS, Tri bina yang ber-KB	0	0	0 48 keg	96,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	36,000,000	12	180,000,000	
	Program Pembinaan Peran Serta masyarakat/Kegiatan KKB	Terlaksananya rapat kerja daerah ttg prog. KKB	0	0	0 2 kali	733,000,000	2	158,000,000	2	180,000,000	2	195,000,000	2	1,266,000,000	
	Program penyusunan rancangan induk penduduk	jh dokumen rancangan induk penduduk	0	0	0 4	60,000,000	4	68,000,000	4	72,000,000	4	80,000,000	4	280,000,000	
	Program pengembangan jejaring kemitraan dim pembangunan KKB	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan strategi pembangunan KKB	0	0	0 8	200,000,000	2	35,000,000	2	45,000,000	2	55,000,000	2	335,000,000	
	Program Pergerakan linl lapangan	Tersediannya Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	0	0	0 886	2,870,900,000	778	1,189,100,000	790	1,322,850,000	790	170,200,000	790	5,553,050,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	0	0	0	98%	234,000,000	98%	318,000,000	98%	370,000,000	98%	425,000,000	98%	1,347,000,000	
	Program peningkatan disiplin aparat	Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	0	0	0	98%	66,520,000	98%	231,800,000	98%	290,000,000	95%	247,000,000	98%	1434.04	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini WTP	0	0	0	100%	14,800,000	100%	14,000,000	100%	15,000,000	100%	18,000,000	100%	61.79	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0	0	0	100%	172,200,000	100%	155,200,000	100%	197,000,000	100%	219,900,000	100%	744300000.00	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0	0	0	100%	127,300,000	100%	123,700,000	100%	137,000,000	100%	149,900,000	100%	537.80	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Prosentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0	0	0	100%	44,900,000	100%	54,900,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	229.75	
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	0	0	0	100%	72,000,000	100%	195,800,000	100%	90,000,000	100%	120,500,000	100%	478300000.00	
1	13	Urusan Wajib Sosial														
1	14	Urusan Wajib Tenaga Kerja														
2	08	Urusan Pilihan Transmigrasi														
					2,324,738,734		2,557,212,607		2,812,933,868.14		3,094,227,255		3,403,649,980			
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2,509,738,734		3,169,343,676		3,173,578,044.03		3,484,135,848		3,831,249,433		16,168,045,736	
		Belanja Tidak Langsung			1,359,738,734		1,475,316,526		1,622,848,179.03		1,785,132,997		1,963,646,297			
		Belanja Pegawai			1,359,738,734		1,475,316,526		1,622,848,179.03		1,785,132,997		1,963,646,297			
		Belanja Langsung			1,150,000,000		1,694,027,150		1,550,729,865.00		1,699,002,852		1,867,603,137			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	341,832,000	0 aduan	376,015,200	0 aduan	413,616,720.00	0 aduan	454,978,392	0 aduan	500,476,231	0 aduan	2,086,918,543	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	33,800,000	0 aduan	387,000,000	0 aduan	35,000,000.00	0 aduan	38,500,000	0 aduan	42,350,000	0 aduan	536,650,000	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	11,250,000	0 aduan	12,375,000	0 aduan	13,612,500.00	0 aduan	14,973,750	0 aduan	16,471,125	0 aduan	68,682,375	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	15,000,000	0 aduan	15,000,000	0 aduan	16,500,000.00	0 aduan	18,150,000	0 aduan	19,965,000	0 aduan	84,615,000	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	7,997,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	54,407,000	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun2017		Tahun2018			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Sumber daya manusia		30org	20,000,000	50 Org	150,000,000	500rg	218,000,000.00	500rg	218,000,000	500rg	218,000,000	500rg	824,000,000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	peningkatan kesejahteraan masyarakat	5 desa	5desa	50,000,000	5 desa	60,000,000	5desa	66,000,000.00	5 desa	72,600,000	5desa	79,860,000	25desa	328,460,000
1	13	19		Program pembinaan pantri asuhan/pantri jompo			1 pantri	20,000,000	1 pantri	20,000,000	1 pantri	22,000,000.00	1 pantri	24,200,000	1pantri	26,620,000	1 pantri	112,820,000
1	13	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	peningkatan kesejahteraan masyarakat		Data Base	20,000,000	10org	48,000,000	10org	52,800,000.00	10org	58,080,000	10org	63,888,000	40org	242,768,000
1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	peningkatan kesejahteraan masyarakat		Data Base	20,000,000	10 kelompok	250,000,000	10 kelompok	300,000,000.00	10 kelompok	345,000,000	10 kelompok	400,000,000	40 kelompok	1,315,000,000
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%)		Data Base	20,000,000		100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		484,100,000
1	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (jiwa)		DataBase	20,000,000		100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		484100000
1	14	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Kelenagkerjaan	Jumlah perusahaan		70 perusahaan	25,320,000	70 perusahaan	27,852,000	70 perusahaan	30,637,200.00	70 perusahaan	33,700,920	70 perusahaan	37,071,012	100%	154,581,132
				Program Keluarga Harapan	peningkatan kesejahteraan masyarakat	1000KK	200KK	29,585,000	200KK	32,543,500	200KK	35,797,850.00	200KK	39,377,635	200KK	43,315,399	2000KK	180,619,384
				Program pengembangan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%)		50 orang	50,219,500	50 orang	55,241,450	50 orang	60,765,595.00	50orang	66,842,155	50orang	73,526,370	250 orang	306,595,069
2	08	16		Program Transmigrasi lokal	peningkatan kesejahteraan masyarakat		1 area	464,996,500	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	55,000,000.00	1 kegiatan	60,500,000	1kegiatan	66,550,000	100%	697,046,500
1	19			Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														
								2,569,815,007		2,826,796,508		3,109,476,158.47		3,420,423,774		3,762,466,152		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				2,714,815,007		2,453,544,283		2,423,898,710.85		2,666,288,582		4,078,892,150		14,337,438,733
				Bekirja Tidak Langsung				1,054,815,007		1,144,474,283		1,258,921,710.85		1,384,813,882		1,523,295,270		
				Belanja Pegawai				1,054,815,007		1,144,474,283		1,258,921,710.85		1,384,813,882		1,523,295,270		
				Belanja Langsung				1,660,000,000		1,309,070,000		1,164,977,000.00		1,281,474,700		2,555,596,880		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0aduan	379,025,000	0aduan	416,927,500	0aduan	458,620,250.00	0aduan	504,482,275	0aduan	554,930,503	0aduan	2,313,985,528
		02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0aduan	11,300,000	0aduan	280,000,000	0aduan	33,000,000.00	0aduan	36,300,000	0aduan	39,930,000	0aduan	400,530,000
		03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	30,000,000	0aduan	33,000,000	0 aduan	36,300,000.00	0aduan	39,930,000	0aduan	43,923,000	0aduan	183,153,000

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun2017		Tahun2018			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	15,000,000	0 aduan	15,000,000	0 aduan	16,500,000.00	0 aduan	18,150,000	0 aduan	19,965,000	0 aduan	84,615,000	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,000	
1	19	16	Program pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	84kasus	50 kasus	320,450,000	40kasus	352,495,000	30kasus	387,744,500.00	20kasus	426,518,950	10kasus	469,170,845	10kasus	1,956,379,795	
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya forum koordinasi dan komunikasi antar umat beragama		100%	25,110,000	100%	27,621,000	100%	30,383,100.00	100%	33,421,410	100%	36,763,551	100%	153,299,061	
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan	Terlaksananya kegiatan forum komunikasi dan semiloka wasasan kebangsaan		100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000.00	100%	24,200,000	100%	26,670,000	100%	112,820,000	
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			100%	12,215,000	100%	13,436,500	100%	14,780,150.00	100%	16,258,165	100%	17,883,982	100%	74,573,797	
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Terlaksananya program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000.00	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	564,100,000	
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya forum diskusi politik masyarakat		100%	36,900,000	100%	40,590,000	100%	44,649,000.00	100%	49,113,900	100%	500,000,000	100%	671,252,900	
			Program Penyelenggaraan Pemilu			100%	700,000,000	100%		100%		100%		100%	700,000,000	100%	1,400,000,000	
			Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
			Satuan Polisi Pamong Praja				2,609,350,548		3,141,995,345		3,146,694,879.04		3,529,864,367		3,806,350,804		16,234,255,942	
			Belanja Tidak Langsung				469,350,548		509,245,345		560,169,879.04		616,186,867		677,805,554			
			Belanja Pegawai				469,350,548		509,245,345		560,169,879.04		616,186,867		677,805,554			
			Belanja Langsung				2,140,000,000		2,632,750,000		2,586,525,000.00		2,913,677,500		3,128,545,250			
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	232,525,000	0 aduan	255,777,500	0 aduan	281,355,250.00	0 aduan	309,490,775	0 aduan	340,439,853	0 aduan	1,419,588,378	
		02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	27,600,000	0 aduan	255,360,000	0 aduan	33,396,000.00	0 aduan	36,735,600	0 aduan	40,409,160	0 aduan	393,500,760	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	12,500,000	0 aduan	70,000,000	0 aduan	15,000,000.00	0 aduan	85,000,000	0 aduan	17,000,000	0 aduan	199,500,000	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	15,000,000	0 aduan	15,000,000	0 aduan	16,500,000.00	0 aduan	18,150,000	0 aduan	19,965,000	0 aduan	84,615,000	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,005	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun2017		Tahun2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	19		16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		1,842,375,000		2,026,612,500		2,229,273,750.00		2,452,201,125		2,697,421,238		11,247,883,613	
				Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
				Dewan Perwakilan Rakyat			5,105,984,924		5,539,993,643		6,178,241,758.04		6,796,065,934		7,475,672,527		31,095,958,786	
				Belanja Tidak Langsung			5,105,984,924		5,539,993,643		6,178,241,758.04		6,796,065,934		7,475,672,527			
				Belanja Pegawai			5,105,984,924		5,616,583,416		6,178,241,758.04		6,796,065,934		7,475,672,527			

			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		323,655,161		351,165,850		391,622,744.81		430,785,019		473,863,521		1,971,092,296		
			Belanja Tidak Langsung		323,655,161		351,165,850		391,622,744.81		430,785,019		473,863,521				
			Belanja Pegawai		323,655,161		356,020,677		391,622,744.81		430,785,019		473,863,521				
			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
			Sekretariat Daerah		37,556,832,168		42,176,939,517		46,441,333,468.46		51,118,466,815		56,456,813,487		233,752,385,465		
			Belanja Tidak Langsung		6,667,075,868		7,233,777,317		7,957,155,048.46		8,752,870,553		9,628,157,609				
			Belanja Pegawai		6,667,075,868		7,233,777,317		7,957,155,048.46		8,752,870,553		9,628,157,609				
			Belanja Langsung		30,889,756,300		34,943,162,200		38,484,178,420.00		42,365,596,262		46,828,655,888				
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	8,284,216,000	0 aduan	9,112,637,600	0 aduan	10,023,901,360.00	0 aduan	11,026,291,496	0 aduan	12,128,920,646	0 aduan		
		02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	6,592,706,300	0 aduan	8,250,000,000	0 aduan	9,075,000,000.00	0 aduan	9,982,500,000	0 aduan	10,980,750,000	0 aduan	44,880,956,300	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	574,955,000	0 aduan	632,450,500	0 aduan	695,695,550.00	0 aduan	765,265,105	0 aduan	841,791,616	0 aduan	3,510,157,771	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	903,180,000	0 aduan	993,498,000	0 aduan	1,092,847,800.00	0 aduan	1,202,132,580	0 aduan	1,322,345,838	0 aduan	5,514,004,218	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	1,151,926,000	100%	1,267,118,600	100%	1,393,830,460.00	100%	1,533,213,506	100%	1,686,534,857	100%	7,032,623,423	
			Program peningkatan operasional KDH/WKDH			1,131,700,000		1,244,870,000		1,369,357,000.00		1,506,292,700		1,656,921,970		6,909,141,670	
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Prosentase peningkatan pelayanan	30%	5,490,064,000	70%	6,039,070,400	1	6,642,977,440.00	1	7,307,275,184	1	8,038,002,702	100%	33,517,389,726	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan			975,678,000		750,000,000		825,000,000.00		907,500,000		998,250,000		4,456,428,000	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	terlaksananya penanganan kasus	30%	97,192,000	50%	190,000,000	1	210,000,000.00	1	230,000,000	1	250,000,000		977,192,000	
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			20,000,000		22,000,000		24,200,000.00		26,620,000		29,282,000		122,102,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program penataan peraturan perundang-undangan				367,036,000		403,739,600		444,113,560.00		488,524,916		537,377,408		2,240,791,484
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				321,968,000		354,164,800		389,581,280.00		428,539,408		471,393,349		1,965,646,837
	Program rapai koordinasi pembangunan				364,528,000		400,980,800		441,078,880.00		485,186,768		533,705,445		2,225,479,893
	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi				387,052,000		425,757,200		468,332,920.00		515,166,212		566,682,833		2,362,991,165
	Program kerjasama informasi dengan mass media				2,780,472,000		3,058,519,200		3,364,371,120.00		3,700,808,232		4,070,889,055		16,975,059,607
	Program Revitalisasi Perlindungan dan Konservasi SDA		30%	50%	269,278,000	70%	460,000,000	1	550,000,000.00	1	640,000,000	1	730,000,000	100%	2,649,278,000
	Program perencanaan pembangunan daerah	tercapainya perencanaan pembangunan	30%	50%	9,300,000	70%	55,000,000	1	60,000,000.00	1	65,000,000	1	275,000,000	100%	464,300,000
	Program penatausahaan administrasi pimpinan				643,400,000		707,740,000		778,514,000.00		856,365,400		942,001,940		3,928,021,340
	Program layanan pengadaan secara elektronik				124,105,000		136,515,500		150,167,050.00		165,183,755		181,702,131		757,673,436
	Program penyediaan jasa kesehatan				401,000,000		441,100,000		485,210,000.00		533,731,000		587,104,100		2,448,145,100
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi						800,000,000		100,000,000.00		100,000,000		100,000,000		1,100,000,000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program pengembangan wilayah perbatasan						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program fasilitasi peningkatan SOM bidang komunikasi dan informasi						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program perencanaan sosial budaya						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Program fasilitasi bimbingan tata cara ibadah haji dan kesehatan jemaah haji						100,000,000		110,000,000.00		121,000,000		133,100,000		
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian														
	Sekretariat DPRD				21,843,122,443		24,327,530,905		25,952,340,726.32		28,316,516,068		30,898,624,245		131,338,134,387
	Belanja Tidak Langsung				2,720,544,128		2,951,790,379		3,246,969,416.77		3,571,666,358		3,928,832,994		
	Belanja Pegawai				2,720,544,128		2,951,790,379		3,246,969,416.77		3,571,666,358		3,928,832,994		

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	peningkatan pendapatan daerah	30%	50%	893,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program pengelolaan Aset Daerah				1,405,775,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program peningkatan penatusahaan keuangan daerah				653,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dinas Pendapatan Daerah		0	0	0										
	Belanja Tidak Langsung		0	0	0										
	Belanja Pegawai		0	0	0										
	Belanja Langsung		0	0	0	2,369,997,500		2,293,194,600.00		2,575,789,600		2,804,547,600		2,804,547,600	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	0	0	0	12 Bulan	248,533,000	12 Bulan	278,245,000.00	12 Bulan	313,950,000	12 Bulan	345,798,000	12 Bulan	345,798,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0	0	0	1 Tahun	685,243,000	1 Tahun	418,125,000.00	1 Tahun	471,875,000	1 Tahun	535,925,000	1 Tahun	535,925,000
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	0	0	0	35 Pasang	108,000,000	35 Pasang	108,000,000.00	35 Pasang	115,000,000	35 Pasang	122,000,000	35 Pasang	122,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	0	0	0	1 Tahun	20,516,600	1 Tahun	23,824,600.00	1 Tahun	27,464,600	1 Tahun	26,824,600	1 Tahun	26,824,600
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	1 Tahun	86,525,000	1 Tahun	108,500,000.00	1 Tahun	124,000,000	1 Tahun	135,500,000	1 Tahun	135,500,000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	terkelolanya Pendapatan Daerah dengan baik	0	0	0	12 bulan	1,221,179,900	12 bulan	1,356,500,000.00	12 bulan	1,523,500,000	12 bulan	1,638,500,000	12 bulan	1,638,500,000
	Badan Pengelola Barang Milik Daerah														
	Belanja Tidak Langsung														
	Belanja Pegawai														
	Belanja Langsung					10,956,941,300		6,788,662,597.00		7,011,500,647		7,557,900,712		7,557,900,712	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	0	0	0	12 Bulan	1,115,941,529	12 Bulan	1,179,500,000.00	12 Bulan	1,957,450,000	12 Bulan	2,153,195,000		2,153,195,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0	0	0	1 tahun	2,300,460,000	1 tahun	1,106,600,000.00	1 tahun	931,260,000	1 tahun	1,024,386,000		1,024,386,000
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur	0	0	0	1 Tahun	64,500,000	1 Tahun	45,000,000.00	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000		55,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0	0	0 1 Tahun	22,500,000	1 Tahun	22,500,000.00	1 Tahun	22,500,000	1 Tahun	22,500,000		22,500,000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	0	0 52 orang	2,429,349,880	52 orang	67,000,000.00	52 orang	70,000,000	52 orang	75,000,000		75,000,000
		Program peningkatan pelaporan Keuangan Daerah		0	0	0 1 tahun	1,112,239,500	1 tahun	893,775,000.00	1 tahun	860,000,000	1 tahun	928,000,000		928,000,000
		Program Pengelolaan Aset		0	0	0 1 tahun	1,212,638,000	1 tahun	1,207,818,535.00	1 tahun	750,000,000	1 tahun	815,000,000		815,000,000
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0	0	0 1 tahun	1,868,499,971	1 tahun	1,657,156,079.00	1 tahun	1,700,000,000	1 tahun	1,760,000,000		1,760,000,000
		Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah		0	0	0 1 tahun	830,812,420	1 tahun	609,312,983.00	1 tahun	670,290,647	1 tahun	724,819,712		724,819,712
1	16	Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah													
		Badan Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Satu Pintu			1,668,025,739		2,687,835,011		3,385,360,269.50		3,711,396,296		4,112,535,926		15,565,153,242
		Belanja Tidak Langsung			1,108,025,739		1,202,207,927		1,322,428,719.50		1,454,671,591		1,600,138,751		
		Belanja Pegawai			1,108,025,739		1,202,207,927		1,322,428,719.50		1,454,671,591		1,600,138,751		
		Belanja Langsung			560,000,000		1,485,627,085		2,062,931,550.00		2,256,724,705		2,512,397,176		
		01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	162,196,895	0 aduan	178,416,585	0 aduan	1,300,000,000.00	0 aduan	1,430,000,000	0 aduan	1,573,000,000	0 aduan	4,643,613,480
		02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	149,855,000	0 aduan	414,840,500	0 aduan	181,324,550.00	0 aduan	199,457,005	0 aduan	219,402,706	0 aduan	1,164,879,761
		03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	6,700,000	0 aduan	7,370,000	0 aduan	8,107,000.00	0 aduan	8,917,700	0 aduan	9,809,470	0 aduan	40,904,170
		05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	35,000,000	0 aduan	35,000,000	0 aduan	38,500,000.00	0 aduan	42,350,000	0 aduan	46,585,000	0 aduan	197,435,000
		06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,000
1	16	15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi (MOU)	2 MDU	122,000,000	3 MDU	350,000,000	3 MDU	375,000,000.00	3 MDU	400,000,000	3 MDU	470,000,000	14 MDU	1,717,000,000
1	16	16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kecepatan pengurusan izin	1 Minggu	30,348,105	1 hari	400,000,000	1 hari	50,000,000.00	1 hari	55,000,000	1 hari	60,500,000	1 hari	595,848,105
1	16	17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah dokumen kajian daerah	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	185,000,000	2 dokumen	203,500,000.00	2 dokumen	223,850,000	2 dokumen	246,235,000	7 dokumen	
1	16	Program pelayanan perikinan industri dan perdagangan	Izin sesuai peruntukkan	30 unit usaha	43,900,000	60 unit usaha	90,000,000	60 unit usaha	99,000,000.00	60 unit usaha	108,900,000	60 unit usaha	119,790,000	270 unit usaha	461,590,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD(2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
		Inspektorat Daerah			5,289,373,179		6,010,972,227		6,303,888,954.18		6,898,442,936		7,549,585,511		32,052,262,817	
		Belanja Tidak Langsung			1,774,373,179		1,925,194,899		2,117,714,389.14		2,329,485,828		2,562,434,411			
		Belanja Pegawai			1,774,373,179		1,925,194,899		2,117,714,389.14		2,329,485,828		2,562,434,411			
		Belanja Langsung			3,515,000,000		4,085,777,328		4,186,174,575.04		4,568,957,108		4,987,151,100			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	1,133,492,000	0 aduan	1,496,841,200	0 aduan	1,371,525,320.00	0 aduan	1,508,677,852	0 aduan	1,659,545,637	0 aduan	2,170,082,009	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	712,934,400	0 aduan	784,227,840	0 aduan	862,650,624.00	0 aduan	948,915,686	0 aduan	1,043,807,255	0 aduan	4,352,535,805	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	50,500,000	0 aduan	55,550,000	0 aduan	61,105,000.00	0 aduan	67,215,500	0 aduan	73,937,050	0 aduan	308,307,550	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan		0 aduan		0 aduan		0 aduan		0 aduan		0 aduan	0	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	77,925,000	100%	85,717,500	100%	94,289,250.00	100%	103,718,175	100%	114,089,993	100%	475,739,918	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah temuan	90 temuan	50 temuan	1,226,133,600	45 temuan	1,324,224,288	40 temuan	1,430,162,231.04	35 temuan	1,544,575,210	30 temuan	1,668,141,226	30 temuan	7,193,236,555
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah peserta diklat	30 Orang	30 Orang	310,000,000	30 Orang	334,800,000	30 Orang	361,584,000.00	30 Orang	390,510,720	30 Orang	421,751,578	30 Orang	1,818,646,298
		Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Jumlah temuan	90 temuan	50 temuan	4,015,000	45 temuan	4,416,500	40 temuan	4,858,150.00	35 temuan	5,343,965	30 temuan	5,878,362	30 temuan	24,511,977
1	21	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
		Badan Kepegawaian Daerah			5,252,562,292		6,085,530,087		6,703,969,895.50		7,387,864,629		8,177,688,655		33,607,615,559	
		Belanja Tidak Langsung			1,477,562,292		1,603,155,087		1,763,470,595.50		1,939,817,655		2,133,799,421			
		Belanja Pegawai			1,477,562,292		1,603,155,087		1,763,470,595.50		1,939,817,655		2,133,799,421			
		Belanja Langsung			3,775,000,000		4,482,375,000		4,940,499,300.00		5,448,046,974		6,043,889,235			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	534,074,500	0 aduan	587,481,950	0 aduan	646,230,145.00	0 aduan	710,853,160	0 aduan	781,938,475	0 aduan	3,260,578,230	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	158,855,000	0 aduan	174,740,500	0 aduan	192,214,550.00	0 aduan	211,436,005	0 aduan	232,579,606	0 aduan	969,825,661	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	30,500,000	0 aduan	33,550,000	0 aduan	36,905,000.00	0 aduan	40,595,500	0 aduan	44,655,050	0 aduan	186,205,550	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	2,437,220,500	0 aduan	2,680,942,550	0 aduan	2,949,036,805.00	0 aduan	3,243,940,485	0 aduan	3,568,334,534	0 aduan	14,879,474,875
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,000
1 21	15	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan pelayanan administrasi	100%	89,850,000	100%	340,000,000	1	395,000,000.00	1	460,000,000	1	570,000,000	100%	1,854,850,000
1 21	16	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%		100%	100,000,000	1	110,000,000.00	1	121,000,000	1	133,100,000	100%	464,100,000
1 21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	100%	514,500,000	100%	555,660,000	1	600,112,800.00	1	648,121,824	1	699,971,570	100%	3,018,366,194
1 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Ratahan			4,099,704,466		4,462,222,346		4,908,444,580.17		5,399,289,038		5,939,217,942		24,808,878,372
		Belanja Tidak Langsung			3,063,504,466		3,323,902,346		3,656,292,580.17		4,021,921,838		4,424,114,022		
		Belanja Pegawai			3,063,504,466		3,323,902,346		3,656,292,580.17		4,021,921,838		4,424,114,022		
		Belanja Langsung			1,036,200,000		1,138,320,000		1,252,152,000.00		1,377,367,200		1,515,103,920		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	112,800,000	0 aduan	124,080,000	0 aduan	136,488,000.00	0 aduan	150,136,800	0 aduan	165,150,480		
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	374,400,000	0 aduan	411,840,000	0 aduan	453,024,000.00	0 aduan	498,326,400	0 aduan	548,159,040		
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000	0 aduan	10,890,000.00	0 aduan	11,979,000	0 aduan	13,176,900		
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000		
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		6,000,000		6,000,000		6,600,000.00		7,260,000		7,986,000		
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			30,000,000		33,000,000		36,300,000.00		39,930,000		43,923,000		183,153,000
		Program peningkatan kelurahan			495,000,000		544,500,000		598,950,000.00		658,845,000		724,729,500		3,022,024,500
1 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Belang			1,557,295,490		1,693,040,607		1,862,344,667.32		2,048,579,134		2,253,437,047		9,414,696,945
		Belanja Tidak Langsung			1,232,295,490		1,337,040,607		1,470,744,667.32		1,617,819,134		1,779,601,047		
		Belanja Pegawai			1,232,295,490		1,337,040,607		1,470,744,667.32		1,617,819,134		1,779,601,047		
		Belanja Langsung			325,000,000		356,000,000		391,600,000.00		430,760,000		473,836,000		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	105,300,000	0 aduan	115,830,000	0 aduan	127,413,000.00	0 aduan	140,154,300	0 aduan	154,169,730	0 aduan	642,867,030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	170,000,000	0 aduan	187,000,000	0 aduan	205,700,000.00	0 aduan	226,270,000	0 aduan	248,897,000	0 aduan	1,037,867,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	9,200,000	0 aduan	10,120,000	0 aduan	11,132,000.00	0 aduan	12,245,200	0 aduan	13,469,720	0 aduan	56,166,920
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			25,500,000		28,050,000		30,855,000.00		33,940,500		37,334,550		155,680,050
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Tombatu			1,270,661,430		1,201,256,573		1,321,382,230.30		1,453,520,453		1,598,872,499		6,845,693,185
		Belanja Tidak Langsung			795,661,430		875,227,573		962,750,330.30		1,059,025,363		1,164,927,900		
		Belanja Pegawai			795,661,430		875,227,573		962,750,330.30		1,059,025,363		1,164,927,900		
		Belanja Langsung			475,000,000		326,029,000		358,631,900.00		394,495,090		433,944,599		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	93,550,000	0 aduan	102,905,000	0 aduan	113,195,500.00	0 aduan	124,515,050	0 aduan	136,966,555	0 aduan	571,132,105
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	313,610,000	0 aduan	150,000,000	0 aduan	165,000,000.00	0 aduan	181,500,000	0 aduan	199,650,000	0 aduan	1,009,760,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	16,000,000	0 aduan	17,600,000	0 aduan	19,360,000.00	0 aduan	21,296,000	0 aduan	23,425,600	0 aduan	97,681,600
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			36,840,000		40,524,000		44,576,400.00		49,034,040		53,937,444		224,911,884
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Touluaan			1,327,295,860		1,458,525,446		1,604,377,990.60		1,764,815,790		1,941,297,369		8,096,312,455
		Belanja Tidak Langsung			1,052,295,860		1,157,525,446		1,273,277,990.60		1,400,605,790		1,540,666,369		
		Belanja Pegawai			1,052,295,860		1,157,525,446		1,273,277,990.60		1,400,605,790		1,540,666,369		
		Belanja Langsung			275,000,000		301,000,000		331,100,000.00		364,210,000		400,631,000		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	115,852,500	0 aduan	127,437,750	0 aduan	140,181,525.00	0 aduan	154,199,678	0 aduan	169,619,645	0 aduan	707,291,098

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	103,200,000	0 aduan	113,520,000	0 aduan	124,872,000.00	0 aduan	137,359,200	0 aduan	151,095,120	0 aduan	630,046,320
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	3,000,000	0 aduan	3,300,000	0 aduan	3,630,000.00	0 aduan	3,993,000	0 aduan	4,392,300	0 aduan	18,315,300
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			37,947,500		41,742,250		45,916,475.00		50,508,123		55,558,935		231,673,282
1	20	Usuran Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian													
		Kecamatan Pusomaen			1,118,742,022		1,229,116,224		1,352,027,846.62		1,487,230,631		1,635,953,694		6,823,070,419
		Belanja Tidak Langsung			843,742,022		928,116,224		1,020,927,846.62		1,123,020,631		1,235,322,694		
		Belanja Pegawai			843,742,022		928,116,224		1,020,927,846.62		1,123,020,631		1,235,322,694		
		Belanja Langsung			275,000,000		301,000,000		331,100,000.00		364,210,000		400,631,000		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	160,056,000	0 aduan	176,061,600	0 aduan	193,667,760.00	0 aduan	213,034,536	0 aduan	234,337,990	0 aduan	977,157,886
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	51,000,000	0 aduan	56,100,000	0 aduan	61,710,000.00	0 aduan	67,881,000	0 aduan	74,669,100	0 aduan	311,360,100
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	12,075,000	0 aduan	13,282,500	0 aduan	14,610,750.00	0 aduan	16,071,825	0 aduan	17,679,008	0 aduan	73,719,083
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			36,869,000		40,555,900		44,611,490.00		49,072,639		53,979,903		225,088,932
1	20	Usuran Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian													
		Kecamatan Ratototok			1,342,924,899		1,476,617,389		1,624,279,127.79		1,786,707,041		1,965,377,745		8,195,906,201
		Belanja Tidak Langsung			1,076,924,899		1,184,617,389		1,303,079,127.79		1,433,387,041		1,576,725,745		
		Belanja Pegawai			1,076,924,899		1,184,617,389		1,303,079,127.79		1,433,387,041		1,576,725,745		
		Belanja Langsung			266,000,000		292,000,000		321,200,000.00		353,320,000		388,652,000		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	96,490,000	0 aduan	106,139,000	0 aduan	116,752,900.00	0 aduan	128,428,190	0 aduan	141,271,009	0 aduan	589,081,099

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	101,250,000	0 aduan	111,375,000	0 aduan	122,512,500.00	0 aduan	134,763,750	0 aduan	148,240,125	0 aduan	618,141,375
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	7,500,000	0 aduan	8,250,000	0 aduan	9,075,000.00	0 aduan	9,982,500	0 aduan	10,980,750	0 aduan	45,788,250
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	14,500,000	0 aduan	15,950,000	0 aduan	17,545,000.00	0 aduan	19,299,500	0 aduan	21,229,450	0 aduan	88,523,950
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			40,260,000		44,286,000		48,714,600.00		53,586,060		58,944,666		245,791,326
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Ratahan Timur			2,483,040,947		10,544,685,042		12,468,453,545.87		6,760,098,900		6,896,108,791		39,152,387,226
		Belanja Tidak Langsung			767,040,947		843,745,042		928,119,545.87		1,020,931,500		1,123,024,651		
		Belanja Pegawai			767,040,947		843,745,042		928,119,545.87		1,020,931,500		1,123,024,651		
		Belanja Langsung			1,716,000,000		9,700,940,000		11,540,334,000.00		5,739,167,400		5,773,084,140		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	85,450,000	0 aduan	93,995,000	0 aduan	103,394,500.00	0 aduan	113,733,950	0 aduan	125,107,345	0 aduan	521,680,795
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	1,574,600,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	2,671,100,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	2,000,000	0 aduan	2,200,000	0 aduan	2,420,000.00	0 aduan	2,662,000	0 aduan	2,928,200	0 aduan	12,210,200
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	10,000,000	0 aduan	11,000,000	0 aduan	12,100,000.00	0 aduan	13,310,000	0 aduan	14,641,000	0 aduan	61,051,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			37,950,000		41,745,000		45,919,500.00		50,511,450		55,562,595		231,688,545
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Tombatu Timur			1,721,778,572		1,585,396,429		1,233,936,072.12		1,357,329,679		1,493,062,647		7,391,503,400
		Belanja Tidak Langsung			746,778,572		821,456,429		903,602,072.12		993,962,279		1,093,358,507		
		Belanja Pegawai			746,778,572		821,456,429		903,602,072.12		993,962,279		1,093,358,507		
		Belanja Langsung			975,000,000		763,940,000		330,334,000.00		363,367,400		399,704,140		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	101,400,000	0 aduan	111,540,000	0 aduan	122,694,000.00	0 aduan	134,963,400	0 aduan	148,459,740	0 aduan	619,057,140

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik: Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	824,600,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	1,921,100,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	2,800,000	0 aduan	3,080,000	0 aduan	3,388,000.00	0 aduan	3,726,800	0 aduan	4,099,480	0 aduan	17,094,280
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			31,200,000		34,320,000		37,752,000.00		41,527,200		45,679,920		190,479,120
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Tombatu Utara													
		Belanja Tidak Langsung			710,544,908		781,599,399		859,759,338.68		945,735,273		1,040,308,800		
		Belanja Pegawai			710,544,908		781,599,399		859,759,338.68		945,735,273		1,040,308,800		
		Belanja Langsung													
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	169,080,000	0 aduan	185,988,000	0 aduan	204,586,800.00	0 aduan	225,045,480	0 aduan	247,550,028	0 aduan	1,032,250,308
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	760,500,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	1,857,000,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	6,750,000	0 aduan	7,425,000	0 aduan	8,167,500.00	0 aduan	8,984,250	0 aduan	9,882,675	0 aduan	41,209,425
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			23,670,000		26,037,000		28,640,700.00		31,504,770		34,655,247		144,507,717
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Silian Raya			1,876,391,041		1,758,070,145		1,423,877,159.61		1,566,264,876		1,722,891,363		8,347,494,584
		Belanja Tidak Langsung			894,391,041		983,830,145		1,082,213,159.61		1,190,434,476		1,309,477,923		
		Belanja Pegawai			894,391,041		983,830,145		1,082,213,159.61		1,190,434,476		1,309,477,923		
		Belanja Langsung			982,000,000		774,240,000		341,664,000.00		375,830,400		413,413,440		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	96,900,000	0 aduan	106,590,000	0 aduan	117,249,000.00	0 aduan	128,973,900	0 aduan	141,871,290	0 aduan	591,584,190

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	821,610,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	1,918,100,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	7,000,000	0 aduan	7,000,000	0 aduan	7,700,000.00	0 aduan	8,470,000	0 aduan	9,317,000	0 aduan	39,487,000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			41,500,000		45,650,000		50,215,000.00		55,236,500		60,760,150		253,361,650
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Toulouan Selatan			1,656,769,185		1,520,695,104		1,162,764,613.85		1,279,041,075		1,406,945,183		7,026,215,160
		Belanja Tidak Langsung			681,769,185		749,946,104		824,940,713.85		907,434,785		998,178,264		
		Belanja Pegawai			681,769,185		749,946,104		824,940,713.85		907,434,785		998,178,264		
		Belanja Langsung			975,000,000		770,749,000		337,823,900.00		371,606,290		408,766,919		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	95,563,000	0 aduan	105,119,300	0 aduan	115,631,230.00	0 aduan	127,194,353	0 aduan	139,913,788	0 aduan	583,421,671
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	818,410,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	1,914,910,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	16,000,000	0 aduan	17,600,000	0 aduan	19,360,000.00	0 aduan	21,296,000	0 aduan	23,425,600	0 aduan	97,681,600
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			30,027,000		33,029,700		36,332,670.00		39,965,937		43,962,531		183,317,838
1	20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
		Kecamatan Pasan			2,065,192,743		2,024,312,017		1,716,743,219.03		1,888,417,541		2,077,259,295		9,771,924,815
		Belanja Tidak Langsung			1,090,192,743		1,199,212,017		1,319,133,219.03		1,451,046,541		1,596,151,195		
		Belanja Pegawai			1,090,192,743		1,199,212,017		1,319,133,219.03		1,451,046,541		1,596,151,195		
		Belanja Langsung			975,000,000		825,100,000		397,610,000.00		437,371,000		481,108,100		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	148,650,000	0 aduan	163,515,000	0 aduan	179,866,500.00	0 aduan	197,853,150	0 aduan	217,638,465	0 aduan	907,523,115

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	769,000,000	0 aduan	600,000,000	0 aduan	150,000,000.00	0 aduan	165,000,000	0 aduan	181,500,000	0 aduan	1,865,500,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	8,000,000	0 aduan	8,800,000	0 aduan	9,680,000.00	0 aduan	10,648,000	0 aduan	11,712,800	0 aduan	48,840,800
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000.00	0 aduan	10,890,000	0 aduan	11,979,000	0 aduan	50,769,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000.00	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	33,846,000
		Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa			34,350,000		37,785,000		41,563,500.00		45,719,850		50,291,835		209,710,185
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandikan													
		Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri			718,293,075		800,122,383		880,134,620.75		968,148,083		1,064,962,891		4,431,661,052
		Belanja Tidak Langsung			353,293,075		388,622,383		427,484,620.75		470,233,083		517,256,391		
		Belanja Pegawai			353,293,075		388,622,383		427,484,620.75		470,233,083		517,256,391		
		Belanja Langsung			365,000,000		411,500,000		452,650,000.00		497,915,000		547,706,500		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	221,000,000	0 aduan	243,100,000	0 aduan	267,410,000.00	0 aduan	294,151,000	0 aduan	323,566,100	0 aduan	1,349,227,100
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	0 aduan	27,900,000	0 aduan	30,690,000	0 aduan	33,759,000.00	0 aduan	37,134,900	0 aduan	40,848,390	0 aduan	170,332,290
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS	0 aduan	8,250,000	0 aduan	9,075,000	0 aduan	9,982,500.00	0 aduan	10,980,750	0 aduan	12,078,825	0 aduan	50,367,075
	05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	20,000,000	0 aduan	22,000,000	0 aduan	24,200,000.00	0 aduan	26,620,000	0 aduan	29,282,000	0 aduan	122,102,000
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	46,410,000
1 18	20	Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	Jumlah cabang yang dibina	5 cabang	51,300,000	5 cabang	56,430,000	5 cabang	62,073,000.00	5 cabang	68,280,300	5 cabang	75,108,330	5 cabang	313,191,630
1 21	17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah PNS yang mendapat bantuan hukum		36,550,000		40,205,000		44,225,500.00		48,648,050		53,512,855		223,141,405
		Urusan Wajib Ketahanan Pangan													
		Kantor Ketahanan Pangan			1,136,592,480		1,679,423,341		1,882,578,174.88		2,111,330,367		2,369,031,936		9,178,956,299
		Belanja Tidak Langsung			591,592,480		641,877,841		706,065,624.88		776,672,187		854,339,406		
		Belanja Pegawai			591,592,480		641,877,841		706,065,624.88		776,672,187		854,339,406		
		Belanja Langsung			545,000,000		1,037,545,500		1,176,512,550.00		1,334,658,180		1,514,692,530		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	263,035,000	0 aduan	289,338,500	0 aduan	318,272,350.00	0 aduan	350,099,585	0 aduan	385,109,544	0 aduan	1,605,854,979
02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	8,500,000	0 aduan	9,350,000	0 aduan	10,285,000.00	0 aduan	11,313,500	0 aduan	12,444,850	0 aduan	51,893,350
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	13,250,000	0 aduan	14,575,000	0 aduan	16,032,500.00	0 aduan	17,635,750	0 aduan	19,399,325	0 aduan	80,892,575
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	9,120,000	0 aduan	10,032,000	0 aduan	11,035,200.00	0 aduan	12,138,720	0 aduan	13,352,592	0 aduan	55,678,512
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/lahun sesuai peraturan perundangan		100%	942,500	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	47,352,500
	Program Peningkatan deversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	789	82	188,402,500	83	606,500,000	85	697,475,000.00	87	802,096,250	90	922,410,688	90	3,216,864,438
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk blahan lokal			61,750,000	1	97,750,000	1	112,412,500.00	1	129,274,375	1	148,665,532	4	549,852,407
	Badan Ketahanan Pangan						2,541,025,591		2,169,900,060		3,243,831,788		3,651,897,946		3,651,897,946
	Belanja Tidak Langsung						641,877,841		706,065,624.88		776,672,187		854,339,406		854,339,406
	Belanja Pegawai						641,877,841		706,065,624.88		776,672,187		854,339,406		854,339,406
	Belanja Langsung						1,899,147,750		1,463,834,435.00		2,467,159,600		2,797,558,540		2,797,558,540
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur	0	0	0	12 Bulan	151,407,250	12 Bulan	269,434,435.00	12 Bulan	309,849,600	12 Bulan	356,327,040	12 Bulan	356,327,040
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	1 Tahun	89,950,000	1 Tahun	197,150,000.00	1 Tahun	226,722,500	1 Tahun	260,730,875	1 Tahun	260,730,875
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	0	0	0	1 Tahun	26,400,000	1 Tahun	24,150,000.00	1 Tahun	27,772,500	1 Tahun	31,938,375	1 Tahun	31,938,375
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	0	0	0	1 Tahun	0	1 Tahun	9,000,000.00	1 Tahun	10,350,000	1 Tahun	11,902,500	1 Tahun	11,902,500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersedia	0	0	0	4 dok	1,100,000	4 dok	8,000,000.00	4 dok	9,200,000	4 dok	10,580,000	4 dok	10,580,000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	0	0	12 Kec, 144 desa, 20 Jenis	119,195,000	12 Kec, 144 desa, 20 Jenis	145,000,000.00	12 Kec, 144 desa, 20 Jenis	166,750,000	12 Kec, 144 desa, 20 Jenis	191,762,500	12 Kec, 144 desa, 20 Jenis	191,762,500	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun2017		Tahun2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama; Ketersediaan Regulasi Tentang Pangan	0	0	0	12 Kec	1,511,095,500	12 Kec	811,100,000.00	12Kec	1,716,515,000	12 Kec	1,934,317,250	12 Kec	1,934,317,250
1	22			Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa														
				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa														
				Belanja Tidak Langsung														
				Belanja Pegawai														
				Belanja Langsung														
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0aduan	166,962,500	0aduan	166,880,000	0aduan	317,772,000.00	0aduan	417,000,000	0aduan	458,700,000	0aduan	1,527,314,500
			02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0aduan	103,050,000	0aduan	62,789,000	0aduan	144,500,000.00	0aduan	258,000,000	0aduan	283,800,000	0aduan	852,139,000
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0aduan	0	0aduan	10,000,000	0aduan	37,500,000.00	0aduan	60,000,000	0aduan	66,000,000	0aduan	173,500,000
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0aduan	0	0aduan	0	0aduan	40,000,000.00	0aduan	45,000,000	0aduan	49,500,000	0aduan	134,500,000
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			1,800,000	100%	3,335,000	100%	5,000,000.00	100%	12,000,000	100%	13,200,000	100%	35,335,000
1	22		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa		TTG, Musrenban gdes	155,362,500	TTG, Musrenban gdes, sosialisasi Perdes, penataan desa	204,959,000	TTG, Musrenban gdes, sosialisasi Perdes, penataan desa	129,115,000.00	TTG, Musrenban gdes, sosialisasi Perdes, penataan desa	1,210,000,000	TTG, Musrenban gdes, sosialisasi Perdes, penataan desa	1,331,000,000	TTG, Musrenban gdes, sosialisasi Perdes, penataan desa	3,030,436,500
1	22		16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	peningkatan keterampilan manajemen badan usaha milik desa			0		45,835,000	3 kelas pembinaan BUM Des		3kelas pembinaan BUM Des	360,000,000	3 kelas pembinaan BUM Des	300,000,000	12 kelas pembinaan BUMDes	705,835,000
1	22		17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlombaan desa		lomba desa	38,400,000	1 lomba desa, 4 pembinaan organisasi desa	45,786,000	1 lomba desa, 4 pembinaan organisasi desa	98,360,000.00	1lomba desa, 4 pembinaan organisasi desa	580,000,000	1 lomba desa, 4 pembinaan organisasi desa	638,000,000	5lomba desa, 4 pembinaan organisasi desa	1,400,546,000
1	22		18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa		1 keg	19,662,000	135 orang	1,149,370,000	135 orang	787,683,000.00	135 orang	2,267,000,000	135 orang	2,493,700,000	540orang	6,717,415,000

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		Dinas Pertanian dan Peternakan.			9,094,988,447		11,552,172,703		13,117,915,345,05		14,437,994,281		15,857,944,103		64,061,014,879
		Belanja Tidak Langsung			1,428,119,262		1,549,509,399		1,704,460,339,20		1,874,906,373		2,062,397,010		
		Belanja Pegawai			1,428,119,262		1,549,509,399		1,704,460,339,20		1,874,906,373		2,062,397,010		
		Belanja Langsung			7,666,869,185		10,002,663,304		11,413,455,005,85		12,563,087,908		13,795,547,093		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	332,780,185	0 aduan	366,058,204	0 aduan	402,664,023,85	0 aduan	442,930,426	0 aduan	487,223,469	0 aduan	2,031,656,307
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	121,416,000	0 aduan	383,557,600	0 aduan	146,913,310,00	0 aduan	161,604,696	0 aduan	177,765,166	0 aduan	991,256,822
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	0 aduan	27,900,000	0 aduan	30,690,000	0 aduan	31,759,000,00	0 aduan	37,134,900	0 aduan	40,848,390	0 aduan	170,332,290
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	6,425,000	0 aduan	7,067,500	0 aduan	7,774,250,00	0 aduan	8,551,675	0 aduan	9,406,843	0 aduan	39,225,268
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	9,000,000	100%	9,900,000	100%	10,890,000,00	100%	11,979,000	100%	13,176,900	100%	54,945,905
2	01	15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan yang diberikan	150 petani meningkat kesejahtera annya, 1 kopitan naik kelas.		150 petani meningkat kesejahtera annya, 1 kopitan naik kelas.	150,095,300	150 petani meningkat kesejahtera annya, 1 kopitan naik kelas.	165,104,830,00	150 petani meningkat kesejahtera annya, 1 kopitan naik kelas.	181,615,313	150 petani meningkat kesejahtera annya, 1 kopitan naik kelas.	199,776,844	600 petani meningkat kesejahtera annya, 4 kopitan naik kelas.	696,592,287
2	01	16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	86.263 ton tanaman pangan, 1.783,63 ton hortikultura	92.757 ton tanaman pangan, 6.992 ton hortikultura	95.432 ton tanaman pangan, 11.882 ton hortikultura	6.178.125,000	98.537 ton tanaman pangan, 18.559 ton hortikultura	7.206.165.000,00	100.893 ton tanaman pangan, 25.885 ton hortikultura	7.782.658,200	102.940 ton tanaman pangan, 32.544 ton hortikultura	8.405.270,856	102.940 ton tanaman pangan, 32.544 ton hortikultura	36.244.594,056
2	01	17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	7 transaksi	163.030.000	7 transaksi	176.072.400	7 transaksi	190.158.192.00	7 transaksi	205.370.847	7 transaksi	221.800.515	35 transaksi	956.431.955
2	01	18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	5 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	21 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	11 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	23.690.000	6 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	165.275.000,00	6 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	181.802.500	6 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	199.982.750	31 kelompok petani memahami teknologi budidaya.	721.000.250
2	01	19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	162.300.000	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	175.284.000	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	204.451.258	86.263 ton tanaman pangan, 92.757 ton hortikultura	220.807,358	431.315 ton tanaman pangan, 463.785 ton hortikultura	952.149.336

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunya penularan penyakit menular		12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	455,153,000	12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	500,668,300	12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	550,735,130.00	12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	605,808,643	12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	666,389,507	12.000 ekor anjing/kucing divaksin, 9.470 ternak diobati	2,778,754,580	
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	2.381,5 ton hasil ternak	3.068,5 ton hasil ternak	150,100,000	3.271 ton hasil ternak	1.000,000,000	3.491,6 ton hasil ternak	1.100,000,000.00	3.730,1 ton hasil ternak	1.210,000,000	3.977,8 ton hasil ternak	1.331,000,000	3.977,8 ton hasil ternak	4,791,100,000	
2	01	22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan		4 transaksi	36,950,000	4 transaksi	40,645,000	4 transaksi	44,709,500.00	4 transaksi	49,180,450	4 transaksi	54,098,495	4 transaksi	225,583,445	
2	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok yang memahami teknologi peternakan	5kelompok	3kelompok		3kelompok	140,000,000	3kelompok	150,000,000.00	3kelompok	165,000,000	3kelompok	181,500,000	17kelompok	636,500,000	
			Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan							200,000,000.00		220,000,000		242,000,000		662,000,000	
			Program peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran dan ekspor hasil pertanian	Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pemasaran dan ekspor hasil pertanian							150,000,000.00		165,000,000		181,500,000		496,500,000	
			Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan	meningkatnya produksi dan laju produksi hortikultura							300,000,000.00		330,000,000		363,000,000		993,000,000	
			Program pembangunan kawasan peternakan						100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000			
			Program pembangunan kawasan tanaman hortikultura						100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000			
2	01		Urusan Pilihan Pertanian															
2	01	02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan				4,458,558,637		5,152,696,121		5,392,965,733.26		5,932,262,307		6,525,488,537		27,461,971,335	
			Belanja Tidak Langsung				2,614,558,637		2,836,796,121		3,120,475,733.26		3,432,523,307		3,775,775,637			
			Belanja Pegawai				2,614,558,637		2,836,796,121		3,120,475,733.26		3,432,523,307		3,775,775,637			
			Belanja Langsung				1,844,000,000		2,315,900,000		2,272,490,000.00		2,499,739,000		2,749,712,900			
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0aduan	316,713,500	0aduan	348,384,850	0aduan	383,223,335.00	0aduan	421,545,669	0aduan	463,700,235	0aduan	1,933,567,589	
		02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0aduan	38,250,000	0aduan	292,075,000	0aduan	46,282,500.00	0aduan	50,910,750	0aduan	56,001,825	0aduan	483,520,075	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0aduan	18,800,000	0aduan	20,680,000	0aduan	22,748,000.00	0aduan	25,022,800	0aduan	27,525,080	0aduan	114,775,880	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0aduan	15,000,000	0aduan	15,000,000	0aduan	16,500,000.00	0aduan	18,150,000	0aduan	19,965,000	0aduan	84,615,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			9,000,000	100%	9,900,000	100%	10,890,000.00	100%	11,979,000	100%	13,176,900	100%	54,945,900
		Program peningkatan kesejahteraan petani/peternak			268,513,000		295,364,300		324,900,730.00		357,390,803		393,129,883		1,639,298,716
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			32,350,000		35,585,000		39,141,500.00		43,057,850		47,363,635		197,499,985
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			100,000,000		110,000,000		121,000,000.00		133,100,000		146,410,000		610,510,000
2	01	20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			641,497,000		705,646,700		776,211,370.00		853,832,507		939,715,758		3,916,403,335
		Program pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan			48,876,500		53,764,150		59,140,565.00		65,054,622		71,560,084		298,395,920
2	02	17 Pelestarian dan konservasi sumber daya hutan					50,000,000		55,000,000.00		60,500,000		66,550,000		
2	05	22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	7 penyuluh		180,000,000	7 Penyuluh	198,000,000	8 Penyuluh	217,800,000.00	8 Penyuluh	239,580,000	8 Penyuluh	263,538,000	38 Penyuluh	
2	05	22 Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan			175,000,000		181,500,000		199,650,000.00		219,615,000		241,576,500		1,017,341,500
		Program pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.					889,000,000		977,900,000.00		1,075,690,000		1,183,259,000		4,125,849,000
		Program pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.					905,000,000		995,500,000.00		1,095,050,000		1,204,555,000		4,200,105,000
		Program pemberdayaan pelaku utama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.					295,000,000		324,500,000.00		356,950,000		392,645,000		1,369,095,000
		Peningkatan penyelenggaraan dan pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan.					331,000,000		364,100,000.00		400,510,000		440,561,000		1,536,171,000
2	02	Urusan Pilihan Kehutanan													
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan			5,708,960,312		6,612,793,675		7,435,935,002.36		7,243,758,655		7,895,651,563		34,897,099,206
		Belanja Tidak Langsung			2,374,421,222		2,576,247,026		2,833,871,728.46		3,117,258,901		3,428,984,791		
		Belanja Pegawai			2,374,421,222		2,576,247,026		2,833,871,728.46		3,117,258,901		3,428,984,791		
		Belanja Langsung			3,334,539,090		4,036,546,649		4,602,063,273.90		4,126,499,753		4,466,666,771		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	362,646,590	0 aduan	398,911,749	0 aduan	438,802,373.90	0 aduan	482,682,611	0 aduan	530,950,872	0 aduan	2,213,993,697	
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	174,620,000	0 aduan	387,082,000	0 aduan	150,790,200.00	0 aduan	165,869,220	0 aduan	182,456,142	0 aduan	1,010,817,562	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dan insi PNS	0 aduan	40,050,000	0 aduan	44,055,000	0 aduan	48,460,500.00	0 aduan	53,306,550	0 aduan	58,637,205	0 aduan	244,509,255	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	15,000,000	0 aduan	15,000,000	0 aduan	16,500,000.00	0 aduan	18,150,000	0 aduan	19,965,000	0 aduan	84,615,000	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Catupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan: laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,110,000	100%	56,410,005	
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya kasus bencana tanah longsor, banjir, kekeringan mata air	400ha	1,104,015,000	300 ha	750,000,000	200ha	500,000,000.00	150 ha	300,000,000	100ha	200,000,000	1,150 ha	2,854,015,000
			Program usaha Hutan tanaman	Peningkatan perekonomian masyarakat pengelola hasil hutan kayu dan non kayu, terpeliharanya kelestarian hutan dan lingkungan	30ha	20,000,000	30 ha	100,000,000	30 ha	110,000,000.00	30 ha	121,000,000	30 ha	133,100,000	120ha	484,100,000
			Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	Terjaganya keutuhan kawasan hutan	96kali patroli	20,000,000	96kali patroli	172,000,000	96kali patroli	200,000,000.00	96 kali patroli	225,000,000	96 kali patroli	260,000,000	384 kali patroli	877,000,000
			Program Peningkatan Kelembagaan Petani Hutan	Meningkatnya permintaan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta daya saing dan daya jual yang tinggi	40 kelompok	85,000,000	40 kelompok	100,000,000	40 kelompok	110,000,000.00	40 kelompok	120,000,000	40 kelompok	135,000,000	200 kelompok	550,000,000
		23	Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk, meningkatnya daya jual, daya saing komoditi perkebunan	23000bibit kelapa	231,000,000	23000 bibit kelapa	254,100,000	23000 bibit kelapa	279,510,000.00	23000 bibit kelapa	307,461,000	23000 bibit kelapa	338,207,100	115000 bibit kelapa	1,410,278,100
		27	Program pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	5unit endaraan rodadu	294,404,000			1 unit kendaraan patroli roda empat	300,000,000.00					594,404,000	
		29	Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.	Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai	100 ha	120,000,000	100ha	132,000,000	100ha	145,200,000.00	100ha	159,720,000	100 ha	175,692,000	500 ha	732,612,000
		30	Program pengukuhan kawasan hutan	Penegasan Batas Kawasan Hutan	5km	70,880,000	5km	77,968,000	5 km	85,764,800.00	5km	94,341,280	5 km	103,775,408	25km	432,729,488
		31	Program rencana makro kawasan hutan	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan yang baik	1 dokumen	88,696,000	1 dokumen	97,565,600	1 dokumen	107,322,160.00	1 dokumen	118,054,376	1 dokumen	129,859,814	5 dokumen	541,497,950

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun 2017		Tahun2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	32	Program peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan		15ijin	40,132,000	15ijin	44,145,200	15 ijin	48,559,720.00	15ijin	53,415,692	15 ijin	58,757,261	75ijin	245,009,873	
	35	Program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan			565,000,000		621,500,000		683,650,000.00		752,015,000		827,216,500		3,449,381,500	
	21	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			43,095,500	2kali	52,000,000	3kali	97,240,000.00	4kali	118,000,000	Skali	140,000,000		450,335,500	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			50,000,000	13 unit mesin pengolahan minyak kelapa	442,694,600	16 unit	556,233,520.00	20unit	69,748,024	25 unit	84,976,269		1,203,652,413	
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			50,000,000	95ha	337,525,000	180 ha	713,030,000.00	230 ha	955,636,000	300ha	1,074,763,200		3,130,954,200	
2	03	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral														
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			4,573,020,269		2,645,818,647		7,033,810,163.10		3,162,541,180		10,350,905,298		27,766,095,557	
		Belanja Tidak Langsung			1,107,242,469		1,201,358,079		1,321,493,886.75		1,453,643,275		1,599,007,603			
		Belanja Pegawai			1,107,242,469		1,201,358,079		1,321,493,886.75		1,453,643,275		1,599,007,603			
		Belanja Langsung			3,465,777,800		1,444,460,569		5,712,316,276.35		1,708,897,904		8,751,897,695			
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	0 aduan	0 aduan	239,133,835	0 aduan	263,047,219	0 aduan	289,351,940.35	0 aduan	318,287,134	0 aduan	350,115,848	0 aduan	1,459,935,976
	02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	134,889,400	0 aduan	330,730,760	0 aduan	88,803,836.00	0 aduan	97,684,220	0 aduan	107,452,642	0 aduan	759,560,858
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	6,750,000	0 aduan	7,425,000	0 aduan	8,167,500.00	0 aduan	8,984,250	0 aduan	9,882,675	0 aduan	41,209,425
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	53,300,000	0 aduan	58,630,000	0 aduan	64,493,000.00	0 aduan	70,942,300	0 aduan	78,036,530	0 aduan	325,401,830
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,000
2	03	15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya jumlah aparat yang berkompentensi di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam	20%					100%	100,000,000.00	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	450,000,000
		Program pembinaan bidang pertambangan	Meningkatnya persentase pelaku usaha pertambangan yang memahami sistem dan prosedur izin usaha pertambangan		100%	23,536,900	100%	25,890,590			0	0		0	118,004,642,174	
		Program Pengawasan	Terciptanya pengelolaan usaha jasa pertambangan yang taat hukum		100%	41,302,500	100%	32,633,000				0		0	73,231,761,449	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggunjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							Tahun 2014		Tahun2015		Tahun2016		Tahun 2017		Tahun2018			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2	03	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Tersedianya data seluruh keegiatan pertambangan					6.99%	123,000,000.00	10.49%	180,900,000	13.99%	240,600,000	66.43%	544,500.000		
			Program pengembangan kawasan pertambangan galian C	Tersedianya dokumen potensi pertambangan galian C			15%	100,000,000	30%	200,000,000.00	45%	300,000,000	10%	400,000.000	100%	1.000,000,000		
2	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		1150	1250		1300	100,000,000	1300	4,000,000,000.00	1300	100,000,000	1300	5,000,000,000	7600	9.200,000.000	
			Program Pengembangan Energi Terbarukan						36%	240,000,000.00	35%	380,000,000	30%	710,000,000	200%	1.330.000000		
			Program Energi dan Kelistrikan	Meningkatnya akurasi data kebutuhan energi, BBM dan LPG			2.925,269,165		66,104,000.00									
			Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral	Tersedianya data informasi geologi Kabupaten Minahasa Tenggara				20%	375,000,000	30%	587,500,000.00	10%	90,000,000	40%	1,642,500.000	100%	2,695,000,000	
			Program Geologi	Meningkatnya persentase akurasi data rawan bencana dan potensi tambang			31,596.000		75,000,000				0		0	30,003,380,725		
2	04		Urusan Pilihan Pariwisata															
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				4,914,478,178		5,198,245,673		5,707,570,240.44		6,518,327,264		7,380,159,991		29,713,781,347	
			Belanja Tidak Langsung				1,558,928,178		1,691,437,073		1,860,580,780.44		2,046,638,858		2,251,302,744			
			Belanja Pegawai				1,558,928,178		1,691,437,073		1,860,580,780.44		2,046,638,858		2,251,302,744			
			Belanja Langsung				3,355,550,000		3,501,808,600		3,846,989,460.00		4,471,688,406		5,128,857,247			
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	231,753,000	0 aduan	254,928,300	0 aduan	280,421,130.00	0 aduan	308,463,243	0 aduan	339,309,567	0 aduan	1,414,875,240	
		02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	1,500,000,000	0 aduan	400,000,000	0 aduan	165,000,000.00	0 aduan	181,500,000	0 aduan	199,650,000	0 aduan	2,446,150,000	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	9,000,000	0 aduan	9,900,000	0 aduan	10,890,000.00	0 aduan	11,979,000	0 aduan	13,176,900	0 aduan	54,945,900	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	15,000,000	0 aduan	15,000,000	0 aduan	16,500,000.00	0 aduan	18,150,000	0 aduan	19,965,000	0 aduan	84,615,000	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	56,410,005	
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan regional	10.000org	20.000org	119,576,000	25.000org	131,533,600	30.000org	144,686,960.00	35.000org	159,155,656	40.000org	175,071,222	40.000org	730,023,438	
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan regional	10.000org	20.000org	131,650,000	25.000org	563,951,000	30.000org	620,346,100.00	35.000org	682,380,710	40.000org	750,618,781	40.000org	2,748,946,591	
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Obyek wisata yang dikelola secara profesional	2obyekwisata	2obyek wisata	35,325,000	4obyek wisata	359,460,700	4obyek wisata	395,406,770.00	4obyek wisata	434,947,447	4obyek wisata	478,442,192	20obyek wisata	1,703,582,109	
1	17	15	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah jenis seni budaya yang dgali dan dikembangkan	4 jenis	1 jenis	16,396,000	2jenis	40,000,000	2jenis	44,000,000.00	2 jenis	48,400,000	2jenis	53,240,000	2 jenis	202,036,000	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	17		17	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah jenis kegiatan budaya	3 kegiatan	8 kegiatan	1,301,850,000	10 kegiatan	1,432,035,000	12 kegiatan	1,575,238,500.00	14 kegiatan	1,732,762,350	16 kegiatan	1,906,038,585	16 kegiatan	7,947,924,435
				Program pengembangan kawasan wisata kuliner						100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000		
				Program pengembangan kawasan wisata bahari						100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000		
				Program pengembangan kawasan agrowisata						100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000		
2	05			Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan														
				Dinas Kelautan dan Perikanan				9,761,615,007		9,092,890,188		9,624,585,331.95		10,473,442,481		11,395,457,234		50,347,990,241
				Belanja Tidak Langsung				1,502,556,007		1,630,273,268		1,793,300,594.35		1,972,630,654		2,169,893,719		
				Belanja Pegawai				1,502,556,007		1,630,273,268		1,793,300,594.35		1,972,630,654		2,169,893,719		
				Belanja Langsung				8,259,059,000		7,462,616,920		7,831,284,737.60		8,500,811,827		9,225,563,515		
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	399,304,500	0 aduan	439,234,950	0 aduan	483,158,445.00	0 aduan	531,474,290	0 aduan	584,621,718	0 aduan	2,437,793,903
			02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	607,843,000	0 aduan	400,000,000	0 aduan	165,000,000.00	0 aduan	181,500,000	0 aduan	199,650,000	0 aduan	1,553,993,000
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	20,262,500	0 aduan	22,288,750	0 aduan	24,517,625.00	0 aduan	26,969,388	0 aduan	29,666,326	0 aduan	123,704,589
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	16,700,000	0 aduan	18,370,000	0 aduan	20,207,000.00	0 aduan	22,227,700	0 aduan	24,450,470	0 aduan	101,955,170
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan		100%	30,810,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000.00	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	77,220,005
2	05		15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah desa pesisir yang diberdayakan	7 Desa	1 Desa	182,750,000	2 Desa	219,300,000	3 Desa	241,230,000.00	4 Desa	265,353,000	4 Desa	291,888,300	14 Desa	1,359,952,000
2	05		16	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	4 Polmaswas	2 Pok maswas	369,345,000	3 Pokmaswas	480,149,000	4 Pok maswas	528,163,900.00	5 Pokmaswas	580,980,290	6 Pok maswas	639,078,319	20 Pok maswas	2,946,782,000
2	05		20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah benih	330,000 ekor benih	396,000 ekor benih	877,520,000	475,200 ekor benih	947,721,600	570,240 ekor benih	1,023,539,328.00	684,288 ekor benih	1,105,422,474	821,346 ekor benih	1,193,856,272	2,946,874 ekor benih	6,530,153,000
2	05		21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan			3,000,680,000		1,930,728,400		2,085,186,672.00		2,252,001,606		2,432,161,734		11,700,758,412
2	05		22	Program Pengembangan sarana dan Sarana Penjualan Perikanan				165,000,000										
2	05		23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah produksi ikan		400 Ton	50,000,000	150,000,000	425 Ton	162,000,000.00	450 Ton	174,960,000	475 Ton	188,956,800	1,750 Ton	4,026,000,000	
2	05		24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah produksi ikan	31,715 Ton	39,170 Ton	2,308,559,000	42,000 Ton	2,493,243,720	45,000 Ton	2,692,703,217.60	47,500 Ton	2,908,119,475	50,000 Ton	3,140,769,033	184,500 Ton	17,179,373,000
2	05		25	Program pengembangan dan sosialisasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah urang yang mengikuti sosialisasi	15 Kegiatan	25 Orang	112,670,000	30 Orang	135,204,000	35 Orang	148,724,400.00	40 Orang	163,596,840	45 Orang	179,956,524	175 Orang	838,445,000

Kode	Bidang Usuan Pemerintahan/ SKPD Penanggungjawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2 05 28	Program pengolahan data dan informasi perencanaan	Adanya dokumen perencanaan			7.615.000		8.376.500		9.214.150.00		10.135.565		11.149.122		46.490.337
	Program peningkatan kesadaran dan pengakkan hukum dalam penyalahgunaan sumber daya laut.	Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi			20.000.000	15 Kelompok	108.000.000	18 Kelompok	116.640.000.00	20 Kelompok	125.971.200	25 Kelompok	136.048.896	78 Kelompok	506.660.096
	Program Pengembangan sarana statistik Kelautan dan Perikanan	Tersedianya data yang akurat			90.000.000	4 Petugas Statistik	100.000.000	4 Petugas Statistik	120.000.000.00	4 Petugas Statistik	140.000.000	4 Petugas Statistik	160.000.000	16 Petugas Statistik	520.000.000
	Usuran Pilihan Industri														
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar				4.647.556.181		5.698.007.926		6.027.621.583.02		6.650.781.634		7.308.108.042		30.332.075.367
	Belanja Tidak Langsung				1.486.978.181		1.613.371.326		1.774.708.459.02		1.952.179.305		2.147.397.235		
	Belanja Pegawai				1.486.978.181		1.613.371.326		1.774.708.459.02		1.952.179.305		2.147.397.235		
	Belanja Langsung				3.160.578.000		4.084.636.600		4.252.913.124.00		4.698.602.330		5.160.710.807		
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.		0 aduan	231.696.000	0 aduan	254.865.600	0 aduan	280.352.160.00	0 aduan	308.387.376	0 aduan	339.226.114	0 aduan	1.414.527.250
	02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	83.122.000	0 aduan	341.434.200	0 aduan	100.577.620.00	0 aduan	110.635.382	0 aduan	121.698.920	0 aduan	757.468.122
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.		0 aduan	12.000.000	0 aduan	13.200.000	0 aduan	14.520.000.00	0 aduan	15.972.000	0 aduan	17.569.200	0 aduan	73.261.200
	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas		0 aduan	10.000.000	0 aduan	15.000.000	0 aduan	16.500.000.00	0 aduan	18.150.000	0 aduan	19.965.000	0 aduan	79.615.000
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan: Laporan/tahun sesuai peraturan/perundangan		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000.00	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	56.410.005
2 07 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah pengusaha dan kelompok terbina		30 kelompok, 150 orang	157.000.000	30 kelompok, 150 orang	172.700.000	30 kelompok, 150 orang	189.970.000.00	30 kelompok, 150 orang	208.967.000	30 kelompok, 150 orang	229.863.700	150 kelompok, 750 orang	958.500.700
	19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah kelompok terbina		1 kelompok	39.000.000	6 kelompok	240.000.000	6 kelompok	264.000.000.00	6 kelompok	290.400.000	6 kelompok	319.440.000	25 kelompok	1.152.840.000
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pedagang yang di kunjungi		15%	22.800.000	20%	25.080.000	25%	27.588.000.00	30%	30.346.800	10%	20.000.000	100%	125.814.800
1 15 17	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah investor peminat		1 investor	10.000.000	6 investor	120.000.000	6 investor	132.000.000.00	6 investor	145.200.000	6 investor	159.720.000	25 investor	566.920.000
	Program pembinaan laki lima dan asongan	Jumlah keluhan masyarakat		40 keluhan	15.000.000	35 keluhan	16.500.000	30 keluhan	18.150.000.00	25 keluhan	19.965.000	20 keluhan	21.961.500	20 keluhan	91.576.500
1 15 18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi tidak aktif		77 koperasi	15.000.000	70 koperasi	16.500.000	65 koperasi	18.150.000.00	60 koperasi	19.965.000	55 koperasi	21.961.500	55 koperasi	91.576.500
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			1 pasar	2.554.960.000	1 pasar	2.759.356.800	1 pasar	2.980.105.344.00	1 pasar	3.218.513.772	1 pasar	3.475.994.873	5 pasar	14.988.930.789

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD Penanggujawab/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP/MD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RP/MD	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Program pembangunan kawasan industri kecil dan menengah				100,000,000		200,000,000.00		300,000,000		400,000,000				

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun periodewaktu tahun 2013-2018, secara bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan konstribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian yang akan dilaksanakan yang meliputi indikator kinerja makro dan indikator program pada setiap prioritas pembangunan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, batasan praktikal yang dapat digunakan untuk mengukur secara operasional kinerja pembangunan atau indikator kinerja pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Indicator kinerja dapat berupa output maupun outcome. Indikator kinerja keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, indicator kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja yang akan dicapai berdasarkan sasaran, tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap setelah kegiatan selesai dan difungsikan. Selain itu, penetapan indicator kinerja akan menggambarkan tolak ukur capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja. Beberapa fungsi indicator kinerja antara lain:

- a. Berfungsi memperjelas tentang apa, berapa atau kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Berfungsi sebagai konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait guna menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan atau dalam meniai kinerja pelaksanaannya, dan
- c. Berfungsi membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan Prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011-2015.

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.45%	6.61%	6.75%	6.80%	6.85%	6.9%	6.9%
2.	Laju inflasi (%)	0.21%	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%	<1%
3.	PDRB per kapita ADHB (Rp)	27,900,000	30,800,000	32,500,000	34,000,000	35,800,000	36,500,000	36,500,000
	PDRB per kapita ADHK(Rp)	25,200,000	27,300,000	28,900,000	30,200,000	32,100,000	33,300,000	33,300,000
4.	Prosentase Penduduk Miskin (%)	16.61	15.84	15.58	15.32	14.10	13.56	13.6
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (%)	67.24	67.86	68.20	68.39	60.76	70.01	70.01
6.	Angka Harapan Hidup	69.44	69.48	69.53	69.60	69.65	69.70	69.70
7.	Indeks Daya Beli							
8.	Ketenagakerjaan							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	64.35	67.7	70.8	73.6	74	75	75
	Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (jiwa)	2,681	1,689	1,064	670	422	266	266
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	50	60	70	80	90	99	99

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
URUSAN WAJIB								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	99.5	99.6	99.99	99.7	99.85	99.99	99.99
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,60 th	9th	12th	9,5th	11th	12th	12th
1.3	Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) angka partisipasi sekolah	97.15	97.5	99.9	97.8	99.25	99.9	99.9
1.4	Angka partisipasi murni (APM) SD	72.63%	76.00%	80.00%	77.00%	79.00%	80.00%	0.8
1.5	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	1 : 113	1 : 115	1 : 120	1 : 115	1 : 120	1 : 120	1 : 120
1.6	Rasio Guru terhadap murid (SD)	1 : 26	1 : 23	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
1.7	Prosentase ketidakiuluran	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Angka partisipasi murni (APM) SMP	71.67%	76.00%	80.00%	77.00%	79.00%	80.00%	0.8
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 151	1 : 180	1 : 200	1 : 180	1 : 190	1 : 200	1 : 200
1.10	Rasio Guru terhadap murid	1 : 13	1:15	1:28	1:15	1 : 28	1 : 28	1 : 28
1.11	Prosentase ketidakiuluran	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)							
1.13	Angka partisipasi murni (APM)	42	63	78	80	85	89	89
1.14.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	58.03	60.45	83.54	68.65	78.98	83.54	83.54
1.15	Rasio Guru terhadap murid	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
1.16	Prosentase ketidakiuluran	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Prosentase bangunan SD/MI yang kondisinya baik	83	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
1.18	Prosentase bangunan SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik	87	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.19	Prosentase bangunan SMA/SMK/MA yang kondisi bangunannya baik	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
1.20	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD)							0
1.21	Prosentase anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	50%	65%	75%	85%	90%	99%	99%
1.22	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.44	0.35	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.93	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	2.93	2.75	2.65	2.50	2.40	2.30	2.30
1.23	Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100	100
1.24	Prosentase Anggaran Pendidikan dalam APBD	18	20	20.5	21	21.5	22	22
1.25	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
1.26	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
1.27	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100
1.28	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
1.29	Angka Melanjutan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100
1.30	Prosentase jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	75	80	85	90	95	100	100
1.31	Prosentase jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S-2	5	7.5	9	10	12.5	15	15
1.32	Jumlah Guru yang bersertifikasi professional pendidik	837	1013	1215	1300	1380	1450	1450

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio Posyandu persatuan balita	1,77	1,77	1,77	1,78	1,78	1,79	1,79
2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik,ustu persatuan penduduk	1,2450	1,2388	1,2388	1,2388	1,2170	1,2180	1,2180
2.3.	Rasio Dokter persatuan Penduduk	1,2438	1,2250	1,2250	1,2167	1,1746	1,1696	1,1696
2.4.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1,316	1,309	1,309	1,307	1,283	1,270	1,270
2.5.	Rasio Bidan per satuan penduduk	1,2925	1,1625	1,1625	1,1581	1,1560	1,1462	1,1462
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71,5	75	78,5	84,5	84,5	89	89
2.7.	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehata yang memiliki kompetensi kebidanan	89	90	91	93	93	94	94
2.8.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86	90	93	98	98	100	100
2.9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA	90	93	95	98	98	100	100
2.10.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (DBD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria	17%	14%	11%	5%	5%	2%	2%
2.13.	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	70%	74%	77%	85%	88%	90%	90%
2.14	Jumlah Puskesmas	12	12	12	13	13	13	13
2.15	Cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,008	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (menkaha)	2000	2500	3000	9000	9000	11000	11000

[illegible]

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.38	Jumlah Kunjungan ibu hamil K4	93	95	97	100	100	100	100
2.39	Jumlah pelayanan nifas	89	90	91	95	95	100	100
2.40	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	75%	80%	85%	95%	95%	100%	100%
2.41	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Jumlah Kasus)	6	3	9	0	0	0	0
2.42	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	89	90	91	93	93	94	94
2.43	Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya 1 kali kunjunga dan 4 kali kunjungan) untuk 4 kunjungan	93	95	96	98	98	99	99
2.44	Prosentase balita mendapatkan vitamin A dosis tinggi	100	100	100	100	100	100	100
2.45	Prosentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium	0	65	70	90	90	100	100
2.46	Prosentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	55	60	80	100	100	100	100
2.47	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kurang gizi	3,02%	<15%	<15 %	<13%	<13%	<12%	<12%
2.48	Prevalensi balita gizi kurang	1,19%	<11,9 %	<11,9%	<10%	<10%	<9%	<9%
2.49	Prosentase penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS	60	70	80	100	100	100	100
2.50	Prosentase penemuan dan penanganan penderita AFP	90	92	93	98	98	100	100
2.51	Prosentase penemuan dan penanganan penderita Diare	95	96	97	100	100	100	100
2.52	Prosentase penemuan dan penanganan penderita ISPA	90	92	95	98	98	100	100
2.53	Prosentase penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	90	92	95	98	98	100	100
2.54	Prosentase penemuan dan penanganan penderita Rabies	90	95	95	98	100	100	100
2.55	Prosentase penemuan dan penanganan penderita Kusta	95	96	97	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum							
	Rasio Jaringan Irigasi	46	51	56	61	67	72	72

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Rasio Rumah Layak Huni	58	62	68	74	80	86	86
	Rasio Panjang Jalan yang dilalui kendaraan roda 4	55.51	59	67	73	79	87	87
	Prosentase panjang Jalan Nasional dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	89	89	92	95	97	100	100
	Prosentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	67	75	79	83	87	92	92
	Prosentase panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	40	45	50	55	60	65	65
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (lebar min 1,5 meter)	12	20	22	23	26	28	28
	Prosentase jaringan drainase dalam kondisi tidak baik/tersumbat	43	46	50	56	62	70	70
	Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	42	48	52	57	62	69	69
	Prosentase wilayah yang memiliki akses terhadap jembatan	62	68	74	80	86	92	92
	Jumlah Desa/Kelurahan rawan banjir	39	37	36	34	32	31	31
	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan longsor	14	12	12	12	12	11	11
	Jumlah Desa/Kelurahan rawan letusan gunung api Soputan	31	31	30	28	26	24	24
	Jumlah Desa/Kelurahan rawan gelombang pasang	24	20	18	18	16	16	16
4.	Perumahan							
	Prosentase keluarga yang memiliki akses sanitasi (jamban)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penataan Ruang							
	Prosentase kawasan yang memiliki Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)	2	4	6	8	10	12	12
	Prosentase kawasan yang memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	2	4	6	8	10	12	12
	Ketersediaan Master Plan Drainase	-	-	1	-	-	-	1
	Ketersediaan Master Plan Jalan dan Jembatan	1	-	-	-	-	-	1
	Ketersediaan Master Plan Jaringan Irigasi	-	-	1	-	-	-	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Agropolitan	-	-	-	1	-	-	1
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Minapolitan	-	-	-	1	-	-	1
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	-	-	-	1	-	-	1
	Penyelesaian pengurusan IMB	35	41	46	50	54	58	58
6.	Perencanaan Pembangunan							
	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7.	Perhubungan							
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	68,435	78,701	90,506	104,082	119,694	137,648	137,648
	<i>Kapal/Laut:</i>							
	Tiba:	-	-	-	-	-	-	-
	Berangkat:	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bus:</i>							
	Tiba:	10	11	12	13	15	16	16
	Berangkat:	5	6	7	8	9	10	10
	Rasio Izin Trayek	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Uji KIR angkutan umum	50	56	60	63	68	70	70
	Jumlah Pelabuhan Laut	1	1	1	1	-	-	1
	Jumlah Terminal Bus:	-	-	1	-	-	-	1
	TipeA=	-	-	-	-	-	-	-
	TipeB=	-	-	-	-	-	-	-
	TipeC=	-	-	-	-	1	1	1
	Rasio Kendaraan Roda 2 terhadap jumlah penduduk	0.03	0.0345	0.04	0.046	0.053	0.06	0.06

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Rasio Kendaraan Roda 4 atau lebih terhadap jumlah penduduk	0.0007	0.000805	0.00093	0.00107	0.00123	0.00141	0.00141
	Rasio jumlah Angkutan Darat (Bus/Mikrolet) terhadap jumlah penduduk	0.000343	0.000394	0.000454	0.000522	0.0006	0.00069	0.00069
	Pemasangan Ramu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	128	147	169	194	223	257	257
	Prosentase angkutan laut/penyeberangan	-	500M	750M	1000 M	1500M	2000M	2000M
8.	Lingkungan Hidup							
	Prosentase jumlah penanganan sampah	20%	45%	65%	70%	75%	75%	75%
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	20.50%	25%	30%	45%	60%	80%	80%
	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1	1	2	3	3	4	4
	Jumlah Taman Kota yang tertata	0 paket	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	8 paket
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
	Rasio penduduk ber-E-KTP per satuan penduduk	0.245	0.80	0.90	0.300	0.500	0.850	0.979
	Rasio bayi ber akte kelahiran	0.234	0.289	0.90	0.307	0.87	0.405	0.505
	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	85	87	94	97	99	100	100
	Ketersediaan database kependudukan	86	88	97	99	100	100	100
	Cakupan penerbitan E-KTP	84	87	89	90	95	98	99
	Ketersediaan akte kematian	83	86	88	93	96	97	99
	Kepemilikan akte perceraian	85	87	94	97	99	100	100
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Rasio KDRT	98	100	-	-	-	-	100
	Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	60	57	56	50	45	30	30
	Prosentase angkatan kerja perempuan	90	90	89	77	72	65	65

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	55	48	45	35	32	30	30
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
	Rata-Rata jumlah anak per keluarga	2.8	2.75	2.7	2.65	2.6	2.5	2.5
	Cakupan peserta KB aktif	86%	86.5%	87.5%	88%	88.5%	89%	89%
	Prosentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	41.27	41.15	40.2	37.5	36.3	35.11	35.11
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	450	400	375	350	325	300	300
	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif	86%	86.5%	87.5%	88%	88.5%	89%	89%
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	7%	6.93%	6.81%	6.76%	6.65%	6.50%	6.50%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	68.30%	69.70%	72%	74%	76%	78.20%	78.20%
	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri	62.70%	64.90%	66.70%	68.90%	70%	72%	72%
	Rasio penyuluh KB/petugas lapangan KB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	12/144	15/144	18/144	20/144	22/144	24/144	24/144
	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Sosial							
	Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	2	2	2	2	2	2	2
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	113	150	175	200	225	250	300
	Fakir Miskin (FM), KAT dan PMKS lainnya:	222	50	60	70	80	90	100
	Anak Terlantar =	143	50	60	70	80	90	100
	Lainnya (sebutkan) =							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memperoleh bantuan sosial	85	100	100	100	100	100	100
	Prosentase panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana/prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	50	50	50	75	75	100
	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	20	25	30	35	40	50
	Prosentase penanganan PMKS	100	100	100	100	100	100	100
14.	Ketenagakerjaan							
	Angka Partisipasi angkatan kerja	70,100	73,660	83,544	84,000	84,900	85,430	85,430
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	2	2	3	2	2	2
	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	12%	12.40%	13.20%	13.40%	13.60%	14.01%	14.01%
	Tingkat pengangguran terbuka	13%	11%	8.457%	7.928%	7.545%	7.140%	7.140%
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	5%	5%	15%	10%	15%	15%
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	15%	25%	40%	50%	50%
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	20	20	20	20	20	20	100
	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)	0	0	0	0	1	1	1
	Prosentase perusahaan yang menerapkan aturan tentang ketenagakerjaan	0.0046%	0.0046%	0.0093%	1.5%	2%	2.5%	2.5%
	Prosentase tenaga kerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan	10%	12%	15%	17%	20%	25%	0
	Rasio Kesempatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	20%	20%	25%	30%	35%	45%	45%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Prosentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas terhadap total kesempatan kerja	25%	35%	60%	75%	80%	90%	90%
	Kontribusi tenaga kerja wanita dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	2%	2%	2%	4%	5%	6%	6%
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Prosentase Koperasi Aktif	34%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Usaha Mikro dan kecil	561	585	603	613	623	633	633
16.	Penanaman Modal							
	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6	17	17	18	19	20	20
	PMDN=	9	11	11	12	13	14	14
	PMA=	6	6	6	6	6	7	7
	Jumlah Nilai investasi berskala nasional							
	PMDN (Rp) =	243,992,230,400	328,000,000,000	350,000,000,000	362,000,000,000	375,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000
	PMA (Rp) =	217,842,230,400	217,842,230,400	330,373,100,000	345,000,700,000	365,000,000,000	385,000,000,000	385,000,000,000
17.	Kebudayaan							
	Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14	20	25	30	35	138
	Cakupan fasilitas seni		1	1	2	3	4	11
	Cakupan Gelaran seni	2	2	2	5	8	10	29
	Cakupan SDM Kesenian	20	30	35	40	45	50	220
	Cakupan Organisasi Kesenian	35	40	41	45	50	55	266
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah organisasi pemuda	23	24	25	26	27	28	28
	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	2	3	3	4	4	4
	Jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga	4	8	15	20	25	27	27
	Jumlah pemuda berprestasi	1	2	2	3	3	5	5
	Prestasi olahraga yang diraih	3	5	6	6	7	8	8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	90	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	90	100	100	100	100	100	100
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	122	140	145	150	155	160	160
	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	-	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	Rasio pos kamling terhadap jumlah desa/kelurahan	-	432	432	432	432	432	432
	Pertumbuhan ekonomi	7.12	7.3	7.5	7.8	8	8.5	8.5
	Angka Kemiskinan	13	10	8	7	5	4	4
	Penegakan PERDA	50%	14%	70%	75%	80%	90%	90%
	Cakupan jumlah patroli petugas Pol-PP	96	96	144	144	192	192	192
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	IKM (Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat)	80	85	87	92	94	96	96
	Tingkat Kesiapan Fasilitas dan Mobilitas Pemadam Kebakaran	-	1	1	1	2	2	2
	KesraJumlah tokoh agama yang menjadi motivator hubungan harmonis antar umat beragama dan antar agama	576	576	576	576	576	576	576
	KesraJumlah kegiatan kebersamaan keagamaan	8	12	15	18	20	25	25
	KesraProsentasi jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan pembangunan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
	HukumProsentase pemenuhan kebutuhan PERDA	60%	65%	70%	75%	80%	85%	100%
	HukumProsentase penyelesaian perkara hukum Pemda	80%	85%	90%	95%	95%	100%	100%
	EkonomiJumlah agen dan pangkalan Gas Elpiji	55	55	60	65	70	75	75

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ortal	Prosentase tersedianya SDM yang sesuai kebutuhan	75	80	82	85	87	90	90
Ortal	Prosentase tersedianya instrument analisa jabatan dan analisa beban kerja	80	90	100	100	100	100	100
Ortal	Prosentase terwujudnya struktur organisasi yang efektif dan efisien	100	100	100	100	100	100	100
Ortal	Prosentase Dokumen LPPD yang tepat waktu dan akurat	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TAPE MHU	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12	12	12
TAPE MHU	Jumlah Desa/Kelurahan	144	144	144	144	144	144	144
TAPE MHU	Prosentase kelengkapan data dan administrasi bidang pemerintahan yang terintegrasi, tepat waktu, terkini dan akurat	75%	80%	85%	87%	90%	90%	90%
PEMB ANGU UNAN	Prosentase kelengkapan data dan administrasi pembangunan yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat	50	80	90	100	100	100	100
	Tersedianya system informasi terhadap layanan public (LPSE) (Paket)	30	100	100	100	100	100	100
	Tingkat akurasi informasi pemerintah di masyarakat	60	80	90	95	95	95	95
	Prosentase peranan fungsi DPRD sebagai representasi masyarakat	75	80	85	90	95	95	95
	Jumlah penerimaan PAD	5,3M	8M	10M	12M	13,5M	15M	15M
	Prosentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program kegiatan	40	80	90	95	100	100	100
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	50	80	90	95	100	100	100
	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	70	80	85	90	95	100	100
	Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karier sesuai kebutuhan	60	80	90	95	100	100	100
	Prosentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten/sesuai kebutuhan	60	80	90	95	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Presentase pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)	60	75	85	95	100	100	100
	Prosentase pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60	80	85	90	100	100	100
21.	Ketahanan Pangan							
	Ketersediaan regulasi tentang ketahanan pangan	-	1	1	1	1	1	1
	Ketersediaan pangan utama	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari)	4,995	4,929	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	Ketersediaan protein perkapita (Gr/Kap/hari)	9802	104.27	63	63	63	63	63
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	78.9	84.3	85	87	89	91	91
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec
	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	-	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec
	Prosentase Kelompok Usaha yang memiliki Produk Unggulan dan Mandiri	5	10	15	25	30	50	50
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	144	144	144	144	144	144	144
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144	144	144	144	144	144	144
	Jumlah LSM	-	-	-	-	-	-	-
	LPM Berprestasi	35	144	144	144	144	144	144
	PKK aktif	144	144	144	144	144	144	144
	Jumlah Posyandu aktif	144	144	144	144	144	144	144
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	144	144	144	144	144	144	144

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	144	144	144	144	144	144	144
	Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan	50	60	65	70	75	80	80
	Prosentase Desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	50	70	85	90	100	100	100
	Jumlah LPM aktif	70	144	144	144	144	144	144
	Jumlah Kepala Lingkungan Berprestasi	3	3	3	4	5	5	5
23.	Statistik							
	Buku "Minahasa Tenggara Dalam Angka"	100	100	100	100	100	100	100
	Buku "PDRB Minahasa Tenggara"	100	100	100	100	100	100	100
24.	Kearsipan							
	Prosentase kelengkapan dokumen dan arsip daerah	20%	20%	40%	80%	90%	100%	100%
25.	Komunikasi dan Informatika							
	Jumlah jaringan komunikasi	9 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	15 Unit	54 Unit
	Rasio wartel/warnet per jumlah penduduk	0.000343	0.0004	0.00046	0.00053	0.0006	0.0007	0.003
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	12	13	15	20	-	-	48
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	1	1	1	1	1	1	1
	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
	Pameran/expo	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam Simda	1	2	2	2	2	2	2
	Rasio kepemilikan PSTN per jumlah penduduk	0.0002	0.00023	0.00026	0.0003	0.00034	0.0004	0.0004
	Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler	49,025	50,121	52,100	53,625	56,120	62,330	62,330
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	22	50	100	150	200	250	250
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	75	100	125	150	175	200	200
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional	-	-	-	-	-	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Media massa (Koran/Radio/TV)	1	1	2	2	2	2	2
	Media online	-	-	-	-	1	1	1
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	-	-	-	1	1	1	1
26.	Perpustakaan							
	Jumlah perpustakaan	8	8	12	20	40	55	70
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	263	1000	3000	8000	15000	25000	40000
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2552	3250	5000	7000	11000	15000	30000
Pelayanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Jumlah Kelompok Tani Binaan	348	520	610	720	780	920	920
1.2.	Jumlah wirausaha baru di bidang pertanian	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Jumlah peralatan dan mesin RPH dan RPU yang memadai	-	-	-	-	1	1	1
1.4	Jumlah RPH dan RPU yang memiliki sarana pengolahan limbah, drainase dan sanitasi	-	-	-	-	1	1	1
1.5	Produksi Tanaman Pangan							
	Padi sawah (ton)	22,439	27,000	28,350	29,768	30,256	31,769	169,582
	Padi ladang (ton)	423	436	449	462	476	480	2726
	Jagung (ton)	22,439	22,889	23,576	24,755	25,498	26,773	145,930
	Kedelai (ton)	26.6	650	683	717	753	791	3620.6
	Kacang Tanah (ton)	102	105	110	116	122	128	683
	Kacang Hijau (ton)	16.4	17.2	18.06	18.95	19.9	20.9	111.41
	Ubi kayu (ton)	1,009	1,059	1,102	1,157	1,215	1,276	6,818
	Ubi jalar (ton)	343	353	364	375	386	398	2219
	Jumlah	46,798	52,509	54,652	57,369	58,726	61,636	331,690
1.6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	Padi sawah (ton)	4.58	4.72	4.86	5.01	5.66	5.83	5.83
	Padi ladang (ton)	2.89	2.98	3.08	3.17	3.27	3.37	3.37

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Jagung (ton)	3.35	3.45	3.55	3.66	3.77	3.88	3.88
	Kedelai (ton)	1.3	1.35	1.41	1.46	1.52	1.57	1.57
	Kacang Tanah (ton)	1.15	1.15	1.2	1.3	1.35	1.35	1.35
	Kacang Hijau (ton)	1.09	1.1	1.1	1.2	1.2	1.25	1.25
	Ubi kayu (ton)	12.77	12.77	13	13	13.5	13.5	13.5
	Ubi jalar (ton)	12.67	13	13.5	13.5	13.65	13.7	13.7
1.7	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)							
	Bawang daun	94	96.82	99.72	102.71	107.85	113.24	614.34
	Tomat	180	360	378	396.9	416.75	437.59	2169.24
	Cabe	93	97.65	102.53	5.13	107.66	113.04	519.01
	Kelimun	405	425.25	438.01	151.18	155.72	160.39	1735.55
	Terong	70	71	71.5	72	72.5	73	430
	Bawang Merah	8.2	8.5	8.5	9	9	10	53.2
	Semangka	105	105	110	110	115	115	660
	Melon	0	1	1	1	1	1	5
	Wortel	0	0	1	1	1	2	5
	Caisin/sawi	27	27	27	27.5	28	28	164.5
	Bayam	30	30	30	31	31.5	31.5	184
	Kangkung	120	120	120	121.5	121.5	122	725
	Jahe	66.78	67	67	67.6	67.5	68	403.88
	Kunyit	61.45	62	62	62.5	62.5	63	373.45
	Temulawak	5.2	6	6	6.2	6.25	6.3	35.95
	Jumlah	1,265.63	1,477.22	1,522.26	1,165.22	1,323.73	1,364.06	8,118.12
1.8	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha)							
	Bawang daun	8.58	8.6	8.6	8.65	8.65	8.8	8.8
	Tomat	10	10	11	11	12	12	12
	Cabe	30	30	30.2	30.2	30.5	30.5	30.5
	Kelimun	40	40	41	41	41.5	41.5	41.5
	Terong	10	10	10	11	11	11.5	11.5
	Bawang Merah	10	10	10	11	11	11.5	11.5
	Semangka	80	80	82	82	83	83	83
	Melon	0	5	5	5.2	5.2	5.3	5.3
	Caisin/sawi	15	15	17	17	20	20	20
	Kubis	30	30	30	33	35	35	35
	Jahe	3.18	3.5	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Kunyit	2.41	3	3.2	3.25	3.4	3.6	3.6
	Temulawak	2.93	3	3.2	3.3	3.5	3.7	3.7
1.9	Produksi Ternak (ton)							
	Sapi	240	250	250	253	255	260	1018
	Kambing	14.8	18	18	18.5	18.5	19	74
	Babi	351.7	440	440	445	448	450	1783
	Ayam Buras	70	71	73	75	76	76	300
	Ayam Pedaging	26	28	29	29	30	30	118
	Itik	13	13	15	17	19	20	71
	Anjing	25	27	27	29	29	30	115
1.10	Produktivitas ternak (kg/ekor)	740.5	847	852	866.5	875.5	885	885
	Sapi	120	120	122	123	123	124	124
	Kambing	18	18	18	18.5	18.5	19	19
	Babi	60	60	61	62	63	63	63
	Ayam Buras	1	1	1	1	1	1	1
	Ayam Pedaging	1	1	1	1	1	1	1
	Itik	5.2	1	1	1	1	1	1
	Anjing	5	5	5	5	5	5	5
1.11	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33.72	34	35	36	37	38	38
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1.320 ha	600 ha	500 ha	400	50	50	1.500 ha
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	1.448 ha	400 ha	420 ha	360 ha	320	280	1.780 ha
2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	33.45	33.35	35.01	36.60	38.30	38.33	38.45
3.	Energi & Sumber Daya Mineral							
	Pertambangan tanpa ijin/Liar	8.39	24.48	24.48	-	-	-	-
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	8.02	8.01	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Ratio ketersediaan daya listrik	37.80	42.57	43.29	43.98	44.66	45.33	45.33
	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	92.56	95.81	96.55	97.27	97.97	98.65	98.65
3.	Pariwisata							
	Total kunjungan wisatawan (Org/tahun)	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	10,500	10,500

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1	Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah	1.91%	2.64%	2.38%	1.38%	1.39%	1.41%	3.00%
1.2	Prosentase Pajak terhadap pendapatan daerah	0.35%	0.57%	0.54%	0.40%	0.40%	0.50%	1.00%
1.3	Prosentase retribusi terhadap pendapatan daerah	0.15%	0.29%	0.10%	0.07%	0.07%	0.08%	1.50%
1.4	Indeks kemampuan rutin (PAD/Belanja Modal)	7.50%	3.40%	7.50%	8.00%	9.00%	9.00%	9.00%
1.5	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12	12	12
1.6	Jumlah Kelurahan	9	9	9	9	9	9	9
1.7	Jumlah Desa, UPT, PMST	135	135	135	135	135	135	135
Infrastruktur								
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.09	0.1035	0.119	0.1368	0.1574	0.181	0.181
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	416.01	478.42	550.18	632.71	727.61	836.76	836.76
1.3.	Panjang Jalan	659.3	659.3	659.3	659.3	659.3	659.3	659.3
1.4.	Prosentase kondisi jalan baik	47.0	50	55	60	65	70	70
1.5.	Prosentase kondisi jalan sedang	8.1	7	6	5	4	3	3
1.6.	Prosentase kondisi jalan rusak	44.9	43	39	35	31	27	27
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	30	100	100	100	100	100	100
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Jumlah Wilayah yang telah memiliki dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	30	100	100	100	100	100	100
2.4	Jumlah Wilayah yang telah memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	0	100	100	100	100	100	100
2.5.	Jumlah PPNS bidang penataan ruang	1	5	10	15	20	25	25
Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Lama proses perijinan	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 2 hari	1 - 2 hari	1 hari	1 hari
	SITU=	-	5	10	15	20	25	25

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	SIUP=	570	210	220	230	240	250	250
	Izin Gangguan (HO)	24	25	26	27	28	30	30
	Izin tempat berjualan minuman beralkohol	13	15	17	20	22	25	25
	Izin reklame	1	3	5	7	10	15	15
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11	50	75	100	150	200	200
	Izin Peruntukan Penggunaan Lahan	-	-	-	-	-	-	-
	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	2	25	25	30	40	50	50
	Izin Usaha Rumah Makan	1	5	5	7	10	15	15
	Izin Usaha Industri	-	3	5	10	15	20	20
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	179	100	120	130	140	150	150
	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-
	Pendaftaran kembali TDP	-	10	25	40	50	75	75
	Pendaftaran Kembali TDG	-	3	5	10	15	30	30
	Tanda daftar Industri (TDI)	7	10	15	20	25	30	30
	Jumlah Perda yang mendukung iklim investasi	4	6	6	5	5	5	5
	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan secara terpadu	121	121	121	121	121	121	121

BABX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2014 dapat berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Setiap SKPD wajib menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan RPJMD serta penjabarannya ke dalam Renstra SKPD, Kepala Bappeda berkewajiban pengendalian dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan RPJMD. Hasil pengendalian dan evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada Bupati Minahasa Tenggara.

Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Bupati Minahasa Tenggara wajib mempublikasikan dokumen RPJMD ini kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk DPRD, sehingga setiap anggota DPRD

yang menjangir aspirasi kepada masyarakat / reses tetap sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam RPJMD ini.